



UNIVERSITAS INDONESIA

**DEKOMPOSISI KEMISKINAN SEKTORAL INDONESIA
PADA TIGA PERIODE PEMERINTAHAN
TAHUN 1999-2011**

TESIS

GINANJAR SYAMSUAR

0706306176

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DEKOMPOSISI KEMISKINAN SEKTORAL INDONESIA
PADA TIGA PERIODE PEMERINTAHAN
TAHUN 1999-2011**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.)**

GINANJAR SYAMSUAR

0706306176

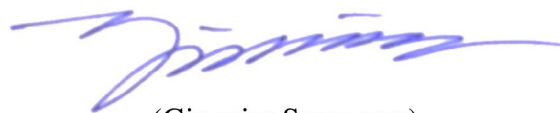
**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK KEMISKINAN
JAKARTA
JANUARI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 15 Januari 2012



(Ginanjar Syamsuar)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ginanjar Syamsuar

NPM : 0706306176

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ginanjar Syamsuar
NPM : 0706306176
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Dekomposisi Kemiskinan Sektoral Indonesia Pada
Periode Pemerintahan Tahun 1999-2011

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada program studi Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Dr. Ir. Riyanto, M.Si. (_____)

Penguji : Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E. (_____)

Penguji : Iman Rozani, S.E., M.Soc.Sc. (_____)

Ditetapkan di : _____

Tanggal : _____

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Perencanaan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Dr. Ir. H. Riyanto, M.Si. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Iman Rozani, S.E. M.Soc.Sc. selaku dosen penguji tesis yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi dalam penyempurnaan tesis ini;
- (3) Bapak Jossy P. Moeis, Ph.D. selaku dosen penguji tesis yang telah banyak memberikan masukan, koreksi, dan arahan yang berarti terhadap penyempurnaan tesis ini;
- (4) Bapak Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
- (5) Bapak Ir. Hendratno Tuhiman, M.E. telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan, serta
- (6) Istri tercinta Sri Ida Lumongga, S.E. yang telah memberikan semangat bantuan dukungan moril dan material.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Jakarta, 15 Januari 2012
Penulis

Ginanjari Syamsuar

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ginanjar Syamsuar
NPM : 0706306176
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

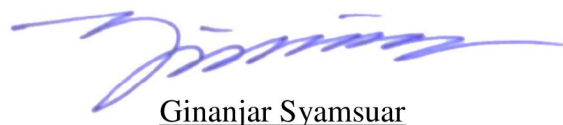
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Dekomposisi Kemiskinan Sektoral Indonesia Pada Tiga periode
Pemerintahan Tahun 1999-2011**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2012
Yang menyatakan


Ginanjar Syamsuar

ABSTRAK

Nama : Ginanjar Syamsuar
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Dekomposisi Kemiskinan Sektor Indonesia Pada Periode Pemerintahan Tahun 1999-2011

Informasi kemiskinan yang dipublikasikan, belum ada secara khusus membahas tentang perubahan ukuran kemiskinan menurut sektor kegiatan ekonomi. Dengan menggunakan data susenas tahun 1999, 2004, 2009, dan 2011, penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya ukuran kemiskinan agregat dan sektoral selama periode kebijakan pembangunan pada tiga masa pemerintahan Indonesia tahun 1999-2011, serta mengidentifikasi sektor apa saja yang berkontribusi terhadap perubahan ukuran kemiskinan agregat di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis dekomposisi kemiskinan sektoral. Hasil analisis diperoleh bahwa pada ketiga masa periode kebijakan terjadi penurunan ukuran kemiskinan agregat baik indeks kemiskinan (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), maupun indeks keparahan kemiskinan (P2). Pada masa kebijakan Propenas ukuran kemiskinan P0 menurun sebesar 6.74 dari 23.42 menjadi 16.68, P1 menurun 1.50 dari 4.56 menjadi 3.06, dan P2 menurun 0.48 dari 1.38 menjadi 0.90. Pada masa kebijakan RPJMN-I ukuran kemiskinan P0 menurun 2.53 dari 16.68 menjadi 14.15, P1 menurun 0.57 dari 3.06 menjadi 2.49, dan P2 menurun 0.23 dari 0.90 menjadi 0.67. Pada masa kebijakan RPJMN-II ukuran kemiskinan P0 menurun 1.66 dari 14.15 menjadi 12.49, P1 menurun 0.41 dari 2.49 menjadi 2.08, dan P2 menurun 0.12 dari 0.67 menjadi 0.55. Penyebab terjadinya penurunan ukuran kemiskinan agregat secara dominan pada Propenas diakibatkan oleh pengaruh intra-sektoral, sementara pada RPJMN-I dan RPJMN-II diakibatkan oleh pengaruh intra-sektoral dan antar-sektoral. Pengentasan kemiskinan pada masa kebijakan Propenas lebih merata diseluruh sektor dimana penurunan tingkat kemiskinan agregatnya dikontribusi oleh seluruh sektor lapangan pekerjaan utama, sedangkan pada masa kebijakan RPJMN-I dan RPJMN-II penurunan tingkat kemiskinan agregat secara signifikan hanya dikontribusi oleh empat sektor lapangan pekerjaan utama yaitu pada RPJMN-I oleh sektor pertanian informal, perdagangan formal dan informal, transportasi formal dan informal, dan konstruksi formal dan informal, sementara pada RPJMN-II oleh sektor pertanian formal, perdagangan formal, transportasi formal dan informal, dan keuangan informal.

Kata kunci:

Dekomposisi, ukuran kemiskinan, kemiskinan sektoral, Propenas, RPJMN-I, RPJMN-II

ABSTRACT

Name : Ginanjar Syamsuar
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Decomposition of poverty sectoral of Indonesia in the reign period 1999-2011

The poverty informations who published, there hasn't been reported the size and changes poverty size by sector of economic activity. By using susenas data years of 1999, 2004, 2009, and 2011, this study aims to calculate the changes poverty of sectoral that occurred over the period of development policy in Indonesia during the reign period 1999-2011, and to identify the sectors that contribute to changes in size. The analysis used is poverty sectoral decomposition analysis. In addition to sectoral poverty measures for the policy period, found that sectors who contribute in the third of policy period are agriculture, constructions, transportations, finance and services. The results of the analysis obtained that in third of policy period has decreased the size of aggregate poverty, either poverty index (P0), poverty gap index (P1) and poverty severity index (P2). During the Propenas Policy poverty measure P0 decreased 6.74 from 23.42 to 16.68, P1 decreased 1.50 from 4.56 to 3.06, and P2 decreased 0.48 from 1.38 to 0.90. During the RPJMN-I Policy poverty measure P0 decreased 2.53 from 16.68 to 14.15, P1 decreased 0.57 from 3.06 to 2.49, and P2 decreased 0.23 from 0.90 to 0.67. During the RPJMN-II Policy poverty measure P0 decreased 1.66 from 14.15 to 12.49, P1 decreased 0.41 from 2.49 to 2.08, and P2 decreased 0.12 from 0.67 to 0.55. Cause of the decrease in aggregate poverty measure predominantly on Propenas caused by the influence of intra-sectoral, while at RPJMN-I and RPJMN-II caused by the influence of intra-sectoral and inter-sectoral. Poverty reduction during the Propenas Policy more evenly throughout the sectors where aggregate poverty reduction contributed by all major employment sectors, while at the RPJMN-I and RPJMN-II Policy aggregate poverty reduction significantly contributed only by the four main employment sectors on RPJMN-I by the informal agricultural sector, formal and informal trade, transportation formal and informal, and formal and informal construction, while at the RPJMN-II by formal agricultural sector, formal trade, transportation formal and informal, and informal finance.

Key words:

Decomposition, poverty size, poverty sectoral, Propenas, RPJMN-I, RPJMN-II

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Konsep Kemiskinan	1
1.1.2. Kebijakan Kemiskinan.....	3
1.1.3. Sektor kegiatan ekonomi dan Kemiskinan	5
1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Analisis.....	9
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Kebijakan Pemerintah Tentang Kemiskinan	14
2.2. Kemiskinan.....	17
2.3. Struktur perekonomian, Tenaga kerja dan Kemiskinan	22
2.4. Tinjauan Empiris	30
3. METODE PENELITIAN	32
3.1. Data dan Definisi Variabel	32
3.1.1. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.1.2. Definisi Variabel.....	32
3.2. Analisis Deskripsi dan Dekomposisi Kemiskinan Sektoral	34
3.2.1. Analisis Deskripsi Kemiskinan Sektoral.....	34
3.2.2. Analisis Dekomposisi Kemiskinan Sektoral.....	34
3.2.3. Pengujian Signifikansi Perbedaan Ukuran Kemiskinan Diantara Dua Periode	38

4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Analisis Deskriptif Kemiskinan Sektoral	42
4.2. Analisis Perubahan Ukuran Kemiskinan Sektoral	52
4.2.1. Perubahan Ukuran Kemiskinan periode kebijakan Propenas tahun 1999-2004:.....	53
4.2.2. Perubahan Ukuran Kemiskinan periode kebijakan RPJMN-I tahun 2004-2009:.....	58
4.2.3. Perubahan Ukuran Kemiskinan periode kebijakan RPJMN-II tahun 2009-2011:	63
4.3. Analisis Pengaruh Perubahan Ukuran Kemiskinan Sektoral Pada Tiga Masa Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 1999-2011.....	69
4.3.1. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Tingkat Kemiskinan Sektoral terhadap Perubahan Tingkat Kemiskinan.	69
4.3.2. Analisis Pengaruh Program Pengentasan Kemiskinan terhadap Perubahan Ukuran Kemiskinan Sektoral.	80
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran Kebijakan.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Garis Kemiskinan Makanan dan Non-Makanan Indonesia Tahun 2005-2011.....	19
Tabel 2.2.	Perkembangan Ukuran Kemiskinan Indonesia Tahun 1999-2011.	20
Tabel 2.3.	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Periode 2004-2011.....	29
Tabel 4.1.	Deskripsi Sektoral Menurut Status Pekerjaan Utama ¹⁾ , Periode Tahun 1999-2004	43
Tabel 4.2.	Deskripsi Sektoral Menurut Status Pekerjaan Utama ¹⁾ , Periode Tahun 2004-2009	45
Tabel 4.3.	Deskripsi Sektoral Menurut Status Pekerjaan Utama ¹⁾ , Periode Tahun 2009-2011	47
Tabel 4.4.	Jumlah Sektor yang mengalami Perubahan Berdasarkan Signifikansi Rataan Konsumsi, Periode Tahun 1999-2011.....	50
Tabel 4.5.	Perubahan Indeks Kemiskinan Sektoral, Periode 1999-2004	54
Tabel 4.6.	Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Sektoral, Periode 1999-2004.....	55
Tabel 4.7.	Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Sektoral, Periode 1999-2004.....	57
Tabel 4.8.	Perubahan Indeks Kemiskinan Sektoral, Periode 2004-2009	59
Tabel 4.9.	Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Sektoral, Periode 2004-2009.....	60
Tabel 4.10.	Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Sektoral, Periode 2004-2009.....	62
Tabel 4.11.	Perubahan Indeks Kemiskinan Sektoral, Periode 2009-2011	64
Tabel 4.12.	Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Sektoral, Periode 2009-2011	66
Tabel 4.13.	Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Sektoral, Periode 2009-2011	67
Tabel 4.14.	Perubahan Tenaga Kerja Sektoral Menurut Status Pekerjaan Per Periode Kebijakan.	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Skema Analisis Dekomposisi Kemiskinan Sektoral Indonesia pada Tiga Periode Pemerintahan Tahun 1999-2011	11
Gambar 2.1.	Perkembangan Ukuran Kemiskinan Indonesia Tahun 1999-2011.	21
Gambar 2.2.	Kurva U Terbalik Kuznets (<i>Inverted U Curve Hypothesis</i>)	24
Gambar 2.3.	Struktur PDB Sektoral Indonesia Tahun 2000-2011.....	27
Gambar 4.1.	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000), Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan Periode Tahun 1999-2011	70
Gambar 4.2.	Hubungan Rataan Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000) dengan Tingkat Kemiskinan Sektoral, Periode Kebijakan Proenas 1999-2004	71
Gambar 4.3.	Hubungan Rataan Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000) dengan Tingkat Kemiskinan Sektoral, Periode Kebijakan RPJMN-I 2004-2009	73
Gambar 4.4.	Hubungan Rataan Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000) dengan Tingkat Kemiskinan Sektoral, Periode Kebijakan RPJMN-II 2009-2011	76
Gambar 4.5.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Sektoral) pada Tiga Masa Kebijakan Pembangunan Nasional, Tahun 1999-2011	77
Gambar 4.6.	Perubahan Tingkat Kemiskinan Sektoral pada Tiga Masa Kebijakan Pembangunan Nasional, Tahun 1999-2011	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Indeks Kemiskinan Sektoral, Tahun 1999-2011	89
Lampiran 2:	Indeks Kedalaman Kemiskinan Sektoral, Tahun 1999-2011	90
Lampiran 3:	Indeks Keparahan Kemiskinan Sektoral, Tahun 1999-2011	91
Lampiran 4:	Kontribusi Sektor terhadap Perubahan Ukuran Kemiskinan Agregat, Tahun 1999-2011	92
Lampiran 5:	Persentase Kontribusi Indeks Kemiskinan Sektoral Terhadap Indeks Kemiskinan Agregat, Periode 1999-2004.....	93
Lampiran 6:	Persentase Kontribusi Indeks Kemiskinan Sektoral Terhadap Indeks Kemiskinan Agregat, Periode 2004-2009.....	94
Lampiran 7:	Persentase Kontribusi Indeks Kemiskinan Sektoral Terhadap Indeks Kemiskinan Agregat, Periode 2009-2011.....	95
Lampiran 8:	Konsep Dekomposisi Sektoral Martin Ravallion - Huppi.....	96

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Konsep Kemiskinan

Mengatasi kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama kebijakan pemerintah Indonesia disamping prioritas lainnya. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pertama MDGs yaitu menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Tersedianya angka rumahtangga kemiskinan yang akurat pada setiap wilayah dan terbandingkan pada tingkat nasional merupakan syarat mutlak dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks pembangunan, angka kemiskinan berguna untuk: a) Penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan nasional, termasuk kebijakan dan rencana penurunan kemiskinan dan pembangunan sektoral; b) Targeting (lokasi dan sasaran) program-program pembangunan terutama oleh pemerintah c) Penentuan alokasi pembiayaan program kemiskinan maupun sektoral; d) Monitoring dan evaluasi program pembangunan termasuk pencapaian MDGs; e) Salah satu instrument mengukur kinerja pemerintah pusat dan daerah.

Makna kemiskinan amat luas, tetapi pada dasarnya adalah ketidakmampuan rumahtangga atau orang dalam memenuhi kebutuhan hidup layak minimum. Definisi kebutuhan layak minimum dan cara pengukurannya akan menentukan tinggi rendahnya garis kemiskinan. Ukuran kemiskinan yang sering digunakan di berbagai Negara berkembang adalah kemiskinan *absolute* yang didasarkan pada pengeluaran atau pendapatan untuk hidup layak minimum yang didasarkan pada sejumlah keranjang pangan (*food basket*) atau pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan kalori ditambah sejumlah pengeluaran non pangan yang minimal untuk hidup layak.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan dan memetakan kemiskinan di Indonesia dari waktu ke waktu. BPS telah melakukan penghitungan kemiskinan sejak awal tahun 1980-an yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 1984 mencakup data kemiskinan periode 1976-1981.

Sejak saat itu setiap tiga tahun BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia bersamaan dengan ketersediaan data konsumsi rumah tangga yang dikumpulkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Bahkan mulai tahun 2002, penghitungan kemiskinan dilakukan setiap tahun dengan dilaksanakannya survei panel konsumsi rumah tangga melalui SUSENAS setiap tahunnya.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan.

Pada tahun 1998 BPS melakukan penyempurnaan metode pengukuran kemiskinan rumahtangga, dengan menyempurnakan keranjang pangan (*food basket*) dan komponen non pangan, yang didasarkan pada survei terbatas di sepuluh provinsi. Penghitungan garis kemiskinan makanan didasarkan atas kebutuhan energi minimum penduduk Indonesia sebesar 2.100 kilo kalori per hari yang merupakan rekomendasi Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978. Metode ini menghasilkan perluasan komoditas *food basket* dan keterbandingan antar daerah, dimana dihasilkan *food basket* nasional dengan 52 jenis. Juga dilakukan penyempurnaan dalam penentuan garis kemiskinan non-makanan dengan meningkatkan kualitas pelayanan untuk: (1) perawatan kesehatan dari puskesmas

ke dokter praktek umum, (2) biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar menjadi tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, dan (3) transportasi dalam kota menjadi transportasi antar kota. Penghitungan garis kemiskinan non-makanan didasarkan pada 51 komoditi yang mencakup perumahan, pakaian dan alas kaki, perawatan kesehatan, biaya pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lain.

Perubahan pola konsumsi penduduk selama satu dekade terakhir ini menunjukkan adanya pergeseran dan peningkatan yang signifikan secara kuantitas maupun kualitas. Standar baru dalam penghitungan penduduk miskin harus disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk yang terjadi sehingga mempunyai sifat dinamis, cakupan komoditi yang komprehensif pada semua kelompok penduduk serta mencerminkan kebutuhan dasar penduduk. Penghitungan garis kemiskinan yang mengacu pada keranjang komoditi yang seragam secara nasional perlu terus dikaji mengingat adanya perbedaan pola makanan antar daerah dan terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

1.1.2. Kebijakan Kemiskinan

Upaya pemulihan ekonomi bangsa (khususnya masalah pengentasan kemiskinan) pada dasarnya membutuhkan waktu, yang harus dibarengi dengan formulasi dan perencanaan strategi kebijakan dengan pendekatan multi dimensi. Penanggung jawab kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah harus lebih berkonsentrasi pada upaya-upaya yang berorientasi pada penciptaan kebijakan ekonomi yang kondusif, stabilitas politik dan keamanan, dan yang paling penting adalah masalah kepastian hukum.

Pembahasan tentang perlunya kebijakan ekonomi yang kondusif memerlukan suatu kajian yang serius dan terus menerus dengan ukuran pencapaian indikator yang jelas dan terukur. Pemerintah dituntut untuk lebih serius dalam menjalankan roda pemerintahan mulai dari perencanaan pembangunan, monitoring proses dan pengendalian dampak pembangunan yang ada sehingga kita dapat lebih mengefektifkan tercapainya sasaran program pembangunan yang telah, sedang ataupun akan dijalankan oleh pemerintah. Dengan kata lain harus diciptakan suatu sistem bagaimana pengendalian pembangunan yang ada dapat difungsikan untuk meminimalisir deviasi antara

misi makro pembangunan nasional dengan operasionalisasi program pembangunan yang selama ini terjadi di lapangan.

Terkait dengan upaya perencanaan sistem pengendalian pembangunan nasional, fokus masalah kemiskinan perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Angka kemiskinan telah menjadi informasi strategis karena menjadi acuan pencapaian kinerja pemerintah dan selama ini dilaporkan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan dalam rangka perayaan kemerdekaan di depan sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Semua pihak menaruh perhatian terhadap perkembangan angka kemiskinan yang setiap tahun diumumkan BPS.

Tinjauan terhadap rencana program kebijakan pembangunan era pemerintahan reformasi tiga periode kebelakang (periode tahun 1999-2014) yaitu pada saat pemerintahan dipimpin oleh Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur)-Megawati Sukarno putri, dan dua kali pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, kebijakan tentang kemiskinan tertuang jelas dalam misi dan visi atau rencana sasaran pada masing-masing arah kebijakan pembangunannya. Ketiga periode kebijakan era reformasi tersebut adalah periode 1999-2004 (Propenas), periode 2005-2009 (RPJM-I), dan periode 2010-2014 (RPJM-II).

Pada periode kebijakan 1999-2004, pelaksanaan pembangunan didasarkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan pelaksanaan lebih lanjut GBHN dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa, dimana kebijakan mengenai kemiskinan tersirat dalam visi dan misi butir 9 (Sembilan) yaitu: *“Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja”*.

Pada periode kebijakan 2005-2009, pelaksanaan pembangunan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN-I) 2005-2009

dimana sasaran utama penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin (prosentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8.2 persen pada 2009) serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.

Dan pada periode kebijakan 2010-2014, pelaksanaan pembangunan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN-II) 2010-2014 dimana sasaran utama penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan adalah tertuang dalam sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat bidang ekonomi, yang dinyatakan secara jelas dengan angka target tingkat kemiskinan yang ingin dicapai pada akhir tahun 2014 sebesar 8-10 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5-6 persen untuk pertumbuhan ekonomi rata-rata 6.3-6.8 persen pertahun.

1.1.3. Sektor kegiatan ekonomi dan Kemiskinan

Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam hal penciptaan sektor ekonomi yang kokoh, struktur perekonomian Indonesia yang terdiri dari sembilan sektor kegiatan ekonomi, sebagian atau keseluruhannya senantiasa selalu berubah. Dinamika perubahan struktur tersebut merupakan hal yang wajar dalam suatu perekonomian. Perubahan struktur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan insentif (yakni *rate of return on investment*), yang senantiasa berubah seiring dengan perkembangan *demand* dan *supply* di masing-masing sektor; perkembangan teknologi; dan ketersediaan sumber daya atau faktor produksi bagi perkembangan usaha disektornya.

Ketersediaan sumber daya atau produksi, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam penentu arah perubahan struktur. Kinerja pasar tenaga kerja yang tidak merata akan menimbulkan kekhawatiran meningkatnya tingkat pengangguran.

Dua indikator utama kualitas lapangan kerja adalah bagian pekerja aktif yang dipekerjakan di sektor formal dan informal. Pekerjaan sektor formal dianggap 'lebih baik' karena gaji rutin memberikan jaminan pendapatan kepada pekerja dan mereka berhak mendapatkan tunjangan tambahan seperti yang diatur oleh Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan. Sedangkan pekerjaan sektor informal secara rata-rata hanya mendapatkan 30 persen lebih sedikit daripada pekerja di sektor formal atau pemberi kerja, mereka tidak mendapatkan tunjangan nonupah yang diterima pekerja sektor formal, misalnya tunjangan medis atau transportasi dan akses ke kredit. Pekerja informal juga menyatakan menghadapi tekanan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerja di sektor formal.

Huppi dan Ravallion (1990), dalam penelitiannya tentang “Struktur Kemiskinan Sektorial pada Periode *Adjustment* di Indonesia dalam Pertengahan tahun 1980-an”, menyimpulkan bahwa meskipun secara keseluruhan tingkat kemiskinan mengalami penurunan, namun pengaruhnya tidak merata pada lintas regional dan sektorial, di mana pengurangan kemiskinan yang signifikan terutama terjadi pada sektor *rural farming*. Lebih lanjut Ravallion dan Datt (1999), melakukan studi tentang pengaruh komposisi pertumbuhan ekonomi sektorial dan kondisi awal suatu daerah terhadap pengurangan tingkat kemiskinannya. Demikian pula dengan Bigsten dan Levin (2000), yang menyebutkan pentingnya memperhatikan dinamika intersektoral dalam menyusun strategi untuk mengurangi kemiskinan.

Hoeven (2004), melihat adanya keterkaitan antara perubahan struktur ekonomi di suatu negara dan ketidakmerataan pendapatan serta kemiskinan yang diakibatkannya. Sementara itu peneliti Kebanksentralan Indonesia Sri Liliani Suselo dan Tarsidin (2008), memaparkan kesimpulan penelitiannya tentang “Kemiskinan di Indonesia: Pengaruh Pertumbuhan dan Perubahan Struktur ekonomi” bahwa pada tingkat nasional dinamika tingkat kemiskinan di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa periode dimana pertumbuhan ekonomi diwarnai dengan peningkatan kemiskinan. Lebih lanjut menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan yang terjadi dalam ruang lingkup sektor yang bersangkutan yang diukur dengan *Headcount ratio (HCR)* dan *Income Gap ratio (IGR)* sektoral pada umumnya relatif tinggi. Namun jika

diukur dengan *HCR* tertimbang dan *IGR* tertimbang terlihat bahwa kemiskinan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan adalah yang paling tinggi.

Berdasarkan penjelasan konsep, kebijakan, metode pengukuran serta beberapa temuan empiris penelitian tentang kemiskinan sebelumnya maka penelitian ini dilakukan untuk maksud menganalisis perubahan suatu ukuran kemiskinan yang terjadi pada tingkat sektoral kegiatan ekonomi dengan tinjauan lebih terhadap indikator ketenagakerjaannya sebagai hasil dari kebijakan yang telah direncanakan pada masa periodenya. Penelitian ini difokuskan pada tiga era pemerintahan reformasi setelah era kekuasaan Presiden Soeharto, yaitu pada saat pemerintahan dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)-Megawati Sukarno putri, dan dua kali pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Keterbatasan data merupakan kendala untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif untuk melakukan studi perbandingan dengan era kepemimpinan Presiden Soeharto.

1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan pembangunan nasional era reformasi tiga periode kebelakang yaitu Propenas (1999-2004), RPJMN-I (2005-2009), dan RPJMN-II (2010-2014), dimana dalam setiap periodenya tertuang sasaran kebijakan tentang kemiskinan dengan jelas. Namun hasil capaian berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap setiap kebijakannya hanya menyajikan informasi trend tingkat kemiskinan yang diklaim sebagai keberhasilan pada masa periode kebijakannya.

Dari semua informasi tentang kemiskinan yang disajikan, belum ada laporan secara khusus yang membahas tentang perubahan ukuran kemiskinan menurut sektoral apalagi analisis interaksi diantara kesembilan sektor-sektornya. Padahal informasi ini sangat penting bagi perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan nasional/regional, agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih terarah.

Melalui pendekatan dekomposisi kemiskinan sektoral pada penelitian ini, ukuran kemiskinan didekomposisi berdasarkan sisi sektoralnya guna mengetahui

besarnya perubahan ukuran kemiskinan di antara periode pada masa kebijakan pembangunan bidang pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dengan demikian, berkaitan dengan beberapa permasalahan yang diungkapkan diatas maka pertanyaan penelitian yang harus dijawab oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Berapa besar perubahan ukuran kemiskinan yang terjadi pada masing-masing periode kebijakan?
- b. Berapa besar perubahan pengurangan (reduksi) ukuran kemiskinan yang terjadi dalam masing-masing sektor (intra-sektoral)?
- c. Berapa besar perubahan *share* populasi di masing-masing sektor (antar-sektoral)?
- d. Berapa besar ukuran korelasi antara perubahan ukuran kemiskinan intra-sektoral dengan antar-sektoral?,
- e. Sektor apa saja yang berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan ukuran kemiskinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah berangkat dari adanya pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya pada perumusan masalah, yaitu untuk:

1. Menghitung dan menganalisis perubahan ukuran kemiskinan agregat dan sektoral yang terjadi selama periode kebijakan pembangunan pada tiga masa pemerintahan Indonesia tahun 1999-2011, yaitu perubahan ukuran kemiskinan sektoral yang terjadi pada masa kebijakan Propenas, RPJMN-I, dan RPJMN-II, serta
2. Menentukan sektor apa saja yang berkontribusi terhadap penurunan atau peningkatan ukuran kemiskinan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan akan memberikan manfaat, terutama bagi pemerintah sebagai *policy maker*. Hasil dari tesis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan langsung pada perbaikan atau penataan

sisi sektoralnya. Dengan tesis ini diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tesis ini juga bermanfaat bagi bidang keilmuan karena akan memperkaya khasanah kajian mengenai dekomposisi kemiskinan tingkat sektoral di Indonesia.

1.5. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Survei Sosial Ekonomi Nasional tingkat rumah tangga (Susenas) yang diperoleh dari Badan pusat Statistik (BPS). Data Susenas yang digunakan adalah Susenas Modul tahun 1999, Susenas Kor tahun 2004, Susenas Kor tahun 2009, dan Susenas Modul tahun 2011. Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, dengan menggunakan bantuan *software* aplikasi pengolahan data Stata, terlebih dahulu terhadap masing-masing data Susenas dikompilasi dan dilakukan pengolahan menurut sektoral dan pengelompokan indikator status ketenagakerjaannya yaitu formal dan informal dengan data hasil olahan yang ditampilkan adalah berupa data jumlah individu, share populasi, dan besaran rata-rata konsumsi perkapita (dalam rupiah/kapita/bulan) yang disusun menjadi sebuah tabel sebagai gambaran untuk Deskripsi Kemiskinan Sektoral.

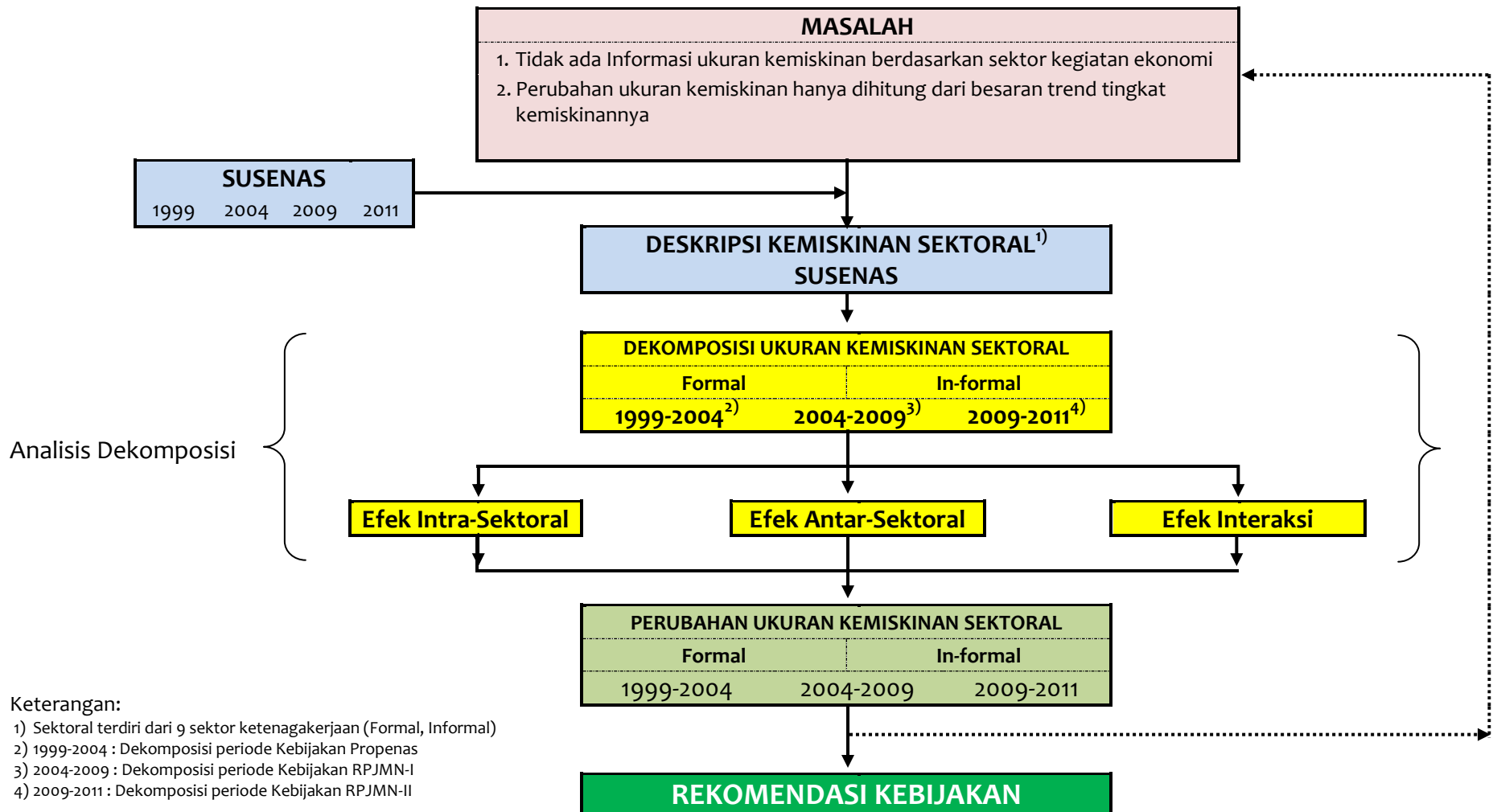
Tahap kedua, adalah menghitung perubahan ukuran kemiskinan sektoral terhadap dua periode waktu pada masa kebijakan yang akan dianalisis, dalam hal ini yang akan didekomposisi adalah pasangan data susenas tahun 1999 dengan tahun 2004 sebagai cerminan kebijakan “Propenas”, pasangan data susenas tahun 2004 dengan tahun 2009 sebagai cerminan kebijakan “RPJMN-I” dan pasangan data susenas tahun 2009 dengan tahun 2011 sebagai cerminan kebijakan “RPJMN-II”. Dengan output yang dihasilkan adalah besaran nilai efek Intra-sektoral, efek Inter-sektoral atau efek pergeseran populasi, dan efek Interaksi untuk tiga buah ukuran kemiskinan yaitu Indeks kemiskinan (*Head Count Index*), Indeks kesenjangan kemiskinan atau indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*), dan kwadrat Indeks kesenjangan kemiskinan atau Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index - Distribution-sensitive Measure*).

Tahap ketiga, adalah analisis penghitungan perubahan ukuran kemiskinan sektoral untuk masing-masing periode kebijakan yang ingin diketahui/dihitung besarnya nilai perubahan yang terjadi untuk setiap masa kebijakan pemerintah

yang dianalisis, dimana merupakan jawaban dari tujuan penelitian yang ditentukan.

Tahap keempat, adalah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.

Skema analisis penelitian ini digambarkan dalam bentuk diagram alur pada Gambar 1.1. berikut.



Gambar 1.1. Skema Analisis Dekomposisi Kemiskinan Sektoral Indonesia pada Tiga Periode Pemerintahan Tahun 1999-2011

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Guna membatasi analisa, maka penelitian ini hanya akan difokuskan pada kasus Indonesia untuk periode waktu 13 tahun yang terbagi kedalam tiga periode masa pemerintahan yaitu periode tahun 1999-2004, periode tahun 2005-2009, dan pertengahan periode 2010-2014 (tahun 2010 dan 2011). Dengan kata lain, pembahasan pada periode sebelum dan sesudah tahun penelitian di luar lingkup penelitian ini. Analisa dilakukan dengan pendekatan penghitungan besarnya perubahan ukuran kemiskinan yang terjadi selama masa tiga periode pemerintahan tersebut dengan pendekatan analisis dekomposisi sektoral. Adapun data-data yang digunakan hanya memanfaatkan potensi data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berupa data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang terdiri atas empat tahun survei diantaranya Susenas Modul tahun 1999, Susenas Kor tahun 2004, Susenas Kor tahun 2009, dan Susenas Modul tahun 2011.

Penelitian ini juga fokus pada analisa interaksi antar perubahan ukuran kemiskinan inter dan antar sektoral kegiatan ekonomi yang difokuskan pada status ketenagakerjaan. Sedangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut tidak dimasukkan dalam analisa dan pembahasan. Dengan demikian maka pembahasan di luar objek penelitian tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Tesis ini akan tersusun dalam 5 Bab dengan masing-masing pokok bahasan sebagai berikut:

Bab Pertama PENDAHULUAN, adalah menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua TINJAUAN PUSTAKA, adalah menguraikan kajian literatur mengenai definisi dan teori yang mendasari berbagai keterkaitan variabel yang ditelaah dan digunakan dalam penelitian, serta mengulas beberapa temuan atau penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain baik individu maupun kelompok/lembaga yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Bab ketiga METODE PENELITIAN, adalah menjelaskan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan menguraikan penjelasan berbagai definisi variabel, serta menguraikan logika tahapan metode analisis yang digunakan hingga diperoleh hasil yang menjadi tujuan akhir penelitian ini.

Bab keempat HASIL DAN PEMBAHASAN adalah menguraikan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini.

Bab kelima KESIMPULAN DAN SARAN, adalah bab penutup yang merupakan kesimpulan dari temuan pada hasil dan pembahasan serta memberikan saran-saran dan rekomendasi yang dianggap penting dalam rangka pengambilan kebijakan kedepan untuk mendorong perbaikan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Pemerintah Tentang Kemiskinan

Indonesia bersama-sama banyak negara lain di dunia telah menyepakati resolusi yang dicetuskan dalam *The Millenium Summit* tahun 2000 yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengagendakan pencapaian upaya penghapusan kemiskinan dan hal-hal yang terkait dengan itu. Agenda ini dikemas dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berisi 3 hal yaitu, tujuan pembangunan milenium berikut target dan indikator untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Berbeda dengan kesepakatan global umumnya yang terdahulu, seperti *Convention of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dan *Convention on The Right of The Child* (CRC), MDGs berisi tujuan pembangunan yang keberhasilannya hampir semuanya dapat diukur secara kuantitatif dan ditentukan batas waktu pencapaiannya.

MDGs mencakup 6 bidang kehidupan manusia dengan 8 tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua,
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
4. Menurunkan angka kematian anak,
5. Meningkatkan kesehatan ibu,
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya,
7. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, dan
8. Mengembangkan kerja sama global untuk pembangunan.

Kemudian tujuan ini dijabarkan dalam 18 target dengan sekitar 48 indikator yang perlu untuk pemantauan (ESCAP-UNDP, 2002). Di antara tujuan tersebut tujuan ke 1 sampai 7 merupakan tujuan pokok MDGs yang dapat dipantau secara mudah oleh masing-masing negara. Sementara itu sebagian indikator MDGs untuk memantau tujuan kedelapan yang terkait dengan globalisasi tidak mudah didapatkan pada saat ini, kecuali proksi indikator yang berkaitan dengan target

16, 17, dan 18. Masing-masing target tersebut berkaitan dengan ketenagakerjaan, akses terhadap pengobatan, dan fasilitas teknologi informasi.

Periode waktu yang telah disepakati oleh pemerintahan Indonesia dan juga negara anggota PBB yang lain untuk mencapai tujuan tersebut adalah tahun 1990-2015. Dengan tahun 1990 dipilih sebagai tahun dasar dan tahun 2015 adalah batas akhir dapat dicapainya sebagian besar tujuan pembangunan milenium yang disepakati.

Tujuan pembangunan milenium ternyata sejalan dengan program pembangunan sosial yang dicanangkan pemerintah Indonesia terutama pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah atau disingkat RPJM dan program pembangunan pada periode-periode sebelumnya seperti Program Pembangunan Nasional disingkat sebagai Propenas (Bappenas, 2004). Oleh karena itu, pemerintah baik di pusat maupun daerah, perlu memahami MDGs dan mengupayakan agar tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai.

Tinjauan terhadap kebijakan pemerintah era setelah krisis tiga periode kebelakang yaitu mulai periode pemerintahan tahun 1999 sampai dengan tahun 2014, kebijakan tentang kemiskinan tertuang dalam misi dan visi atau rencananya pada masing-masing arah kebijakannya. Ketiga periode kebijakan pembangunan era tersebut adalah periode 2000-2004 (Propenas), periode 2005-2009 (RPJM-I), dan periode 2010-2014 (RPJM-II).

Periode kebijakan Propenas 2000-2004, pelaksanaan pembangunan didasarkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan pelaksanaan lebih lanjut GBHN dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa.

Propenas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan yang sebelumnya. Propenas berupaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelenggara pembangunan di pusat (Departemen/LPND) dan di daerah (Pemerintah Daerah) untuk membuat

rencana pembangunannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan nasional.

Propenas disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional GBHN 1999-2004. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan mengenai kemiskinan pada Propenas tersirat dalam visi dan misi poin 9 yaitu: *Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.*

Secara terperinci tertuang dalam sasaran umum Propenas di bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi, antara lain, ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara bertahap mencapai sekitar 6-7 persen, dan laju inflasi terkendali sekitar 3-5 persen, menurunnya tingkat pengangguran menjadi sekitar 5,1 persen, dan menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 14 persen pada tahun 2004.

Periode kebijakan RPJMN-I 2005-2009, pelaksanaan pembangunan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN-I) 2005-2009 dimana sasaran utama penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin (persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8.2 persen pada 2009) serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.

Sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-I, Periode kebijakan RPJMN-II 2010-2014, pelaksanaan pembangunan

didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN-II) 2010-2014 dimana sasaran utama penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan adalah tertuang dalam sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat bidang ekonomi, yang dinyatakan secara jelas dengan angka target tingkat kemiskinan yang ingin dicapai pada akhir 2014 sebesar 8-10 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5-6 persen untuk pertumbuhan ekonomi rata-rata 6.3-6.8 persen pertahun.

2.2. Kemiskinan

Kemiskinan seringkali didefinisikan sebagai ketidakcukupan pendapatan dan harta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkup dimensi ekonomi. Todaro dan Smith (2006) menuliskan cakupan kemiskinan absolut sebagai persoalan kemiskinan yang lebih penting. Cakupan kemiskinan absolut adalah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk ini hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang digunakan berbeda untuk tiap negara, tetapi yang umum dijadikan standar adalah berdasarkan ketetapan World Bank yaitu pendapatan perkapita sebesar US\$ 1 atau US\$2 per hari dalam US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*).

Menurut Bellinger (2007) konsep kemiskinan melibatkan multidimensi. Secara umum, kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu dimensi *income* atau kekayaan dan dimensi non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi *income* atau kekayaan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah biasanya bersifat sementara, tetapi juga diukur melalui kepemilikan harta kekayaan seperti lahan bagi petani kecil dan melalui akses jasa pelayanan publik. Sedangkan dari dimensi non-faktor keuangan ditandai dengan adanya keputus-asaan atau ketidak-berdayaan yang juga dapat menimpa berbagai rumah tangga berpenghasilan rendah.

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang terjadi dalam pembangunan ekonomi, dengan berbagai ukuran kemiskinan yang digunakan sebagai indikator tingkat kemiskinan. Bank Dunia (*World Bank*) menetapkan

kemiskinan berdasarkan pendapatan per orang per hari, dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang mempunyai pendapatan kurang dari US\$ 1 atau US\$ 2 per hari. Sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan kemiskinan berdasarkan kriteria keluarga pra sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I).

Penghitungan tingkat kemiskinan dihadapkan pada dua hal, yaitu pengidentifikasian penduduk miskin dari total penduduk dan menghitung indeks kemiskinan berdasarkan data yang tersedia (Sen, 1976). *Head-count ratio* sebagai ukuran kasar kemiskinan memenuhi dua aksioma yaitu aksioma *monotonisitas* dan aksioma transfer. Aksioma *monotonisitas* yaitu suatu kondisi dimana penurunan pendapatan seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan akan meningkatkan ukuran kemiskinan. Aksioma transfer yaitu suatu kondisi dimana transfer pendapatan dari seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan ke seseorang yang lebih kaya akan meningkatkan ukuran kemiskinan.

Untuk kondisi Indonesia Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam pengukuran kemiskinannya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan. Selanjutnya hasil dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Non-Makanan disebut sebagai Garis Kemiskinan (BPS, 2008).

Nilai Garis Kemiskinan di Indonesia dari waktu ke waktu senantiasa selalu berubah, sesuai dengan tingkat perkembangan harga yang berlaku. Perkembangan nilai garis kemiskinan selama kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 ditunjukkan secara grafis pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Garis Kemiskinan Makanan dan Non-Makanan Indonesia Tahun 2005-2011.

	Tahun, (Rp/kapita/bulan)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Garis Kemiskinan Makanan	91 072	114 619	123 993	135 270	147 339	155 615	171 834
Garis Kemiskinan Non-Makanan	38 036	38 228	42 704	47 366	52 923	56 111	61 906
Garis Kemiskinan (GK)	129 108	152 847	166 697	182 636	200 262	211 726	233 740

Sumber: BPS, diolah dari Susenas

Indikator kemiskinan yang dihitung oleh BPS selain jumlah dan persentase penduduk miskin, juga digunakan ukuran indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) dan indeks keparahan kemiskinan (*Distributionally Sensitive Index-P₂*) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbecke* (Foster, *et. al.*, 1984) sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha} \quad (2.1)$$

dimana:

$\alpha = 0, 1, 2$

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

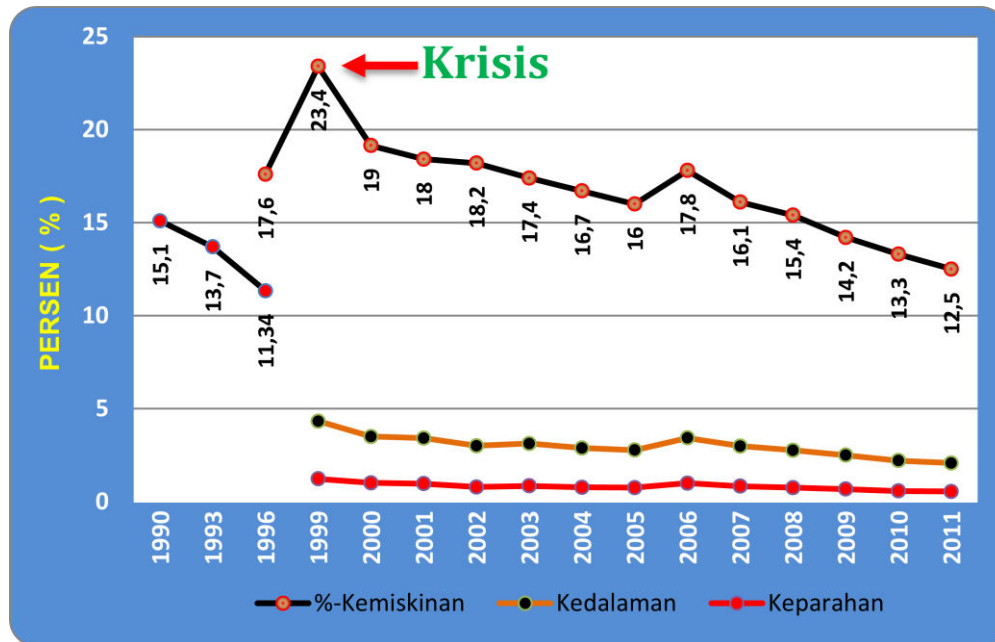
Jika $\alpha = 0$ maka diperoleh *Head Count Index* (P_0); $\alpha = 1$ adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1); dan $\alpha = 2$ merupakan ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan (*Distributionally Sensitive Index*- P_2). *Poverty Gap Index* (P_1) merupakan ukuran rata-rata ketimpangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. *Distributionally Sensitive Index* (P_2) sampai batas tertentu dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

Perkembangan ukuran kemiskinan yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2011 ditunjukkan dalam Tabel 2.2. dan Gambar 2.2.

Tabel 2.2. Perkembangan Ukuran Kemiskinan Indonesia Tahun 1999-2011.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Indeks Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)
1999	47.97	23.43	4.33	1.23
2000	38.70	19.14	3.51	1.02
2001	37.90	18.41	3.42	0.97
2002	38.40	18.20	3.01	0.79
2003	37.30	17.42	3.13	0.85
2004	36.10	16.66	2.89	0.78
2005	35.10	15.97	2.78	0.76
2006	39.30	17.75	3.43	1.00
2007	37.17	16.58	2.99	0.84
2008	34.96	15.42	2.77	0.76
2009	32.53	14.20	2.50	0.68
2010	31.02	13.30	2.21	0.58
2011	30.02	12.50	2.08	0.55

Sumber: BPS, diolah dari Susenas



Sumber: BPS, diolah dari Susenas

Gambar 2.1. Perkembangan Ukuran Kemiskinan Indonesia Tahun 1999-2011.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1999-2011 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005 (Tabel 2.2 dan Gambar 2.1).

Pada periode 1990-1996 persentase penduduk miskin menurun dari 15.1 persen menjadi 11.34 persen, sementara pada periode tahun 1996-1999 prosen penduduk miskin mengalami peningkatan dari 17.6 persen (berdasarkan revisi perhitungan baru) menjadi 23.4 persen. Selanjutnya pada periode 1999-2005 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 12.87 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 35.10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23.43 persen pada tahun 1999 menjadi 15.97 persen pada tahun 2005. Akan tetapi pada periode 2005-2006 terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin sebesar 4.20 juta, yaitu dari 35.10 juta pada tahun 2005 menjadi 39.30 juta pada tahun 2006. Akibatnya persentase penduduk miskin juga meningkat dari 15.97 persen menjadi 17.75 persen. Mulai tahun 2006 sampai dengan 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan sebesar 9.28 juta, yaitu dari 39.30 juta pada tahun 2006 menjadi 30.02 juta pada tahun 2011. Secara relatif juga terjadi penurunan

persentase penduduk miskin dari 17.75 persen menjadi 12.5 persen pada periode yang sama.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Secara umum indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia dalam periode 1999-2011 berfluktuasi meskipun ada kecenderungan menurun dari waktu ke waktu. Keadaan ini merupakan indikasi bahwa dalam periode tersebut, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan (Tabel 2.2).

Indeks kedalaman kemiskinan cenderung menurun dari 4.33 persen pada tahun 1999 menjadi 2.78 persen pada tahun 2005, akan tetapi dari tahun 2005 ke 2006 indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 3.43. Meskipun pada periode selanjutnya kembali terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 3.43 pada tahun 2006 menjadi 2.08 pada tahun 2011. Begitu pula indeks keparahan kemiskinan di Indonesia sepanjang periode 1999-2011 berfluktuasi meskipun ada kecenderungan menurun dari waktu ke waktu. Keadaan ini merupakan indikasi bahwa dalam periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin berkurang (Tabel 2.2).

2.3. Struktur perekonomian, Tenaga kerja dan Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi di mana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut. Individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik di antara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan.

Struktur perekonomian Indonesia, yang terdiri dari sembilan sektor usaha, senantiasa berubah. Dinamika perubahan struktur tersebut merupakan hal yang wajar dalam suatu perekonomian. Perubahan struktur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan insentif (yakni *rate of return on investment*), yang senantiasa berubah seiring dengan perkembangan *demand* dan *supply* di masing-masing sektor usaha; perkembangan teknologi, dan ketersediaan sumber daya atau faktor produksi bagi perkembangan suatu sektor usaha.

Perubahan struktur ekonomi yang mengakibatkan perubahan distribusi pendapatan sektoral tersebut akan mengakibatkan terjadinya pergeseran daya beli dari pemilik faktor produksi yang sektor usahanya mengecil perannya ke pemilik faktor produksi yang tengah berkembang. Hal ini dapat memicu timbulnya kemiskinan jika pergeseran tersebut terjadi dari sektor usaha yang sebelumnya dikategorikan berpendapatan rendah (seperti sektor pertanian) ke sektor usaha yang berpendapatan tinggi. Sebagaimana diketahui sektor pertanian merupakan sektor usaha dengan tingkat pendapatan terendah.

Distribusi pendapatan merupakan porsi pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga dalam suatu wilayah. Pendapatan yang diterima setiap individu atau rumah tangga tersebut tergantung pada tingkat produktivitas dan peranannya dalam perekonomian. Ukuran yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan adalah distribusi ukuran pendapatan, kurva Lorenz, dan *Gini ratio*. Ketimpangan pendapatan terjadi apabila sebagian besar penduduk memperoleh pendapatan yang rendah dan pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Semakin besar perbedaan pendapatan yang diterima masing-masing kelompok menunjukkan semakin besarnya ketimpangan.

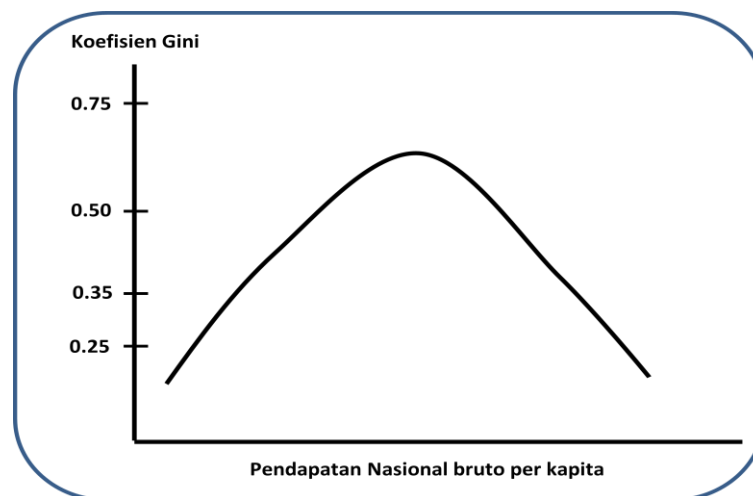
Adanya ketimpangan yang tinggi antara kelompok kaya dan miskin menurut Todaro dan Smith (2006) akan menimbulkan setidaknya dua dampak negatif yaitu:

1. Terjadinya inefisiensi ekonomi. Hal ini sebagian dikarenakan adanya ketimpangan yang tinggi menyebabkan semakin banyak penduduk yang kesulitan mengakses kredit terutama penduduk miskin, sedangkan

penduduk kaya cenderung lebih konsumtif untuk barang mewah atau investasi ke luar negeri.

2. Melemahkan stabilitas dan solidaritas sosial.

Kuznets (1955) membuat hipotesis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan membentuk kurva U-terbalik (*inverted-U curve*). Hipotesa Kuznets bersandar pada asumsi bahwa terdapat dua sektor ekonomi dalam suatu negara, yaitu sektor pertanian tradisional di perdesaan dengan pendapatan perkapita dan ketidakmerataan pendapatan yang rendah dan sektor modern (sektor industri dan jasa) di perkotaan dengan pendapatan perkapita dan ketidakmerataan pendapatan yang tinggi.



Sumber: Todaro dan Smith (2006)

Gambar 2.2. Kurva U Terbalik Kuznets (*Inverted U Curve Hypothesis*)

Kuznets menekankan adanya perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi, dimana dalam prosesnya sektor industri dan jasa cenderung berkembang dan terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern. Selama masa transisi tersebut, produktifitas dan upah tenaga kerja di sektor modern lebih tinggi daripada sektor tradisional, sehingga pendapatan perkapita yang diterima juga lebih tinggi, akibatnya ketidakmerataan pendapatan antara kedua sektor tersebut meningkat. Sehingga pada awal pembangunan, pendapatan perkapita dan kesenjangan pendapatan yang masih rendah, selanjutnya

kesenjangan pendapatan meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Setelah melampaui titik kulminasi akan terjadi perbaikan pada distribusi pendapatan.

Robert Solow mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai Model Pertumbuhan Solow. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut (Dornbusch *et al.*, 2004):

$$Y = A.F(K,L)$$

di mana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja, dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input (K atau L, atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas.

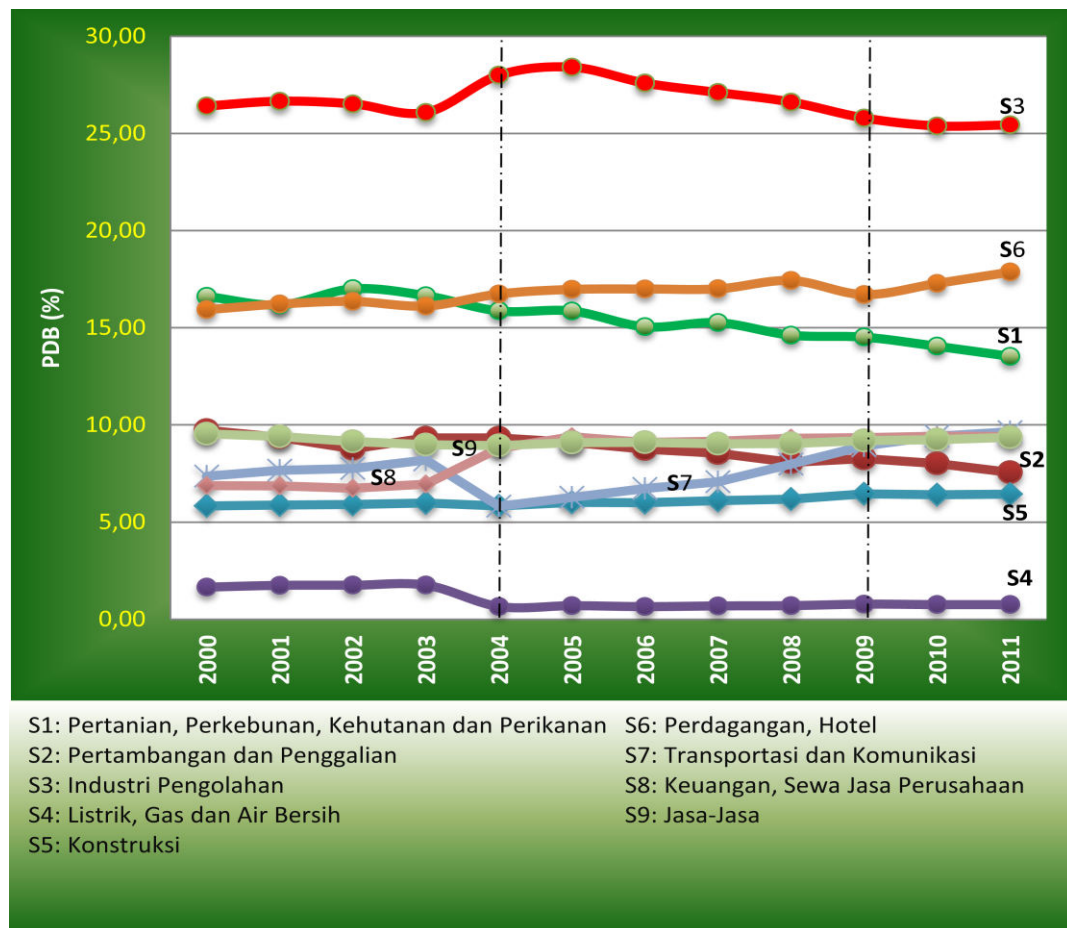
Model Solow dapat diperluas sehingga mencakup sumberdaya alam sebagai salah satu inputnya. Dasar pemikirannya yaitu output nasional tidak hanya dipengaruhi oleh K dan L tetapi juga dipengaruhi oleh lahan pertanian atau sumberdaya alam lainnya seperti cadangan minyak. Perluasan model Solow lainnya adalah dengan memasukkan sumberdaya manusia sebagai modal (*human capital*). Dalam literatur, teori pertumbuhan seperti ini terkategori sebagai teori pertumbuhan endogen dengan pionirnya Lucas dan Romer. Lucas menyatakan bahwa akumulasi modal manusia, sebagaimana akumulasi modal fisik, menentukan pertumbuhan ekonomi; sedangkan Romer berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pertumbuhan teknologi.

Mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah dikemukakan dengan menggunakan teori pertumbuhan endogen pada bagian terdahulu. Manakala garis kemiskinan menjadi pertimbangan, maka inflasi menjadi variabel yang relevan. Sebagai ilustrasi: suatu rumah tangga yang memiliki pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan, ketika pertumbuhan pendapatannya sangat lambat—lebih rendah dari laju inflasi, maka barang dan

jasa yang dapat dibelinya menjadi lebih sedikit. Laju inflasi tersebut juga akan menggeser garis kemiskinan ke atas. Kombinasi dari pertumbuhan pendapatan yang lambat dan laju inflasi yang relatif tinggi akan menyebabkan rumah tangga tersebut jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya variabel untuk mengurangi kemiskinan; variabel lain, seperti laju inflasi, juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor moderen seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor industri pengolahan pada kisaran 27 sampai 28 persen, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (14 sampai 16 persen) dan ketiga sektor pertanian (13 sampai 15 persen) selama satu dasawarsa terakhir (Gambar 2.3.).



Sumber: BPS, diolah dari Susenas

Gambar 2.3. Struktur PDB Sektoral Indonesia Tahun 2000-2011.

Namun bila diamati, pergeseran struktur perekonomian dari pertanian ke industri justru tidak tercermin dari pertumbuhan ekonomi di kedua sektor ini. Sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor listrik gas dan air lebih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi ketimbang kedua sektor utama tersebut. Ditengarai bahwa sektor pertanian dan industri pengolahan masih merupakan sektor padat karya, sehingga pertumbuhannya tidak didorong oleh produktivitas dan efesiensi, dibanding sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor listrik gas dan air yang padat teknologi.

Dari sisi ketenagakerjaan, sinyal-sinyal kemajuan pembangunan bisa ditangkap melalui perubahan struktur lapangan, status maupun jenis pekerjaan. Menurut teori konvensional, kemajuan pembangunan salah satunya ditandai oleh perubahan struktur lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang semula

didominasi oleh sektor Pertanian akan beralih ke sektor Pengolahan dan kemudian akan beralih ke sektor Jasa. Namun ada pula yang berpendapat bahwa untuk negara berkembang, peralihannya adalah dari sektor pertanian ke jasa baru kemudian ke pengolahan. Hal ini dikarenakan menonjolnya sektor jasa untuk negara berkembang berbeda dengan negara maju. Untuk negara berkembang, meningkatnya sektor jasa merupakan penampungan dari mereka yang tidak terserap di sektor pengolahan. Indikasi ini lebih mengarah bahwa menonjolnya sektor jasa di negara berkembang bukan ciri kemajuan, tetapi ‘ciri kemiskinan’ (Ananta dan Fontana, 1995).

Dari Februari 2006 hingga Februari 2008, indikasi yang terjadi adalah employment di sektor pertanian semakin menurun dan employment di sektor jasa meningkat. Sementara sektor pengolahan lebih cenderung ke arah stagnasi peran dalam penyerapan tenaga kerja. Ini senada dengan yang dikemukakan Ananta dan Fontana (1995) bahwa sebagai kelompok negara berkembang, transformasi ketenagakerjaan di Indonesia mengikuti pola transformasi dari pertanian ke jasa bukan dari pertanian ke pengolahan. Meski demikian apakah ini merupakan ciri kemiskinan, membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menjawabnya. Karena kemiskinan menyangkut kemampuan penduduk dalam kebutuhan konsumsi bukan semata masalah employment.

Gambaran sektor formal-informal juga dapat menjadi sinyal perekonomian negara. Semakin maju perekonomian, semakin besar peranan sektor formal.

Berkaitan dengan sektor formal dan informal Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menggunakan pengertian atau definisi berdasarkan kategori dari status pekerjaan pekerja. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan ekonomi. Sejak tahun 2001 BPS membagi status pekerjaan menjadi 7 kategori, yaitu:

- a. Berusaha sendiri
- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar
- c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
- d. Buruh/Karyawan/Pegawai
- e. Pekerja bebas di pertanian
- f. Pekerja bebas di non pertanian, dan g. Pekerja tak dibayar

Dari ke tujuh kategori status pekerjaan tersebut, hanya 2 kategori yang dapat disebut sebagai bekerja pada sektor formal, yaitu mereka yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dan mereka yang berstatus sebagai majikan (kategori c: Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar). Selainnya dikelompokkan dalam sektor informal.

Perkembangan persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan selama delapan tahun terakhir yaitu tahun 2004-2011 ditampilkan pada Tabel 2.3. Dimana sampai dengan tahun 2011, sektor informal masih mendominasi employment di Indonesia dengan kontribusi sekitar 65.76%. Sebagian orang menyebut sektor informal sebagai sektor penyelamat. Elastisitas sektor informal dalam menyerap tenaga kerja menjadikan sektor ini selalu bergairah meskipun nilai tambah yang diciptakannya mungkin tidak sebesar nilai tambah sektor formal. Akan tetapi disinyalir pula bahwa penduduk miskin mayoritas berasal dari sektor informal tersebut.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Periode 2004-2011.

STATUS PEKERJAAN UTAMA	TAHUN							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Berusaha dibantu buruh tetap	3.16	3.03	2.99	2.89	2.94	2.89	3.01	3.23
Buruh / Karyawan	27.16	27.70	28.10	28.06	27.48	27.76	30.05	31.01
FORMAL	30.33	30.73	31.08	30.95	30.42	30.65	33.07	34.24
Berusaha Sendiri	19.54	18.41	20.43	20.34	20.40	20.07	19.44	19.01
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	22.95	22.34	20.90	21.04	21.23	20.91	20.04	19.15
Pekerja Bebas di Pertanian	4.75	5.89	5.80	5.92	5.84	5.61	5.37	5.01
Pekerja Bebas di Non Pertanian	3.98	4.60	4.84	4.46	5.16	5.41	4.74	4.64
Pekerja Tak Dibayar	18.45	18.03	16.94	17.29	16.94	17.35	17.34	17.95
INFORMAL	69.67	69.27	68.92	69.05	69.58	69.35	66.93	65.76

Sumber: BPS, diolah dari Sakernas

Pertumbuhan tenaga kerja dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Sejak tahun 1990 hingga 2005 pertumbuhan tenaga kerja berada pada kisaran 1 hingga

2 persen. Informasi ketenagakerjaan secara menyeluruh sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sektor pertanian (termasuk didalamnya subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan serta kehutanan). Pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pergerakan pertumbuhan. Gejolak ekonomi global dan nasional secara nyata men”drive” pertumbuhan tenaga kerja. Pada tahun-tahun dimana stabilitas ekonomi cenderung stabil, maka arus tenaga kerja bergerak ke sektor non pertanian. Sementara pada tahun-tahun gejolak ekonomi, arus tenaga kerja “kembali” ke sektor pertanian.

2.4. Tinjauan Empiris

Beberapa studi empiris yang menjelaskan hubungan antara kemiskinan baik itu dengan pertumbuhan ekonomi ataupun komposisi pertumbuhan ekonomi sektoral serta dekomposisi dari segi ukuran kemiskinannya yang dikaitkan dengan perubahan struktur ekonomi telah banyak dilakukan oleh para ahli di berbagai negara maupun di Indonesia. Studi empiris yang pernah dilakukan oleh para ahli maupun penelitian khusus di berbagai negara diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

Tingkat kemiskinan suatu negara erat kaitannya dengan dinamika perekonomiannya, baik akibat perubahan struktur perekonomiannya maupun perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral dan regional.

Ravallion dan Datt (1999) melakukan studi tentang pengaruh komposisi pertumbuhan ekonomi sektoral dan kondisi awal suatu daerah terhadap pengurangan tingkat kemiskinannya. Demikian pula dengan Bigsten dan Levin (2000), yang menyebutkan pentingnya memperhatikan dinamika intersektoral dalam menyusun strategi untuk mengurangi kemiskinan.

Hal tersebut juga diamati oleh Hoeven (2004), yang melihat adanya keterkaitan antara perubahan struktur ekonomi di suatu negara dan ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan yang diakibatkannya. Sementara itu Huppi dan Ravallion (1990), yang meneliti tentang struktur kemiskinan sektoral pada periode *adjustment* di Indonesia pada pertengahan tahun 1980-an, mendapatkan bahwa meskipun secara keseluruhan tingkat kemiskinan mengalami

penurunan, namun pengaruhnya tidak merata pada lintas regional dan sektoral, di mana pengurangan kemiskinan yang signifikan terutama terjadi pada sektor *rural farming*.

Datt dan Ravallion (2002) dalam penelitiannya menekankan adanya perbedaan tingkat kemiskinan di antara beberapa daerah di India. Daerah-daerah yang pembangunan daerah pertanian dan *human capital*-nya rendah relatif tidak responsif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan. Sementara itu Friedman (2002), yang melakukan studi tentang respon *poverty* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mendapatkan adanya respon yang tinggi. Namun perbedaan antar daerah dalam tingkat kemiskinan tetap ada meskipun telah dilakukan langkah-langkah untuk mengontrol tingkat pendapatan pada tingkat provinsi. Terlihat bahwa faktor-faktor lokal memainkan peranan penting terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Sementara itu hasil studi de Janvry dan Sadoulet (1999) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan secara efektif hanya jika tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan awal tidak terlalu tinggi dan tingkat pendidikan masyarakatnya cukup tinggi. Ditemukan pula adanya asimetri atas dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, yakni dampak penurunan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan akan lebih besar daripada dampak kenaikannya.

Osmani (2004), menyebutkan bahwa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan harus mengedepankan baik tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi maupun tingginya elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Studinya menekankan peran pengangguran dalam menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, mengingat masyarakat miskin banyak bersandar pada tenaga kerjanya. Di samping itu *return to labor* juga sangat ditentukan oleh *physical assets*, *human capital*, dan *social capital*, yang jika faktor-faktor tersebut rendah maka seorang pekerja dapat terjebak dalam kemiskinan. Di samping itu peran *factor productivity* juga penting untuk menggerakkan pertumbuhan dalam upaya pengentasan kemiskinan, sebagaimana dikemukakan oleh Treichel (2005).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Definisi Variabel

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif dan analisis kuantitatif statistik dengan menggunakan rumus yang telah diperkenalkan oleh Ravallion dan Huppi (1991) yaitu *Sectoral Decompositions of Changes in Poverty*.

3.1.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Data utama konsumsi rumahtangga melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang digunakan adalah sebanyak 4 (empat) tahun kegiatan survey yaitu Susenas Modul tahun 1999, Susenas Kor tahun 2004, Susenas Kor tahun 2009, dan Susenas Modul tahun 2011. Adapun periode waktu yang digunakan dalam penelitian yaitu periode pelaksanaan kebijakan pembangunan Propenas tahun 1999-2004, RPJM-I tahun 2005-2009, dan RPJMN-II tahun 2010-2014, yang dikenal dengan program pembangunan yang *pro growth*, *pro job* dan *pro poor*.

Pendekatan untuk menghitung pendapatan rumahtangga ini menggunakan nilai besarnya pengeluaran, karena dianggap lebih mencerminkan keadaan sebenarnya, meskipun ada juga kelemahan-kelemahan dari pendekatan ini. Menurut Nunez and Espinosa (2005) pendekatan pengeluaran akan lebih baik dijadikan ukuran standar hidup yang layak dikarenakan dalam survei rumah tangga responden cenderung lebih rendah melaporkan pendapatan sedangkan untuk pengeluarannya lebih *valid*. Rumah tangga pun cenderung menyesuaikan pengeluaran mereka melalui transfer atau sumbangan ketika pendapatannya turun.

3.1.2. Definisi Variabel

Sebagai petunjuk informasi definisi dan besaran ukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka pada penelitian ini digunakan dua buah

variabel yaitu variabel operasional dan variabel konsep, adapun definisinya dijelaskan sebagai berikut:

- *Variabel operasional*

Beberapa ukuran dan definisi yang relevan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya ukuran kemiskinan, indikator ketenagakerjaan, dan besaran ukuran perubahan kemiskinan. Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut, maka dapat didefinisikan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian, dengan definisi operasional sebagai berikut (BPS, 2008).

- ✓ Sektor, definisi sektor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sektor kegiatan ekonomi dari segi lapangan kerja utama yang terdiri atas sembilan sektor lapangan kerja yaitu (1) Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, (2) Pertambangan dan penggalan, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas dan air bersih, (5) Konstruksi, (6) Perdagangan, hotel dan restoran, (7) Transportasi dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) Jasa-jasa.
- ✓ Formal dan Informal, yaitu kegiatan bekerja dari penduduk yang diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori “berusaha dibantu buruh tetap” dan kategori “buruh/karyawan”, sisanya termasuk pekerja informal yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas, pekerja bebas di non-pertanian, dan pekerja keluarga.
- ✓ *Head Count Index-P0* (Indeks Kemiskinan), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- ✓ *Poverty Gap Index-P1* (Indeks Kedalaman Kemiskinan) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- ✓ *Poverty Severity Index-P2* (Indeks Keparahan Kemiskinan) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

3.2. Analisis Deskripsi dan Dekomposisi Kemiskinan Sektor

3.2.1. Analisis Deskripsi Kemiskinan Sektor

Dengan menggunakan bantuan *software* aplikasi pengolah data Stata, terlebih dahulu keempat data Susenas (Susenas 1999, Susenas 2004, Susenas 2009, dan Susenas 2011) dikompilasi dan dilakukan pengolahan menurut sektoral berdasarkan pengelompokan kelas status pekerjaan utama formal dan informal, data output hasil olahan yang ditampilkan adalah data jumlah rumahtangga, besaran rata-rata konsumsi perkapita (rupiah/bulan), dan *share* populasi per sektor yang disusun menjadi sebuah tabel sebagai gambaran untuk Deskripsi Kemiskinan Sektor.

Besaran *Share* populasi untuk setiap kelas status pekerjaan utama (formal/informal) dalam sektornya dihitung dengan banyaknya rumahtangga setiap kelas status pekerjaan utama dibagi dengan total rumahtangga seluruh sektor yang kemudian dikalikan dengan 100%, secara matematis rumusnya adalah sebagai berikut:

$$SP_{ij} = \frac{HH_{ij}}{\sum HH_{ij}} \times 100\% \quad (3.1)$$

dimana:

SP_{ij} adalah *share* populasi sektor ke- i untuk kelas status pekerjaan ke- j ,

HH_{ij} adalah bayaknya rumahtangga sektor ke- i untuk kelas status pekerjaan ke- j , dan $\sum HH_{ij}$ adalah total rumahtangga di seluruh sektor, untuk $i=1\dots 9$ dan $j=1,2$.

3.2.2. Analisis Dekomposisi Kemiskinan Sektor

Ukuran kemiskinan merupakan suatu pertimbangan yang nyata untuk melihat pelaksanaan pembangunan. Indeks kemiskinan menangkap prevalensi kemiskinan dengan mengukur proporsi penduduk yang konsumsinya (atau ukuran standar hidup yang lebih layak) berada di bawah garis kemiskinan. Peningkatan di dalam indikator ini mengakibatkan bertambah buruknya situasi kemiskinan dengan semakin membesarnya proporsi penduduk yang jatuh di bawah garis kemiskinan.

Secara khusus, indeks kemiskinan (*Head Count Index*) berasosiasi erat dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) yang menangkap secara sukses aspek yang lebih mendetil mengenai situasi kemiskinan. Indeks kemiskinan (P_0) mengukur seberapa jauh/luas kemiskinan yang terjadi dibandingkan dengan garis kemiskinannya, Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) mengukur seberapa miskin si miskin tersebut, dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) mengukur parahnya kemiskinan dengan memberi bobot lebih pada yang termiskin dari yang miskin.

Ukuran kemiskinan tersebut dihitung dengan menggunakan rumus pada persamaan (2.1).

Dimana dengan memilih nilai α tertentu, ukuran seterusnya memenuhi aksioma dimana sesuai dengan yang diinginkan disaat kemiskinan agregat didekomposisi menurut sektor. Penelitian ini akan memanfaatkan properti ini di seluruh analisis.

Untuk $\alpha=0$, maka ukuran kemiskinan menunjukan sebagai indeks kemiskinan (*Headcount index* - P_0); untuk $\alpha=1$, ukuran kemiskinan sebagai indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap* - P_1); dan untuk $\alpha=2$, ukuran kemiskinan sebagai indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index* - P_2).

Selanjutnya untuk mengukur perubahan ketiga ukuran kemiskinan tersebut dari setiap masa kebijakan yang akan diukur perubahannya yaitu “periode akhir sebelum Propenas dengan periode akhir Propenas”, “periode akhir Propenas dengan periode akhir RPJMN-I”, dan “periode akhir RPJMN-I dengan periode akhir RPJMN-II”. Maka jumlah kombinasi kemungkinan perubahan ukuran kemiskinan akan berjumlah 3 kemungkinan perubahan ukuran kemiskinan untuk setiap ukuran kemiskinan. Sehingga total keseluruhan perubahan ukuran kemiskinan berjumlah $3 \times 3 = 9$ kemungkinan, yaitu 3 perubahan *Head-count Index*, 3 perubahan *Poverty Gap Index*, dan 3 perubahan *Poverty Severity Index*, secara jelas ditampilkan sebagai berikut:

Perubahan *Head-count Index* (ΔP_0) :

$\Delta P_{0(99-04)}$: Perubahan *Head-count Index* antara periode akhir kebijakan sebelum Propenas dengan periode akhir kebijakan Propenas

$\Delta P_{0(04-09)}$: Perubahan *Head-count Index* antara periode akhir kebijakan Propenas dengan periode akhir kebijakan RPJMN-I

$\Delta P_{0(09-11)}$: Perubahan *Head-count Index* antara periode akhir kebijakan RPJMN-I dengan periode akhir kebijakan RPJMN-II

Perubahan *Poverty Gap Index* (ΔP_1):

$\Delta P_{1(99-04)}$: Perubahan *Poverty Gap Index* antara periode akhir kebijakan sebelum Propenas dengan periode akhir kebijakan Propenas

$\Delta P_{1(04-09)}$: Perubahan *Poverty Gap Index* antara periode akhir kebijakan Propenas dengan periode akhir kebijakan RPJMN-I

$\Delta P_{1(09-11)}$: Perubahan *Poverty Gap Index* antara periode akhir kebijakan RPJMN-I dengan periode akhir kebijakan RPJMN-II

Perubahan *Head-count Index* (ΔP_2) :

$\Delta P_{2(99-04)}$: Perubahan *Poverty Severity Index* antara periode akhir kebijakan sebelum Propenas dengan periode akhir kebijakan Propenas

$\Delta P_{2(04-09)}$: Perubahan *Poverty Severity Index* antara periode akhir kebijakan Propenas dengan periode akhir kebijakan RPJMN-I

$\Delta P_{2(09-11)}$: Perubahan *Poverty Severity Index* antara periode akhir kebijakan RPJMN-I dengan periode akhir kebijakan RPJMN-II

Perubahan ukuran kemiskinan tersebut dianalisis dan dihitung dengan menggunakan Analisis Dekomposisi Sektoral yang diperkenalkan oleh Ravallion dan Huppi (1991) yang ditujukan untuk mengukur kontribusi relatif dari perubahan kemiskinan dalam sektor dan antar-sektoral terhadap perubahan pergeseran penduduk dalam kemiskinan agregat. Sektor yang didekomposisi dalam penelitian ini adalah sektor lapangan pekerjaan utama yang terdiri atas 9 (Sembilan) sektor lapangan pekerjaan utama dengan fokus pembahasan pada kelas status pekerjaan untuk tiap sektornya, ditambah satu sektor lainnya.

Dengan metode analisis ini, perubahan ukuran kemiskinan didekomposisi atau diurai menjadi tiga komponen: (i) intra-sektoral, (ii) antar-sektoral, dan (iii) interaksi, secara matematis rumusnya adalah sebagai berikut: (proses penurunan rumus dekomposisi terlampir)

$$P_{t_n} - P_{t_0} = \underbrace{\sum_k (S_{t_0k})(P_{t_nk} - P_{t_0k})}_{\text{Perubahan Ukuran Kemiskinan}} + \underbrace{\sum_k (S_{t_nk} - S_{t_0k})(P_{t_0k})}_{\text{Komponen Intra-sektoral}} + \underbrace{\sum_k (S_{t_nk} - S_{t_0k})(P_{t_0k})}_{\text{Komponen Antar-sektoral}} + \underbrace{\sum_k (S_{t_nk} - S_{t_0k})(P_{t_nk} - P_{t_0k})}_{\text{Komponen Interaksi}} \quad (3.2)$$

dimana:

- t_0 adalah tahun awal periode yang digunakan dalam perhitungan (sebagai penunjukan waktu awal dimana capaian prestasi sebelumnya sudah tersedia untuk dibandingkan),
- t_n adalah tahun akhir periode yang digunakan dalam perhitungan (sebagai penunjukan waktu akhir dimana capaian prestasi yang sedang dievaluasi digunakan sebagai pembanding),
- k adalah sektor kegiatan ekonomi dengan fokus perhatian terhadap indikator ketenagakerjaannya (yaitu formal dan informal) untuk kesembilan sektor yang ada secara kegiatan ekonomi di Indonesia,
- P adalah ukuran kemiskinan (dimana dalam hal ini adalah merupakan indikator ukuran kemiskinan *Headcount index*, *Poverty gap index*, dan *Poverty severity index*, dan
- S merupakan *share* populasi.

Pengertian dan interpretasi dari masing-masing komponen tersebut diatas adalah:

- Komponen Intra-sektoral merupakan perubahan ukuran kemiskinan yang diakibatkan oleh perubahan tingkat kemiskinan, dengan asumsi pada tingkat awal share populasi konstan. Dengan kata lain, ini adalah perubahan dalam kemiskinan yang akan terjadi jika share populasi di masing-masing sektor tidak berubah.
- Komponen Antar-sektoral (pergeseran populasi) merupakan perubahan kemiskinan yang diakibatkan oleh perubahan share populasi di masing-masing sektor, dengan asumsi garis kemiskinan dalam sektor konstan. Komponen ini merupakan perubahan kemiskinan yang dihasilkan dari akibat pergeseran individu dari salah satu sektor yang kurang mampu memberikan

harapan dari segi pendapatan (miskin) ke sektor yang mampu memberikan harapan peningkatan pendapatan (kaya) atau sebaliknya.

- Komponen Interaksi merupakan perubahan kemiskinan yang disebabkan oleh kedua perubahan dalam *share* populasi dan tingkat kemiskinan di sektor. Komponen ini dapat "diartikan sebagai ukuran korelasi antara komponen antar-sektoral dan komponen intra-sektoral" (Ravallion dan Huppi, 1991).

Jika rumah tangga memperoleh pendapatan yang berasal dari lebih dari satu sektor kerja (misalnya pertanian, industri, jasa), maka penentuan rumah tangga ke sektor tunggal seringkali membutuhkan suatu analisis untuk membuat beberapa keputusan yang tepat tentang bagaimana hal ini harus dilakukan. Dalam kebanyakan kasus, sektor yang dapat menghasilkan pendapatan yang paling besar bagi rumah tangganya sering ditetapkan sebagai rumah tangga. [Analisis Sensitivitas mungkin berguna jika ada kekhawatiran tentang klasifikasi.]

3.2.3. Pengujian Signifikansi Perbedaan Ukuran Kemiskinan Diantara Dua Periode

Karena ukuran kemiskinan diestimasi berdasarkan pengamatan sampel, kita perlu menguji apakah perbedaan yang diamati untuk setiap nilainya secara statistik signifikan atau tidak (Kakwani, 1990).

Jika x menyatakan pendapatan per setara orang dewasa (atau pengeluaran) dari rumah tangga. Karena rumah tangga yang dipilih secara acak, kita bisa mengasumsikan bahwa x adalah variabel acak dengan fungsi kepadatan peluang $f(x)$, dan z melambangkan garis kemiskinan pendapatan. Maka sebuah kelas ukuran kemiskinan keaditifan terpisah (*additively separable of poverty*) diformulasikan sebagai

$$P = \int_0^z \theta(z, x) f(x) dx \quad (3.3)$$

di mana $\theta(z, x)$ dapat diartikan sebagai perampasan (*deprivasi*) yang diderita oleh rumah tangga dengan penghasilan x . Nilai-nilai ini adalah nol jika $x \geq z$ dan positif sebaliknya. Tentunya, untuk z tetap, fungsi $\theta(z, x)$ harus monoton menurun dari x .

Data survey rumahtangga dibagi ke dalam m kelompok yang sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi dan demografis rumahtangga tertentu. dan $f_i(x)$ adalah fungsi kepekatan dari kelompok ke- i . Selanjutnya, anggaplah bahwa karena kebijakan pemerintah tertentu, fungsi kepekatan dari perubahan kelompok ke- i dari $f_i(x)$ untuk $f_i^*(x)$ dan distribusi kelompok yang tersisa $(m-1)$ tidak berubah sama sekali. Sebagai konsekuensinya, ukuran kemiskinan dari kelompok ke- i telah berubah dari P_i ke P_t sehingga $P_t > P_i$. Secara intuisi maka kemiskinan di seluruh penduduk harus meningkat.

Karena data pengeluaran dan pendapatan yang tersedia hanya untuk rumah tangga, umumnya tidak mungkin untuk mengukur kemiskinan bagi individu. Namun, kita dapat mencapai tujuan ini jika kita membuat asumsi yang kuat bahwa setiap anggota dalam rumah tangga menikmati tingkat kesejahteraan yang sama persis. Validitas dari pendekatan ini dibahas dalam Kakwani (1986). Misalkan $n(x)$ adalah jumlah individu dalam sebuah rumahtangga dengan pendapatan x , maka rata-rata jumlah individu dalam masyarakat akan diberikan oleh

$$E(n(x)) = \int_0^{\infty} n(x) f(x) dx \quad (3.4)$$

Dengan asumsi bahwa setiap individu dalam rumahtangga menikmati nilai kesejahteraan sama dengan pendapatan atau konsumsi per setara orang dewasa untuk rumahtangga (atau setiap individu dalam rumahtangga yang menderita tingkat deprivasi adalah sama), maka salah satu fungsi kepekatan peluang distribusi pendapatan individu didapatkan sebagai

$$g(x) = \frac{n(x)f(x)}{E(n(x))} \quad (3.5)$$

sehingga $\int_0^{\infty} g(x) dx = 1$. Jadi, kita mendefinisikan kelas ukuran kemiskinan berdasarkan distribusi pendapatan individu sebagai

$$P^* = \int_0^z \theta(z, x) g(x) dx \quad (3.6)$$

yang diinterpretasikan sebagai rata-rata *deprivasi* yang diderita oleh individu dalam masyarakat.

Sampel acak m rumah tangga yang memiliki pendapatan atau pengeluaran per setara orang dewasa $X_1, X_2, \dots, X_m$. dan, $n_1, n_2, \dots, n_m$ adalah menyatakan individu yang tinggal di rumah tangga m . Dengan informasi ini, sebuah estimator yang konsisten dari kelas ukuran kemiskinan di (3.7) dapat diformulasikan sebagai

$$\hat{P}^* = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^q \theta(z, x_i) (n_i | \bar{n}) \quad (3.7)$$

dimana:

$$\bar{n} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m n_i \quad : \text{ adalah jumlah rata-rata individu per rumah tangga, dan}$$

$q \quad : \text{ adalah jumlah rumah tangga yang tergolong miskin (rumah tangga yang berpenghasilan } x \text{ kurang dari } z).$

Jika $\hat{\sigma}^2(P^*)$ adalah estimator konsisten dari $\sigma^2(P^*)$, $\hat{\sigma}^2(P^*)/\sqrt{m}$ disebut sebagai *standard error* dari $\hat{P}^*$, yang dinotasikan oleh $SE(\hat{P}^*)$. Sehingga statistik uji

$$t = \frac{\hat{P}^* - P^*}{SE(\hat{P}^*)} \quad (3.8)$$

adalah berdistribusi normal asimtotik dengan *mean* nol dan *varians* 1. Jadi, t dapat digunakan untuk membentuk selang kepercayaan distribusi-bebas untuk ukuran kemiskinan.

Selanjutnya, misalkan $\hat{P}_1^*$ dan $\hat{P}_2^*$ adalah estimasi dari ukuran kemiskinan P^* yang dihitung berdasarkan dua sampel acak independen yang masing-masing diambil dari rumah tangga m_1 dan m_2 . lalu $\hat{\sigma}_1^2$ dan $\hat{\sigma}_2^2$ menjadi estimator sampel dari *varians* distribusi asimtotik $\sqrt{m_1}(\hat{P}_1^*)$ dan $\sqrt{m_2}(\hat{P}_2^*)$, maka *standard error* dari $(\hat{P}_1^* - \hat{P}_2^*)$ adalah

$$SE(\hat{P}_1^* - \hat{P}_2^*) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{m_1} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{m_2}}$$

sehingga statistik uji untuk signifikansi perbedaan ukuran kemiskinan diantara dua periode menjadi:

$$\eta = \frac{\hat{P}_1^* - \hat{P}_2^*}{SE(\hat{P}_1^* - \hat{P}_2^*)} \quad (3.9)$$

akan mengikuti distribusi normal asimtotik dengan *mean* nol dan *varians* satu. Dengan demikian, η (*Kakwani test*) dapat digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa perbedaan angka kemiskinan tersebut secara statistik signifikan.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif Kemiskinan Sektoral

Analisis ini dilakukan dengan maksud sebagai bahan perbandingan pada saat melakukan analisis mendalam pada dekomposisi kemiskinan sektoral, dimana hal ini sangat diperlukan untuk pendeskripsian saat melakukan analisis perubahan ukuran kemiskinan yang dihasilkan dari dekomposisi kemiskinan sektoral tersebut.

Dari hasil analisis awal terhadap data Susenas (tahun 1999, 2004, 2009, dan 2011) dengan menggunakan *software* aplikasi analisis statistika Stata, maka hasilnya telah dirangkum kedalam tiga buah tabel (Tabel 4.1, Tabel 4.2, dan Tabel 4.3) sesuai objek periode kebijakan yang diteliti. Adapun analisis dan deskripsi terhadap masing-masing tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Deskripsi sektoral menurut status pekerjaan utama untuk periode tahun 1999-2004, diperoleh informasi bahwa secara umum jumlah populasi dari tahun 1999 ke tahun 2004 terjadi peningkatan sebesar 5.72 persen yaitu dari 204,653,802 jiwa menjadi 216,351,748 jiwa, disisi lain total penduduk miskin dari tahun 1999 ke tahun 2004 mengalami penurunan dari 47,970,998 menjadi 36,059,862 jiwa. Perlu diketahui bahwa data hasil kompilasi ini jika dibandingkan dengan laporan yang dirilis BPS secara resmi diperoleh bahwa jumlah total penduduk miskin baik untuk tahun 1999 maupun tahun 2004 adalah sama persis, hal ini bisa dilihat dan dibandingkan dengan Tabel 2.2. pada Bab II. Hal ini mengindikasikan bahwa dari segi analisis pengelompokan data disini sudah dicapai suatu presisi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Jika dilihat pada sisi sektoralnya, diperoleh bahwa yang tidak bekerja pada tahun 1999 dan tahun 2004 mencapai lebih dari 50 persen yaitu sebesar 57.18 persen untuk tahun 1999 dan 56.68 persen untuk tahun 2004. Sedangkan dari tahun 1999 ke tahun 2004 terjadi penurunan jumlah yang tidak bekerja miskin dari 29,217,079 jiwa menjadi 23,922,585 jiwa. Penduduk yang tidak bekerja ini menjadi tanggungan penduduk yang bekerja.

Tabel 4.1. Deskripsi Sektoral Menurut Status Pekerjaan Utama¹⁾, Periode Tahun 1999-2004

Sektor		Populasi (jiwa)		Penduduk Miskin (jiwa)		Share Populasi (%)		Rataan Konsumsi (Rp./kapita/bulan)		<i>t</i> -test
		1999	2004	1999	2004	1999	2004	1999	2004	
1.Pertanian	Formal	7,270,582	5,112,167	2,199,699	868,466	3.55	2.36	287,483	372,036	-13.82 **
	Informal	31,851,140	35,495,852	8,913,662	6,795,548	15.56	16.41	298,431	329,468	-5.33 **
2.Pertambangan	Formal	364,847	497,660	48,511	41,481	0.18	0.23	539,717	657,859	-2.14 **
	Informal	351,749	537,056	103,780	87,571	0.17	0.25	311,216	416,225	-2.40 **
3.Industri	Formal	6,800,171	6,850,523	1,219,844	470,648	3.32	3.17	453,971	580,956	-5.75 **
	Informal	3,244,388	4,219,975	762,500	565,806	1.59	1.95	341,044	383,095	-4.17 **
4.Listrik	Formal	170,843	169,293	13,001	3,540	0.08	0.08	562,388	759,863	-8.44 **
	Informal	39,943	59,004	6,148	5,601	0.02	0.03	421,683	478,744	-2.02 *
5.Konstruksi	Formal	2,997,152	2,366,754	696,835	277,586	1.46	1.09	386,408	569,589	-3.01 **
	Informal	516,776	2,173,348	106,486	346,585	0.25	1.00	401,223	374,847	0.87
6.Perdagangan	Formal	3,029,976	5,619,513	362,950	344,027	1.48	2.60	630,814	682,237	-1.55
	Informal	13,940,272	13,499,643	2,108,639	1,055,161	6.81	6.24	433,001	497,009	-3.76 **
7.Transportasi	Formal	1,694,970	2,062,064	254,616	175,985	0.83	0.95	481,369	565,478	-5.78 **
	Informal	2,446,927	3,418,463	526,003	351,480	1.20	1.58	372,552	447,959	-7.74 **
8.Kuangan	Formal	667,694	877,544	27,169	57,567	0.33	0.41	935,465	1,063,430	-1.79 *
	Informal	98,235	247,512	5,554	16,955	0.05	0.11	820,037	737,365	0.56
9.Jasa	Formal	9,735,395	7,270,839	1,015,744	363,345	4.76	3.36	691,615	766,734	-0.94
	Informal	2,406,865	3,244,826	382,778	354,065	1.18	1.50	452,175	498,045	-1.75 *
10.Lainnya (Tidak bekerja)		117,025,877	122,629,712	29,217,079	23,922,585	57.18	56.68	380,714	412,031	-1.74 *
TOTAL		204,653,802	216,351,748	47,970,998	36,104,001					
Publikasi BPS Total Miskin (juta)				47.97	36.10					
Publikasi BPS Total Formal (juta) ²⁾		-	28.4							
Publikasi BPS Total Informal (juta) ²⁾		-	65.3							
Publikasi BPS Total Form+Inf (juta) ²⁾		-	93.7							

¹⁾Hasil Pengolahan Data Susenas 1999 dan 2004

²⁾ Sumber: Sakernas

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Jika ditinjau dari sisi sektoralnya, hubungan antara rata-rata konsumsi perkapita per bulan dengan jumlah penduduk miskin pada periode tahun 1999-2004, diperoleh informasi bahwa secara umum setiap terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 1999 ke tahun 2004 maka terjadi peningkatan rata-rata konsumsi perkapita per bulan secara signifikan, yaitu terjadi pada sektor-sektor seperti: sektor pertanian baik formal maupun informal, sektor pertambangan formal dan informal, sektor industri formal dan informal, sektor listrik formal dan informal, sektor perdagangan informal, dan sektor transportasi baik formal dan informal. Untuk sektor keuangan formal terjadi peningkatan rata-rata konsumsi secara signifikan akan tetapi jumlah penduduk miskinnya meningkat. Sementara untuk sektor konstruksi informal dan sektor keuangan informal terjadi penurunan rata-rata konsumsi dan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Dari Tabel 4.2. diperoleh informasi bahwa secara umum jumlah total populasi dari tahun 2004 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan sekitar 6.28 persen yaitu dari 216,351,748 jiwa menjadi 229,948,678 jiwa dan jumlah yang tidak bekerja meningkat sekitar 2.31 persen dari 122,629,712 jiwa menjadi 125,463,234 jiwa dimana peningkatan jumlah ini disebabkan oleh adanya penambahan dan pengurangan populasi penduduk yang bekerja di sektor-sektor lainnya yang porsinya hampir merata di semua sektor. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk miskin terlihat bahwa beberapa sektor jumlah penduduk miskinnya meningkat, walaupun peningkatan jumlah penduduk miskin secara total mengalami penurunan sebesar 9.8 persen dari 36,104,001 jiwa menjadi 32,526,469 jiwa. Sektor-sektor yang jumlah penduduk miskinnya meningkat adalah sektor pertanian formal, sektor pertambangan informal, sektor industri formal dan informal, dan sektor keuangan formal dan informal (lihat Tabel 4.2).

Jika ditinjau hubungan antara rata-rata konsumsi perkapita per bulan dengan jumlah penduduk miskin pada periode tahun 2004-2009, diperoleh informasi bahwa secara umum setiap terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2004 ke tahun 2009 maka terjadi peningkatan rata-rata konsumsi perkapita per bulan secara signifikan, yaitu terjadi pada sektor-sektor seperti: sektor pertambangan formal, sektor konstruksi informal, sektor perdagangan formal dan

Tabel 4.2. Deskripsi Sektoral Menurut Status Pekerjaan Utama ¹⁾, Periode Tahun 2004-2009

Sektor		Populasi (jiwa)		Penduduk Miskin (jiwa)		Share Populasi (%)		Rataan Konsumsi (Rp./kapita/bulan)		<i>t</i> -test
		2004	2009	2004	2009	2004	2009	2004	2009	
1.Pertanian	Formal	5,112,167	7,971,978	868,466	1,326,149	2.36	3.47	372,036	365,219	1.41
	Informal	35,495,852	35,057,515	6,795,548	6,335,769	16.41	15.25	329,468	335,797	-1.33
2.Pertambangan	Formal	497,660	447,885	41,481	28,737	0.23	0.19	657,859	770,448	-1.92 *
	Informal	537,056	691,610	87,571	127,744	0.25	0.30	416,225	386,722	0.72
3.Industri	Formal	6,850,523	7,461,106	470,648	497,089	3.17	3.24	580,956	562,210	0.71
	Informal	4,219,975	5,154,334	565,806	669,384	1.95	2.24	383,095	410,414	-2.74 **
4.Listrik	Formal	169,293	156,854	3,540	2,376	0.08	0.07	759,863	731,727	0.56
	Informal	59,004	52,587	5,601	1,174	0.03	0.02	478,744	498,404	-0.48
5.Konstruksi	Formal	2,366,754	2,748,385	277,586	240,027	1.09	1.20	569,589	503,578	1.02
	Informal	2,173,348	1,862,310	346,585	211,810	1.00	0.81	374,847	404,063	-2.51 **
6.Perdagangan	Formal	5,619,513	6,850,469	344,027	228,926	2.60	2.98	682,237	682,341	0.00
	Informal	13,499,643	14,986,299	1,055,161	889,292	6.24	6.52	497,009	538,686	-4.88 **
7.Transportasi	Formal	2,062,064	2,674,879	175,985	45,942	0.95	1.16	565,478	835,750	-4.99 **
	Informal	3,418,463	3,272,794	351,480	146,251	1.58	1.42	447,959	584,562	-5.03 **
8.Keuangan	Formal	877,544	1,261,908	57,567	96,915	0.41	0.55	1,063,430	660,334	2.98 **
	Informal	247,512	222,690	16,955	16,056	0.11	0.10	737,365	450,655	4.67 **
9.Jasa	Formal	7,270,839	8,938,173	363,345	398,673	3.36	3.89	766,734	859,492	-3.60 **
	Informal	3,244,826	4,673,668	354,065	445,255	1.50	2.03	498,045	542,730	-2.44 **
10.Lainnya (Tidak bekerja)		122,629,712	125,463,234	23,922,585	20,818,900	56.68	54.56	412,031	468,149	-14.72 **
TOTAL		216,351,748	229,948,678	36,104,001	32,526,469					
Publikasi BPS Total Miskin (juta)				36.10	32.53					
Publikasi BPS Total Formal (juta) ²⁾		28.4	31.9							
Publikasi BPS Total Informal (juta) ²⁾		65.3	72.6							
Publikasi BPS Total Form+Inf (juta) ²⁾		93.7	104.5							

¹⁾Hasil Pengolahan Data Susenas 2004 dan 2009 ²⁾ Sumber: Sakernas

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

informal, sektor transportasi formal dan informal, dan sektor jasa informal. Sementara untuk setiap peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi peningkatan rata-rata konsumsi secara signifikan terjadi pada sektor industri informal dan sektor jasa formal. Untuk sektor keuangan formal peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi penurunan rata-rata konsumsi, dan sektor keuangan informalnya penurunan jumlah penduduk miskin terjadi penurunan rata-rata konsumsi.

Periode tahun 2009-2011 (Tabel 4.3), secara umum jumlah total populasi dari tahun 2009 ke tahun 2011 mengalami peningkatan sekitar 4.54 persen yaitu dari 229,948,678 jiwa menjadi 240,383,682 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang tidak bekerja meningkat sebesar 2,9 persen dari 125,463,234 jiwa menjadi 129,101,938 jiwa dimana peningkatan jumlah ini disebabkan oleh adanya penambahan populasi penduduk yang bekerja di sektor-sektor lainnya dan penambahannya hampir merata di semua sektor.

Sementara pada periode tahun 2009-2011 terlihat bahwa hubungan antara rata-rata konsumsi dengan jumlah penduduk miskin sangat berpola, dengan kata lain hubungan antara penurunan/peningkatan rata-rata konsumsi dengan penurunan/peningkatan penduduk miskin lebih beragam.

Setiap peningkatan rata-rata konsumsi yang dibarengi penurunan jumlah penduduk miskin terjadi pada sektor pertanian formal, sektor pertambangan formal, sektor jasa formal dan informal, dan sektor keuangan baik formal maupun informal. Peningkatan rata-rata konsumsi yang dibarengi juga peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada sektor industri formal dan informal, sektor listrik informal, sektor konstruksi baik formal maupun informal, dan sektor pertanian informal. Sedangkan penurunan rata-rata konsumsi yang dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada sektor listrik formal dan transportasi formal.

Tabel 4.3. Deskripsi Sektoral Menurut Status Pekerjaan Utama¹⁾, Periode Tahun 2009-2011

Sektor		Populasi (jiwa)		Penduduk Miskin (jiwa)		Share Populasi (%)		Rataan Konsumsi (Rp./kapita/bulan)		<i>t</i> -test
		2009	2011	2009	2011	2009	2011	2009	2011	
1.Pertanian	Formal	7,971,978	5,558,269	1,326,149	723,407	3.47	2.31	365,219	515,118	-12.54 **
	Informal	35,057,515	36,917,060	6,335,769	6,971,448	15.25	15.36	335,797	396,281	-7.89 **
2.Pertambangan	Formal	447,885	801,448	28,737	33,407	0.19	0.33	770,448	947,153	-1.81 *
	Informal	691,610	550,771	127,744	75,989	0.30	0.23	386,722	450,715	-1.64
3.Industri	Formal	7,461,106	9,689,439	497,089	684,791	3.24	4.03	562,210	659,626	-2.84 **
	Informal	5,154,334	4,006,585	669,384	587,540	2.24	1.67	410,414	459,252	-4.20 **
4.Listrik	Formal	156,854	228,608	2,376	5,754	0.07	0.10	731,727	103,442	8.90 **
	Informal	52,587	28,662	1,174	1,927	0.02	0.01	498,404	657,712	-2.70 **
5.Konstruksi	Formal	2,748,385	2,807,151	240,027	249,185	1.20	1.17	503,578	659,149	-3.98 **
	Informal	1,862,310	2,783,933	211,810	363,643	0.81	1.16	404,063	436,075	-2.16 **
6.Perdagangan	Formal	6,850,469	6,435,389	228,926	316,516	2.98	2.68	682,341	885,279	-6.79 **
	Informal	14,986,299	16,804,403	889,292	957,321	6.52	6.99	538,686	651,620	-10.39 **
7.Transportasi	Formal	2,674,879	2,413,751	45,942	135,678	1.16	1.00	835,750	768,883	0.93
	Informal	3,272,794	3,171,373	146,251	305,537	1.42	1.32	584,562	590,142	-0.20
8.Keuangan	Formal	1,261,908	1,544,226	96,915	8,030	0.55	0.64	660,334	1,305,360	-7.12 **
	Informal	222,690	514,742	16,056	3,706	0.10	0.21	450,655	1,102,230	-3.42 **
9.Jasa	Formal	8,938,173	12,397,753	398,673	471,971	3.89	5.16	859,492	986,704	-6.14 **
	Informal	4,673,668	4,628,181	445,255	436,044	2.03	1.93	542,730	644,145	-4.31 **
10.Lainnya (Tidak bekerja)		125,463,234	129,101,938	20,818,900	17,691,009	54.56	53.71	468,149	566,841	-13.61 **
TOTAL		229,948,678	240,383,682	32,526,469	30,022,902					
Publikasi BPS Total Miskin (juta)				32.53	30.02					
Publikasi BPS Total Formal (juta) ²⁾		31.9	38.1							
Publikasi BPS Total Informal (juta) ²⁾		72.6	73.2							
Publikasi BPS Total Form+Inf (juta) ²⁾		104.5	111.3							

¹⁾Hasil Pengolahan Data Susenas 2009 dan 2011

²⁾ Sumber: Sakernas

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Secara kasar, kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap yang dibayar dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan klasifikasi ini, maka dari Tabel 4.1, Tabel 4.2, dan Tabel 4.3 pada tahun 1999 penduduk miskin yang bekerja pada kegiatan formal sekitar 5,838,369 jiwa (12.17 %) dan 12,915,550 jiwa (26.92 %) bekerja pada kegiatan informal. Pada tahun 2004 penduduk miskin yang bekerja pada kegiatan formal sekitar 2,602,645 jiwa (7.21 %) dan 9,578,771 jiwa (26.53 %) bekerja pada kegiatan informal. Pada tahun 2009 penduduk miskin yang bekerja pada kegiatan formal sekitar 2,864,834 jiwa (8.81 %) dan 8,842,735 jiwa (27.19 %) bekerja pada kegiatan informal. Sedangkan pada tahun 2011 penduduk miskin yang bekerja pada kegiatan formal sekitar 2,628,739 jiwa (8.76 %) dan 9,703,154 jiwa (32.32 %) bekerja pada kegiatan informal. Sedangkan total populasi formal dan informal untuk semua sektor diperoleh bahwa untuk tahun 1999 sejumlah 87,627,925 jiwa, tahun 2004 sejumlah 93,722,036 jiwa, tahun 2009 sejumlah 104,485,444 jiwa, dan tahun 2011 sejumlah 111,281,744 jiwa. Jika dibandingkan dengan data resmi BPS yang di publis berdasarkan hasil Sakernas diperoleh bahwa jumlah populasi yang bekerja menurut status pekerjaan utama untuk tahun 2004, 2009, dan 2011 adalah sama yaitu 93.7 juta jiwa, 104.5 juta jiwa, dan 111.3 juta jiwa. Akan tetapi jika diurai menurut formal dan informal jumlahnya tidak sama, perbedaan ini terjadi lebih dimungkinkan karena adanya perbedaan karakter dari tatacara dan peruntukan secara khusus dari metoda surveinya diantara Susenas dan Sakernas, dengan kata lain bahwa Susenas tidak bisa digunakan untuk mengestimasi sampai level sub-sektor (seperti dalam penelitian).

Berdasarkan hasil analisis signifikansi perbedaan rata-rata konsumsi rupiah perkapita per bulan menurut sektor (ditampilkan pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, dan Tabel 4.3), maka dengan tolok ukur ini jumlah sektor yang mengalami perubahan dalam setiap periode yang dibandingkan dapat diidentifikasi. Dalam hal ini besaran perubahan dihitung berdasarkan hasil selisih dari dua nilai besaran objek

dalam periodenya dibagi dengan nilai objek pada periode awal yang kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Pada Tabel 4.4, ditampilkan besaran perubahan untuk rata-ran konsumsi rupiah perkapita per bulan, besaran perubahan jumlah populasi, dan besaran perubahan jumlah penduduk miskin untuk sektor-sektor yang benar-benar signifikan berdasarkan signifikansi rata-ran konsumsi.

Dari Tabel 4.4, dapat diidentifikasi bahwa perubahan rata-ran konsumsi pada periode 1999-2004 dari 15 sektor yang signifikan diperoleh bahwa seluruhnya mengalami peningkatan, sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian formal dan informal, sektor pertambangan formal dan informal, sektor industri formal dan informal, sektor listrik formal dan informal, sektor konstruksi formal, sektor perdagangan informal, sektor transportasi formal dan informal, sektor keuangan formal dan sektor jasa informal. Pada periode 2004-2009 dari 11 sektor yang signifikan mengalami peningkatan sebanyak 9 sektor yaitu sektor pertambangan formal, sektor industri informal, sektor konstruksi informal, sektor perdagangan informal, sektor transportasi formal dan informal, dan sektor jasa formal dan informal, sementara yang mengalami penurunan dua sektor yaitu sektor keuangan formal dan informal. Pada periode 2009-2011 banyaknya yang mengalami peningkatan adalah 15 sektor yaitu sektor pertanian formal dan informal, sektor pertambangan formal, sektor industri formal dan informal, sektor listrik informal, sektor konstruksi formal dan informal, sektor perdagangan formal dan informal, sektor keuangan formal dan informal, dan sektor jasa formal dan informal, sementara yang mengalami penurunan satu sektor yaitu sektor listrik formal. Dari ketiga periode tersebut yang mengalami peningkatan paling besar yaitu sebesar 144.58 persen terjadi pada sektor keuangan dengan status pekerjaan utama informal terjadi pada periode 2009-2011.

Untuk perubahan jumlah penduduk miskin pada periode 1999-2004 dari total 15 sektor yang signifikan diperoleh bahwa sektor-sektor yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskinnya ada 14 sektor yaitu sektor pertanian formal dan informal, sektor pertambangan formal dan informal, sektor industri formal dan informal, sektor listrik formal dan informal, sektor konstruksi formal, sektor perdagangan informal, sektor transportasi formal dan informal, dan sektor

Tabel 4.4. Jumlah Sektor yang mengalami Perubahan Berdasarkan Signifikansi Rataan Konsumsi, Periode Tahun 1999-2011

Sektor		Perubahan Rataan Konsumsi perkapita/bulan (%)			Perubahan Jumlah Populasi (%)			Perubahan Total Penduduk Miskin (%)		
		1999-2004	2004-2009	2009-2011	1999-2004	2004-2009	2009-2011	1999-2004	2004-2009	2009-2011
1.Pertanian	Formal	29.41		41.04	-29.69		-30.28	-60.52		-45.45
	Informal	10.40		18.01	11.44		5.30	-23.76		10.03
2.Pertambangan	Formal	21.89	17.11	22.94	36.40	-10.00	78.94	-14.49	-30.72	16.25
	Informal	33.74			52.68			-15.62		
3.Industri	Formal	27.97		17.33	0.74		29.87	-61.42		37.76
	Informal	12.33	7.13	11.90	30.07	22.14	-22.27	-25.80	18.31	-12.23
4.Listrik	Formal	35.11		-85.86	-0.91		45.75	-72.77		142.20
	Informal	13.53		31.96	47.72		-45.50	-8.90		64.12
5.Konstruksi	Formal	47.41		30.89	-21.03		2.14	-60.16		3.82
	Informal		7.79	7.92		-14.31	49.49		-38.89	71.68
6.Perdagangan	Formal			29.74			-6.06			38.26
	Informal	14.78	8.39	20.96	-3.16	11.01	12.13	-49.96	-15.72	7.65
7.Transportasi	Formal	17.47	47.80		21.66	29.72		-30.88	-73.89	
	Informal	20.24	30.49		39.70	-4.26		-33.18	-58.39	
8.Keuangan	Formal	13.68	-37.91	97.68	31.43	43.80	22.37	111.88	68.35	-91.71
	Informal		-38.88	144.58		-10.03	131.15		-5.30	-76.92
9.Jasa	Formal		12.10	14.80		22.93	38.71		9.72	18.39
	Informal	10.14	8.97	18.69	34.82	44.03	-0.97	-7.50	25.76	-2.07
10.Lainnya (Tidak bekerja)		8.23	13.62	21.08	4.79	2.31	2.90	-18.12	-12.97	-15.02
Total Sektor		15	11	16	15	11	16	15	11	16
Jumlah Sektor Menaik		15	9	15	11	7	11	1	4	10
Jumlah Sektor Menurun		0	2	1	4	4	5	14	7	6

Sumber: Hasil Pengolahan

jasa informal, sementara yang jumlah penduduk miskinnya meningkat satu sektor yaitu sektor keuangan formal. Pada periode 2004-2009 dari 11 sektor yang signifikan sebanyak 7 sektor jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan yaitu sektor pertambangan formal, sektor konstruksi informal, sektor perdagangan informal, sektor transportasi formal dan informal, dan sektor keuangan informal, sementara yang jumlah penduduk miskinnya meningkat 4 sektor yaitu sektor industri informal, sektor keuangan formal, dan sektor jasa formal dan informal. Pada periode 2009-2011 dari 16 sektor yang signifikan sebanyak 6 sektor jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan yaitu sektor pertanian formal, sektor industri informal, sektor keuangan formal dan informal, dan sektor jasa informal, sementara sektor yang jumlah penduduk miskinnya meningkat ada 10 sektor yaitu sektor pertanian informal, sektor pertambangan formal, sektor industri formal, sektor listrik formal dan informal, sektor konstruksi formal dan informal, sektor perdagangan formal dan informal, dan sektor jasa formal. Dari ketiga periode tersebut yang mengalami peningkatan perubahan jumlah penduduk miskin paling tinggi terjadi pada sektor listrik formal yaitu sebesar 142.20 persen terjadi pada periode 2009-2011.

Untuk perubahan jumlah populasi pada periode 1999-2004 dari lima belas sektor yang signifikan terdapat 11 sektor yang mengalami peningkatan yaitu sektor pertanian informal, sektor pertambangan formal dan informal, sektor industri formal dan informal, sektor listrik informal, sektor transportasi formal dan informal, sektor keuangan formal, dan sektor jasa informal, sementara 4 sektor jumlah populasinya menurun yaitu sektor pertanian formal, sektor listrik formal, sektor konstruksi formal, dan sektor perdagangan informal. Pada periode 2004-2009 dari 11 sektor yang signifikan yang mengalami peningkatan perubahan jumlah populasi ada 7 sektor yaitu sektor industri informal, sektor perdagangan informal, sektor transportasi formal, sektor keuangan formal, dan sektor jasa formal dan informal, sementara 4 sektor jumlah populasinya mengalami penurunan yaitu sektor pertambangan formal, sektor konstruksi informal, sektor transportasi informal, dan sektor keuangan informal. Pada periode 2009-2011 dari 16 sektor yang signifikan yang mengalami peningkatan jumlah populasi ada 11 sektor yaitu sektor pertanian informal, sektor

pertambangan formal, sektor industri formal, sektor listrik formal, sektor konstruksi formal dan informal, sektor perdagangan informal, sektor keuangan formal dan informal, dan sektor jasa formal, sementara 5 sektor mengalami penurunan yaitu sektor pertanian formal sektor industri informal, sektor listrik informal, sektor perdagangan formal, dan sektor jasa informal.

4.2. Analisis Perubahan Ukuran Kemiskinan Sektoral

Ukuran kemiskinan merupakan suatu pertimbangan yang nyata untuk melihat pelaksanaan pembangunan. Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan utama bagi para pengambil keputusan. Lebih jauh, suatu titik pandang integratif yang secara simultan mempertimbangkan isu-isu pembangunan, penggunaan sumber daya dan kualitas lingkungan, serta kesejahteraan rakyat harus diambil jika progres yang berkelanjutan ingin dicapai.

Indeks kemiskinan menangkap prevalensi kemiskinan dengan mengukur proporsi penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan. Peningkatan di dalam indikator ini mengakibatkan bertambah buruknya situasi kemiskinan dengan semakin membesarnya proporsi penduduk yang jatuh di bawah garis kemiskinan.

Secara khusus, indeks kemiskinan (*Head Count Index*) mengukur seberapa jauh atau luas kemiskinan yang terjadi, indeks ini berasosiasi erat dengan Indeks Kesenjangan Kemiskinan atau indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) yang mengukur seberapa miskin si miskin tersebut, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Severity Poverty Index*) yang mengukur beratnya kemiskinan dengan memberi bobot lebih pada yang termiskin dari yang miskin, dimana indeks ini menangkap secara sukses aspek yang lebih mendetil mengenai situasi kemiskinan.

Analisis perubahan ukuran kemiskinan menggunakan metode analisis dekomposisi sektoral Ravallion (1990), dimana perubahan ukuran kemiskinan didekomposisi atau diurai menjadi tiga komponen: (i) intra-sektoral, (ii) antar-sektoral, dan (iii) interaksi.

Hasil analisis sesuai masa periode kebijakan yang diteliti yaitu masa periode kebijakan 1999-2004 (Propenas), periode kebijakan 2004-2009 (RPJMN-

I), dan periode kebijakan 2009-2011 (RPJMN-II) ditampilkan pada Tabel 4.5 sampai dengan Tabel 4.13 dengan pembahasan per periodenya adalah sebagai berikut:

4.2.1. Perubahan Ukuran Kemiskinan periode kebijakan Propenas tahun 1999-2004:

Perubahan ukuran kemiskinan yang terjadi pada periode 1999-2004, untuk ukuran Indeks Kemiskinan (*Headcount Index*) secara agregat (nasional) mengalami penurunan angka indeks kemiskinan sebesar 6.7397 (dari 23.4205 menjadi 16.6808). Jika diidentifikasi terhadap pengaruh inter-sektoral, antar-sektoral, dan interaksi dari keduanya maka penurunan indeks kemiskinan agregat lebih disebabkan oleh pengaruh komponen intra-sektoralnya dimana nilai persentasi perubahannya sebesar 116.67 persen yang berarti bahwa penurunan indeks kemiskinan agregat lebih diakibatkan oleh terjadinya perubahan penurunan angka indeks kemiskinan pada sektoralnya dengan total perubahan intra-sektoral sebesar -7.86. Sedangkan pengaruh komponen antar-sektoral dan interaksi diantara keduanya (intra-sektoral dengan antar-sektoral) memberikan pengaruh meningkatkan ukuran kemiskinan agregat yaitu masing-masing nilainya sebesar 0.8348 dan 0,2887 dengan persentase perubahan sebesar -12.39 persen untuk komponen antar-sektoral dan -4.28 persen untuk komponen interaksi (Tabel 4.5).

Berdasarkan hasil analisis tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa penurunan ukuran indeks kemiskinan agregat yang terjadi pada periode kebijakan propenas 1999-2004, tidak dipengaruhi oleh adanya pergeseran (perpindahan) individu dari satu sektor ke sektor lain, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh adanya faktor penurunan ukuran kemiskinan pada sektornya.

Menurut sektoral hanya satu sektor yang indeks kemiskininannya mengalami peningkatan yaitu sektor keuangan baik formal maupun informal, dimana yang berkontribusi secara signifikan terjadi pada sektor keuangan dengan status pekerjaan formal. Sementara sektor-sektor lainnya yaitu sektor pertanian formal dan informal, sektor pertambangan formal dan informal, sektor industri formal dan informal, sektor listrik formal, sektor konstruksi formal dan informal, sektor perdagangan formal dan informal, sektor transportasi formal dan informal, dan

sektor jasa formal dan informal secara keseluruhan berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan agregat walaupun ada satu sektor listrik dengan status pekerjaan utama informal yang pengaruh penurunannya tidak signifikan.

Tabel 4.5. Perubahan Indeks Kemiskinan Sektoral, Periode 1999-2004

Sektor		Indeks Kemiskinan		η -test ¹⁾	Perubahan	Persentase Perubahan (%)
		1999 (%)	2004 (%)			
Nasional		23.4205	16.6808		-6.7397	
1. Pertanian	<i>Formal</i>	30.25	16.99	5.85 **	-0.4711	6.9898
	<i>Informal</i>	27.99	19.18	6.37 **	-1.3711	20.343
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	13.30	8.34	2.83 **	-0.0088	0.1312
	<i>Informal</i>	29.50	16.31	4.58 **	-0.0227	0.3366
3. Industri	<i>Formal</i>	17.94	6.88	7.69 **	-0.3676	5.454
	<i>Informal</i>	23.50	13.41	7.57 **	-0.1600	2.3734
4. Listrik	<i>Formal</i>	7.61	2.09	4.89 **	-0.0046	0.0684
	<i>Informal</i>	15.39	9.49	1.04	-0.0012	0.0171
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	23.25	11.74	6.81 **	-0.1685	2.5001
	<i>Informal</i>	20.61	15.95	3.34 **	-0.0117	0.1743
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	11.98	6.12	5.32 **	-0.0867	1.2866
	<i>Informal</i>	15.13	7.82	10.51 **	-0.4974	7.3799
7. Transportasi	<i>Formal</i>	15.02	8.81	4.04 **	-0.0515	0.7639
	<i>Informal</i>	21.50	10.29	5.73 **	-0.1340	1.9877
8. Keuangan	<i>Formal</i>	4.07	6.56	-3.72 **	-0.0044	0.066
	<i>Informal</i>	5.65	6.85	-0.73	-0.0014	0.0206
9. Jasa	<i>Formal</i>	10.43	5.00	6.87 **	-0.2583	3.8331
	<i>Informal</i>	15.90	10.95	4.64 **	-0.0583	0.8644
Lainnya		24.93	17.62	7.52 **	-4.1840	62.0803
Total Efek Intra-sektoral					-7.8632	116.67
Efek Antar-sektoral					0.8348	-12.39
Efek Interaksi					0.2887	-4.28
Perubahan Kemiskinan					-6.7397	100.00

¹⁾: Kakwani test → statistik uji beda dua ukuran kemiskinan,

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Perubahan ukuran Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) yang terjadi pada periode 1999-2004, secara agregat mengalami penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1.5042 (dari 4.5662 menjadi 3.062). Jika diidentifikasi terhadap pengaruh intra-sektoral, antar-sektoral, dan interaksi dari keduanya maka penurunan indeks kedalaman kemiskinan agregat lebih disebabkan oleh pengaruh intra-sektoralnya dimana nilai persentase perubahannya sebesar 116.27 persen yang berarti bahwa penurunan indeks kedalaman

kemiskinan agregat lebih diakibatkan oleh terjadinya perubahan penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan pada sektoralnya dengan total perubahan intra-sektoral sebesar -1.7489. Sedangkan pengaruh komponen antar-sektoral dan interaksi diantara keduanya (intra-sektoral dengan antar-sektoral) memberikan pengaruh meningkatkan terhadap ukuran kedalaman kemiskinan agregat yaitu masing-masing nilainya sebesar 0.2050 dan 0,0397 dengan persentasi perubahan sebesar -13.63 persen untuk komponen antar-sektoral dan -2.64 persen untuk komponen interaksi (Tabel 4.6).

Tabel 4.6. Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Sektoral, Periode 1999-2004

Sektor		Indeks Kedalaman		η -test ¹⁾	Perubahan	Persentase Perubahan (%)
		1999 (%)	2004 (%)			
Nasional		4.5662	3.062		-1.5042	
1.Pertanian	<i>Formal</i>	5.75	3.06	4.12 **	-0.0956	6.357
	<i>Informal</i>	5.66	3.39	4.59 **	-0.3526	23.4411
2.Pertambangan	<i>Formal</i>	2.24	1.43	2.01 **	-0.0014	0.0961
	<i>Informal</i>	4.86	3.19	3.16 **	-0.0029	0.1916
3.Industri	<i>Formal</i>	3.31	1.04	5.51 **	-0.0754	5.0123
	<i>Informal</i>	4.15	2.15	6.62 **	-0.0317	2.1071
4.Listrik	<i>Formal</i>	1.41	0.43	2.68 **	-0.0008	0.0546
	<i>Informal</i>	2.10	0.93	1.79 *	-0.0002	0.0151
5.Konstruksi	<i>Formal</i>	4.10	2.04	6.42 **	-0.0301	2.0007
	<i>Informal</i>	4.20	2.56	4.45 **	-0.0041	0.2746
6.Perdagangan	<i>Formal</i>	2.18	1.02	3.98 **	-0.0171	1.1393
	<i>Informal</i>	2.55	1.19	11.01 **	-0.0930	6.1835
7.Transportasi	<i>Formal</i>	2.66	1.55	2.91 **	-0.0091	0.6076
	<i>Informal</i>	4.00	1.67	4.40 **	-0.0279	1.8567
8.Keuangan	<i>Formal</i>	0.65	0.34	2.31 **	-0.0010	0.0657
	<i>Informal</i>	0.70	0.27	1.44	-0.0002	0.0138
9.Jasa	<i>Formal</i>	1.89	0.88	5.77 **	-0.0477	3.1739
	<i>Informal</i>	2.65	1.80	4.28 **	-0.0100	0.6625
Lainnya		4.93	3.28	5.86 **	-0.9478	63.0135
Total Efek Intra-sektoral					-1.7489	116.27
Efek Antar-sektoral					0.2050	-13.63
Efek Interaksi					0.0397	-2.64
Perubahan Kemiskinan					-1.5042	100.00

¹⁾: Kakwani test → statistik uji beda dua ukuran kemiskinan,

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Secara sektoral, penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan terjadi pada semua sektor lapangan pekerjaan baik untuk kelas status pekerjaan formal maupun informal adalah signifikan, hanya satu yang tidak signifikan penurunannya yaitu terjadi pada sektor keuangan untuk kelas status pekerjaan informal.

Perubahan ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) yang terjadi pada periode 1999-2004, secara agregat mengalami penurunan angka indeks keparahan kemiskinan sebesar 0.4778 (dari 1.3770 menjadi 0.8993). Jika diidentifikasi terhadap pengaruh intra-sektoral, antar-sektoral, dan interaksi dari keduanya maka penurunan indeks keparahan kemiskinan agregat lebih disebabkan oleh pengaruh intra-sektoralnya dimana nilai persentasinya perubahannya sebesar 116.77 persen yang berarti bahwa penurunan indeks keparahan kemiskinan agregat lebih diakibatkan oleh terjadinya perubahan penurunan angka indeks keparahan kemiskinan pada sektoralnya dengan total perubahan intra-sektoral sebesar -0.5579. Sedangkan pengaruh komponen antar-sektoral dan interaksi diantara keduanya (intra-sektoral dengan antar-sektoral) memberikan pengaruh meningkatkan terhadap ukuran keparahan kemiskinan agregat yaitu masing-masing nilainya sebesar 0.0709 dan 0.0092 dengan persentase perubahan sebesar -14.83 persen untuk komponen antar-sektoral dan -1.93 persen untuk komponen interaksi (Tabel 4.7).

Penurunan angka indeks keparahan kemiskinan secara signifikan terjadi pada 9 sektor yang meliputi 15 sub-sektor yaitu sektor pertanian formal dan informal, sektor industri formal dan informal, sektor listrik informal, sektor konstruksi formal dan informal, sektor perdagangan formal dan informal, sektor transportasi formal dan informal, sektor keuangan formal, dan sektor jasa formal dan informal, sementara yang tidak signifikan terjadi pada tiga sektor yang meliputi empat sub-sektor yaitu diantaranya adalah sektor pertambangan formal dan informal, sektor listrik formal, dan sektor keuangan informal.

Tabel 4.7. Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Sektoral, Periode 1999-2004

Sektor		Indeks Keparahan		η -test ¹⁾	Perubahan	Persentase Perubahan (%)
		1999 (%)	2004 (%)			
Nasional		1.3770	0.8993		-0.4778	
1. Pertanian	<i>Formal</i>	1.64	0.90	3.07 **	-0.0264	5.5358
	<i>Informal</i>	1.79	0.96	3.21 **	-0.1294	27.0771
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	0.63	0.47	0.87	-0.0003	0.0595
	<i>Informal</i>	1.21	1.00	1.12	-0.0004	0.0767
3. Industri	<i>Formal</i>	0.95	0.27	4.19 **	-0.0228	4.7797
	<i>Informal</i>	1.13	0.56	5.72 **	-0.0090	1.8786
4. Listrik	<i>Formal</i>	0.39	0.22	0.89	-0.0001	0.0289
	<i>Informal</i>	0.39	0.13	2.24 **	0.0000	0.0104
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	1.09	0.57	5.26 **	-0.0076	1.5807
	<i>Informal</i>	1.30	0.64	4.23 **	-0.0017	0.3485
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	0.59	0.27	3.31 **	-0.0048	1.0014
	<i>Informal</i>	0.68	0.29	9.60 **	-0.0262	5.4781
7. Transportasi	<i>Formal</i>	0.72	0.43	2.46 **	-0.0024	0.5031
	<i>Informal</i>	1.14	0.46	3.56 **	-0.0080	1.6824
8. Keuangan	<i>Formal</i>	0.16	0.08	2.00 *	-0.0003	0.0551
	<i>Informal</i>	0.17	0.04	1.27	-0.0001	0.0135
9. Jasa	<i>Formal</i>	0.53	0.25	4.69 **	-0.0132	2.7550
	<i>Informal</i>	0.69	0.49	3.22 **	-0.0023	0.4760
Lainnya		1.50	0.97	4.49 **	-0.3030	63.4258
Total Efek Intra-sektoral					-0.5579	116.77
Efek Antar-sektoral					0.0709	-14.83
Efek Interaksi					0.0092	-1.93
Perubahan Kemiskinan					-0.4778	100.00

¹⁾: Kakwani test → statistik uji beda dua ukuran kemiskinan,

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Secara total pada masa periode kebijakan Propenas 1999-2004 terjadi penurunan ukuran kemiskinan agregat baik untuk indeks kemiskinan (P0) menurun sebesar 6.7397 dari 23.4205 menjadi 16.6808, indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun sebesar 1.7489 dari 4.5662 menjadi 3.0620, maupun indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun sebesar 0.4778 dari 1.3770 menjadi 0.8993. Penyebab terjadinya penurunan ukuran kemiskinan agregat tersebut teridentifikasi secara dominan disebabkan oleh adanya pengaruh perubahan ukuran kemiskinan pada sektornya (intra-sektoral) yaitu dengan persentase

perubahan pengaruh intra-sektoral sebesar 116.67 % untuk P0, 116.27 % untuk P1, dan 116.77 % untuk P2.

Walaupun secara total (agregat) indeks kemiskinannya turun akan tetapi teridentifikasi pada sektor keuangan besaran indeks kemiskinannya meningkat, hal ini memberikan arti bahwa sektor tersebut tidak berhasil dalam pengentasan kemiskinan.

Sektor-sektor yang berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan ukuran kemiskinan agregat P0 adalah sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik formal, konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan formal, jasa dan sektor lainnya. P1 dikontribusi oleh sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik, konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan formal, jasa dan sektor lainnya. Sementara P2 dikontribusi oleh sektor pertanian, industri, listrik informal, konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan formal, jasa, dan sektor lainnya.

4.2.2. Perubahan Ukuran Kemiskinan periode kebijakan RPJMN-I tahun 2004-2009:

Perubahan ukuran kemiskinan yang terjadi pada periode 2004-2009, untuk ukuran Indeks Kemiskinan (*Headcount Index*) secara agregat (nasional) mengalami penurunan angka indeks kemiskinan sebesar 2.5355 (dari 16.6808 menjadi 14.1454). Jika diidentifikasi terhadap pengaruh komponen intra-sektoral, antar-sektoral, dan interaksi diantara keduanya teridentifikasi bahwa penurunan ukuran kemiskinan agregat tersebut lebih besar diakibatkan oleh komponen intra-sektoral dan antar-sektoral dengan nilai persentasi perubahannya masing-masing sebesar 85.16 persen dan 20.43 persen dengan besaran perubahan angka kemiskinannya masing-masing sebesar -2.1593 untuk komponen intra-sektoral dan -0.5174 untuk komponen antar-sektoral, dengan kata lain bahwa sebesar 85.16 persen diakibatkan oleh perubahan tingkat kemiskinan pada sektornya dan sebesar 20.43 persen diakibatkan oleh adanya pergeseran individu diantara sektor-sektornya. Sedangkan interaksi diantara komponen intra-sektoral dan antar-sektoralnya mengakibatkan peningkatan angka indeks kemiskinan agregat sebesar 0.1417 dengan persentase pengaruh peningkatannya sebesar minus 5.59 persen (Tabel 4.8).

Jika ditinjau dari besaran angka indeks kemiskinan sektoralnya, teridentifikasi bahwa semua sektor yang signifikan perubahannya menunjukkan penurunan angka indeks kemiskinan yaitu sektor pertanian informal, sektor konstruksi formal dan informal, sektor perdagangan formal dan informal, sektor transportasi formal dan informal, dan sektor lainnya dengan total persentase perubahannya sebesar 84.2244 persen.

Tabel 4.8. Perubahan Indeks Kemiskinan Sektoral, Periode 2004-2009

Sektor		Indeks Kemiskinan		η -test ¹⁾	Perubahan	Persentase Perubahan (%)
		2004 (%)	2009 (%)			
Nasional		16.6808	14.1454		-2.5355	
1. Pertanian	<i>Formal</i>	16.99	16.64	0.43	-0.0047	0.1857
	<i>Informal</i>	19.18	18.07	1.67 *	-0.1004	3.9606
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	8.34	6.42	0.83	-0.0015	0.0579
	<i>Informal</i>	16.31	18.47	-0.61	0.0018	-0.0705
3. Industri	<i>Formal</i>	6.88	6.66	0.25	-0.0037	0.1447
	<i>Informal</i>	13.41	12.99	0.40	-0.0045	0.1776
4. Listrik	<i>Formal</i>	2.09	1.51	0.34	-0.0002	0.0069
	<i>Informal</i>	9.49	2.23	1.37	-0.0008	0.0301
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	11.74	8.73	2.36 **	-0.0133	0.5262
	<i>Informal</i>	15.95	11.37	2.24 **	-0.0186	0.7352
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	6.12	3.34	3.34 **	-0.0331	1.3036
	<i>Informal</i>	7.82	5.93	5.15 **	-0.0540	2.1291
7. Transportasi	<i>Formal</i>	8.81	1.72	7.52 **	-0.0277	1.0928
	<i>Informal</i>	10.29	4.47	5.62 **	-0.0377	1.4884
8. Keuangan	<i>Formal</i>	6.56	7.68	-0.97	0.0046	-0.1821
	<i>Informal</i>	6.85	7.21	-0.25	0.0043	-0.1707
9. Jasa	<i>Formal</i>	5.00	4.46	1.21	-0.0089	0.3495
	<i>Informal</i>	10.95	9.53	1.46	-0.0104	0.4091
Lainnya		17.62	15.24	3.94 **	-1.8506	72.9885
Total Efek Intra-sektoral					-2.1593	85.16
Efek Antar-sektoral					-0.5179	20.43
Efek Interaksi					0.1417	-5.59
Perubahan Kemiskinan					-2.5355	100.00

¹⁾: Kakwani test → statistik uji beda dua ukuran kemiskinan,

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Perubahan ukuran Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) yang terjadi pada periode 2004-2009, secara agregat mengalami penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0.5771 (dari 3.0620 menjadi 2.4848). Jika diidentifikasi terhadap pengaruh komponen intra-sektoral, antar-sektoral, dan interaksi diantara keduanya teridentifikasi bahwa penurunan ukuran kedalaman

kemiskinan agregat tersebut lebih besar diakibatkan oleh komponen intra-sektoral dan antar-sektoralnya dengan nilai persentasi perubahannya masing-masing sebesar 87.39 persen dan 18.49 persen serta besaran perubahan ukuran kedalaman kemiskinannya sebesar -0.5044 untuk komponen intra-sektoral dan -0.1067 untuk komponen antar-sektoral, dengan kata lain bahwa sebesar 87.39 persen diakibatkan oleh perubahan tingkat kedalaman kemiskinan pada sektornya dan sebesar 18.49 persen diakibatkan oleh adanya pergeseran individu diantara sektor-sektornya. Sementara komponen interaksi diantara komponen intra-sektoral dengan antar-sektoral mengakibatkan peningkatan angka indeks kedalaman kemiskinan agregat sebesar 0.0340 dengan persentase peningkatannya sebesar minus 5.88 persen (Tabel 4.9).

Tabel 4.9. Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Sektor, Periode 2004-2009

Sektor		Indeks Kedalaman		η -test ¹⁾	Perubahan	Persentase Perubahan (%)
		2004 (%)	2009 (%)			
Nasional		3.0620	2.4848		-0.5771	
1. Pertanian	<i>Formal</i>	3.06	2.86	1.20	-0.0026	0.4474
	<i>Informal</i>	3.39	3.22	1.16	-0.0155	2.6822
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	1.43	0.97	1.13	-0.0004	0.0611
	<i>Informal</i>	3.19	3.53	-0.41	0.0003	-0.0491
3. Industri	<i>Formal</i>	1.04	1.03	0.07	-0.0002	0.0403
	<i>Informal</i>	2.15	2.18	-0.11	0.0002	-0.0416
4. Listrik	<i>Formal</i>	0.43	0.10	1.16	-0.0001	0.0169
	<i>Informal</i>	0.93	0.04	1.94 *	-0.0001	0.0163
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	2.04	1.33	2.45 **	-0.0032	0.5490
	<i>Informal</i>	2.56	1.92	1.48	-0.0026	0.4524
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	1.02	0.45	3.69 **	-0.0068	1.1766
	<i>Informal</i>	1.19	0.85	4.93 **	-0.0097	1.6790
7. Transportasi	<i>Formal</i>	1.55	0.35	4.60 **	-0.0047	0.8186
	<i>Informal</i>	1.67	0.62	5.61 **	-0.0068	1.1727
8. Keuangan	<i>Formal</i>	0.34	0.77	-1.90 *	0.0009	-0.1563
	<i>Informal</i>	0.27	1.61	-4.82 **	0.0008	-0.1352
9. Jasa	<i>Formal</i>	0.88	0.70	2.15 **	-0.0030	0.5253
	<i>Informal</i>	1.80	1.67	0.89	-0.0010	0.1661
Lainnya		3.28	2.70	4.34 **	-0.45	77.9708
Total Efek Intra-sektoral					-0.5044	87.39
Efek Antar-sektoral					-0.1067	18.49
Efek Interaksi					0.0340	-5.88
Perubahan Kemiskinan					-0.5771	100.00

¹⁾: Kakwani test → statistik uji beda dua ukuran kemiskinan,

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Jika ditinjau menurut sektoralnya, teridentifikasi bahwa 6 sektor mengalami penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan yang signifikan yaitu sektor listrik informal, sektor konstruksi formal, sektor perdagangan formal dan informal, sektor transportasi formal dan informal, sektor jasa formal, dan sektor lainnya. Sementara satu sektor signifikan mengalami peningkatan angka indeks kedalaman kemiskinan yaitu sektor keuangan formal dan informal.

Untuk ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) secara agregat mengalami penurunan angka indeks keparahan kemiskinan sebesar 0.2287 (dari 0.8993 menjadi 0.6706). Jika diidentifikasi terhadap pengaruh komponen intra-sektoral, antar-sektoral, dan interaksi diantara keduanya teridentifikasi bahwa penurunan ukuran keparahan kemiskinan agregat tersebut lebih besar diakibatkan oleh komponen intra-sektoral dan antar-sektoralnya dengan nilai persentase perubahannya masing-masing sebesar 90.88 persen dan 14.71 persen dengan besaran perubahan angka keparahan kemiskinannya masing-masing sebesar minus 2.2078 untuk komponen intra-sektoral dan minus 0.0336 untuk komponen antar-sektoral, dengan kata lain bahwa sebesar 90.88 persen diakibatkan oleh perubahan tingkat keparahan kemiskinan pada sektornya dan sebesar 14.71 persen diakibatkan oleh adanya pergeseran individu diantara sektor-sektornya. Sementara komponen interaksi diantara komponen intra-sektoral dan antar-sektoral mengakibatkan peningkatan angka indeks keparahan kemiskinan agregat sebesar 0.0128 dengan persentase pengaruh peningkatannya sebesar minus 5.59 persen (Tabel 4.10).

Jika ditinjau menurut sektoralnya, teridentifikasi bahwa 8 sektor mengalami penurunan angka indeks keparahan kemiskinan yang yaitu sektor pertanian formal, sektor pertambangan formal, sektor listrik informal, sektor konstruksi formal, sektor perdagangan formal dan informal, sektor transportasi formal dan informal, sektor jasa formal, dan sektor lainnya), sementara satu sektor signifikan mengalami peningkatan angka indeks keparahan kemiskinan yaitu sektor keuangan informal.

Tabel 4.10. Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Sektoral, Periode 2004-2009

Sektor		Indeks Keparahan		η -test ¹⁾	Perubahan	Persentase Perubahan (%)
		2004 (%)	2009 (%)			
Nasional		0.8993	0.6706		-0.2287	
1. Pertanian	<i>Formal</i>	0.90	0.74	2.29 **	-0.0020	0.8827
	<i>Informal</i>	0.96	0.89	1.09	-0.0068	2.9720
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	0.47	0.22	1.76 *	-0.0002	0.0839
	<i>Informal</i>	1.00	1.08	-0.25	0.0001	-0.0275
3. Industri	<i>Formal</i>	0.27	0.25	0.21	-0.0003	0.1179
	<i>Informal</i>	0.56	0.56	0.00	0.0000	0.0027
4. Listrik	<i>Formal</i>	0.22	0.01	1.25	-0.0001	0.0281
	<i>Informal</i>	0.13	0.00	1.65 *	0.0000	0.0060
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	0.57	0.34	1.94 *	-0.0010	0.4563
	<i>Informal</i>	0.64	0.50	0.94	-0.0006	0.2412
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	0.27	0.11	3.43 **	-0.0019	0.8265
	<i>Informal</i>	0.29	0.20	4.27 **	-0.0028	1.2164
7. Transportasi	<i>Formal</i>	0.43	0.10	3.94 **	-0.0013	0.5737
	<i>Informal</i>	0.46	0.13	6.42 **	-0.0022	0.9545
8. Keuangan	<i>Formal</i>	0.08	0.19	-1.55	0.0002	-0.1071
	<i>Informal</i>	0.04	0.38	-4.26 **	0.0002	-0.0868
9. Jasa	<i>Formal</i>	0.25	0.17	2.80 **	-0.0014	0.5976
	<i>Informal</i>	0.49	0.45	0.98	-0.0003	0.1349
Lainnya		0.97	0.73	4.94 **	-0.1875	82.0060
Total Efek Intra-sektoral					-2.2078	90.88
Efek Antar-sektoral					-0.0336	14.71
Efek Interaksi					0.0128	-5.59
Perubahan Kemiskinan					-0.2287	100.00

¹⁾: Kakwani test → statistik uji beda dua ukuran kemiskinan,

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Secara total pada masa periode kebijakan RPJMN-I 2004-2009 terjadi penurunan ukuran kemiskinan agregat baik untuk indeks kemiskinan (P0) menurun sebesar 2.5355 dari 16.6808 menjadi 14.1454, indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun sebesar 0.5771 dari 3.0620 menjadi 2.4848, maupun indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun sebesar 0.2287 dari 0.8993 menjadi 0.6706. Penyebab terjadinya penurunan ukuran kemiskinan agregat tersebut teridentifikasi secara dominan disebabkan oleh adanya pengaruh perubahan ukuran kemiskinan pada intra-sektoral dan antar-sektoral yaitu dengan persentase perubahan total pengaruh intra-sektoral sebesar 116.67% untuk P0, 116.27% untuk P1, dan 116.77% untuk P2, sementara persentase perubahan pengaruh antar-sektoral sebesar 20.43% untuk P0, 18.49% untuk P1, dan 14.71% untuk P2.

Walaupun secara total (agregat) indeks kemiskinannya turun akan tetapi teridentifikasi beberapa sektor yaitu sektor pertambangan informal, sektor keuangan formal dan informal besaran indeks kemiskinannya meningkat, hal ini memberikan arti bahwa sektor-sektor tersebut tidak berhasil dalam pengentasan kemiskinan.

Sektor-sektor yang berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan ukuran kemiskinan agregat P0 adalah sektor pertanian informal, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan sektor lainnya. P1 dikontribusi oleh sektor listrik informal, konstruksi formal, perdagangan, transportasi, keuangan, jasa formal, dan sektor lainnya. Sementara P2 dikontribusi oleh sektor pertanian formal, pertambangan formal, listrik informal, konstruksi formal, perdagangan, transportasi, keuangan informal, jasa formal, dan sektor lainnya.

4.2.3. Perubahan Ukuran Kemiskinan periode kebijakan RPJMN-II tahun 2009-2011:

Perubahan ukuran kemiskinan yang terjadi pada periode 2009-2011, untuk ukuran Indeks Kemiskinan (*Headcount Index*) secara agregat (nasional) mengalami penurunan angka indeks kemiskinan sebesar 1.6560 (dari 14.1454 menjadi 12.4894). Jika diidentifikasi terhadap pengaruh komponen intra-sektoral, antar-sektoral, dan interaksi diantara keduanya teridentifikasi bahwa penurunan ukuran kemiskinan agregat tersebut lebih besar diakibatkan oleh komponen intra-sektoral dan antar-sektoralnya dengan nilai persentase perubahannya masing-masing sebesar 59.26 persen dan 64.35 persen dengan besaran perubahan ukuran kemiskinannya masing-masing sebesar -0.9813 untuk komponen intra-sektoral dan -1.0657 untuk komponen antar-sektoral, dengan kata lain bahwa sebesar 59.26 persen diakibatkan oleh perubahan tingkat kemiskinan pada sektornya dan sebesar 64.35 persen diakibatkan oleh adanya pergeseran individu diantara sektor-sektornya. Sementara komponen interaksi diantara komponen intra-sektoral dan antar-sektoralnya mengakibatkan peningkatan ukuran indeks kemiskinan agregat dengan persentase pengaruh peningkatannya sebesar minus 23.61 persen (Tabel 4.11).

Jika ditinjau menurut sektoralnya, teridentifikasi bahwa tiga sektor mengalami penurunan angka indeks kemiskinan yang signifikan yaitu sektor

pertanian formal, sektor keuangan formal dan informal, dan sektor lainnya, sementara dua sektor signifikan mengalami peningkatan angka indeks kemiskinan yaitu sektor perdagangan formal, sektor transportasi formal dan informal.

Tabel 4.11. Perubahan Indeks Kemiskinan Sektoral, Periode 2009-2011

Sektor		Indeks Kemiskinan		η -test ¹⁾	Perubahan	Persentase Perubahan (%)
		2009 (%)	2011 (%)			
Nasional		14.1454	12.4894		-1.6560	
1. Pertanian	<i>Formal</i>	16.64	13.02	2.39 **	-0.0808	4.8797
	<i>Informal</i>	18.07	18.88	-1.51	0.0796	-4.8096
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	6.42	4.17	1.00	-0.0027	0.1605
	<i>Informal</i>	18.47	13.80	1.35	-0.0085	0.5155
3. Industri	<i>Formal</i>	6.66	7.07	-0.56	0.0077	-0.4647
	<i>Informal</i>	12.99	14.66	-1.12	0.0220	-1.3297
4. Listrik	<i>Formal</i>	1.51	2.52	-0.55	0.0006	-0.0346
	<i>Informal</i>	2.23	6.72	-0.82	0.0009	-0.0520
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	8.73	8.88	-0.11	0.0009	-0.0559
	<i>Informal</i>	11.37	13.06	-0.86	0.0074	-0.4443
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	3.34	4.92	-2.37 **	0.0254	-1.5344
	<i>Informal</i>	5.93	5.70	0.48	-0.0084	0.5050
7. Transportasi	<i>Formal</i>	1.72	5.62	-3.54 **	0.0163	-0.9842
	<i>Informal</i>	4.47	9.63	-3.69 **	0.0264	-1.5937
8. Keuangan	<i>Formal</i>	7.68	0.52	6.22 **	-0.0221	1.3376
	<i>Informal</i>	7.21	0.72	3.51 **	-0.0505	3.0492
9. Jasa	<i>Formal</i>	4.46	3.81	1.11	-0.0204	1.2306
	<i>Informal</i>	9.53	9.42	0.17	-0.0017	0.1039
Lainnya		15.24	13.88	4.27 **	-0.9734	58.781
Total Efek Intra-sektoral					-0.9813	59.26
Efek Antar-sektoral					-1.0657	64.35
Efek Interaksi					0.3910	-23.61
Perubahan Kemiskinan					-1.6560	100.00

¹⁾: Kakwani test → statistik uji beda dua ukuran kemiskinan,

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Perubahan ukuran Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) yang terjadi pada periode 2009-2011, secara agregat (nasional) mengalami penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0.4056 (dari 2.4848 menjadi 2.0792). Jika diidentifikasi terhadap pengaruh komponen intra-sektoral, antar-sektoral, dan interaksi diantara keduanya teridentifikasi bahwa penurunan ukuran kedalaman kemiskinan agregat tersebut lebih besar diakibatkan oleh pengaruh komponen intra-sektoral dan antar-sektoralnya dengan persentasi perubahannya masing-masing sebesar 68.13 persen (perubahan ukuran indeks kedalaman kemiskinannya -0.2764) dan 50.45 persen (perubahan ukuran indeks kedalaman kemiskinannya -0.2046), dengan kata lain bahwa sebesar 68.13 persen diakibatkan oleh perubahan tingkat kedalaman kemiskinan pada sektornya dan sebesar 50.45 persen diakibatkan oleh adanya pergeseran individu diantara sektor-sektornya. Sementara pengaruh komponen interaksi diantara komponen intra-sektoral dan antar-sektoralnya mengakibatkan peningkatan ukuran indeks kedalaman kemiskinan agregat dengan persentase pengaruh peningkatannya sebesar minus 18.58 persen (Tabel 4.12).

Jika ditinjau menurut sektoralnya, teridentifikasi bahwa empat sektor mengalami penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan yang signifikan yaitu sektor pertanian formal, sektor pertambangan informal, sektor keuangan formal dan informal, dan sektor lainnya, sementara dua sektor signifikan mengalami peningkatan angka indeks kedalaman kemiskinan yaitu sektor perdagangan formal, sektor transportasi informal.

Tabel 4.12. Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Sektoral, Periode 2009-2011

Sektor		Indeks Kedalaman		η -test ¹⁾	Perubahan	Persentase Perubahan (%)
		2009 (%)	2011 (%)			
Nasional		2.4848	2.0792		-0.4056	
1.Pertanian	<i>Formal</i>	2.86	2.21	2.31 **	-0.0146	3.6029
	<i>Informal</i>	3.22	3.22	0.03	-0.0005	0.1170
2.Pertambangan	<i>Formal</i>	0.97	0.52	1.16	-0.0005	0.1294
	<i>Informal</i>	3.53	2.10	1.68 *	-0.0026	0.6444
3.Industri	<i>Formal</i>	1.03	1.05	-0.11	0.0004	-0.0913
	<i>Informal</i>	2.18	2.31	-0.39	0.0018	-0.4419
4.Listrik	<i>Formal</i>	0.10	0.22	-0.62	0.0001	-0.0167
	<i>Informal</i>	0.04	0.43	-1.37	0.0001	-0.0186
5.Konstruksi	<i>Formal</i>	1.33	1.36	-0.13	0.0002	-0.0545
	<i>Informal</i>	1.92	2.03	-0.21	0.0005	-0.1138
6.Perdagangan	<i>Formal</i>	0.45	0.74	-2.47 **	0.0048	-1.1788
	<i>Informal</i>	0.85	0.84	0.13	-0.0003	0.0686
7.Transportasi	<i>Formal</i>	0.35	0.79	-1.61	0.0018	-0.4557
	<i>Informal</i>	0.62	1.54	-4.69 **	0.0047	-1.1516
8.Keuangan	<i>Formal</i>	0.77	0.06	3.25 **	-0.0036	0.8919
	<i>Informal</i>	1.61	0.26	3.43 **	-0.0074	1.8330
9.Jasa	<i>Formal</i>	0.70	0.57	1.28	-0.0040	0.9843
	<i>Informal</i>	1.67	1.47	1.41	-0.0033	0.8242
Lainnya		2.70	2.35	4.03 **	-0.2538	62.5606
Total Efek Intra-sektoral					-0.2764	68.13
Efek Antar-sektoral					-0.2046	50.45
Efek Interaksi					0.0754	-18.58
Perubahan Kemiskinan					-0.4056	100.00

¹⁾: Kakwani test → statistik uji beda dua ukuran kemiskinan,

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Perubahan ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) yang terjadi pada periode 2009-2011, secara agregat mengalami penurunan angka indeks keparahan kemiskinan sebesar 0.125 (dari 0.6706 menjadi 0.5456). Jika diidentifikasi terhadap pengaruh komponen intra-sektoral, antar-sektoral, dan interaksi diantara keduanya teridentifikasi bahwa penurunan ukuran keparahan kemiskinan agregat tersebut lebih besar diakibatkan oleh komponen intra-sektoral dan antar-sektoralnya dengan nilai persentasi perubahannya masing-masing sebesar 71.04 persen dan 46.07 persen dengan besaran perubahan ukuran keparahan kemiskinannya masing-masing sebesar -0.0888 untuk komponen intra-sektoral dan -0.0576 untuk komponen antar-sektoral, dengan kata lain bahwa sebesar 71.04 persen diakibatkan oleh perubahan tingkat keparahan kemiskinan

pada sektornya dan sebesar 46.07 persen diakibatkan oleh adanya pergeseran individu diantara sektor-sektornya. Sementara pengaruh komponen interaksi diantara komponen intra-sektoral dengan antar-sektoralnya mengakibatkan peningkatan ukuran indeks keparahan kemiskinan agregat dengan persentase pengaruh peningkatannya sebesar minus 17.11 persen (Tabel 4.13).

Jika ditinjau menurut sektoralnya, teridentifikasi bahwa empat sektor mengalami penurunan angka indeks keparahan kemiskinan yang signifikan yaitu sektor pertambangan informal, sektor keuangan formal dan informal, sektor jasa informal, dan sektor lainnya, sementara dua sektor signifikan mengalami peningkatan angka indeks keparahan kemiskinan yaitu sektor perdagangan formal, sektor transportasi informal.

Tabel 4.13. Perubahan Indeks Keparahannya Kemiskinan Sektoral, Periode 2009-2011

Sektor		Indeks Keparahannya		η -test ¹⁾	Perubahan	Persentase Perubahan (%)
		2009 (%)	2011 (%)			
Nasional		0.6706	0.5456		-0.1250	
1. Pertanian	<i>Formal</i>	0.74	0.58	1.55	-0.0035	2.8356
	<i>Informal</i>	0.89	0.87	0.32	-0.0017	1.3408
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	0.22	0.10	1.20	-0.0001	0.1079
	<i>Informal</i>	1.08	0.56	1.70 *	-0.0009	0.7492
3. Industri	<i>Formal</i>	0.25	0.25	-0.04	0.0001	-0.0615
	<i>Informal</i>	0.56	0.54	0.17	-0.0002	0.1870
4. Listrik	<i>Formal</i>	0.01	0.03	-0.77	0.0000	-0.0095
	<i>Informal</i>	0.00	0.03	-1.31	0.0000	-0.0052
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	0.34	0.35	-0.05	0.0001	-0.0512
	<i>Informal</i>	0.50	0.47	0.18	-0.0001	0.1099
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	0.11	0.20	-2.64 **	0.0014	-1.1308
	<i>Informal</i>	0.20	0.20	0.14	-0.0001	0.0472
7. Transportasi	<i>Formal</i>	0.10	0.18	-0.88	0.0004	-0.2802
	<i>Informal</i>	0.13	0.38	-4.90 **	0.0013	-1.0344
8. Keuangan	<i>Formal</i>	0.19	0.01	2.71 **	-0.0009	0.7343
	<i>Informal</i>	0.38	0.07	2.88 **	-0.0017	1.3859
9. Jasa	<i>Formal</i>	0.17	0.14	0.94	-0.0010	0.7642
	<i>Informal</i>	0.45	0.36	1.67 *	-0.0014	1.1367
Lainnya		0.73	0.62	3.08 **	-0.0803	64.2162
Total Efek Intra-sektoral					-0.0888	71.04
Efek Antar-sektoral					-0.0576	46.07
Efek Interaksi					0.0214	-17.11
Perubahan Kemiskinan					-0.1250	100.00

¹⁾: Kakwani test → statistik uji beda dua ukuran kemiskinan

*: Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **: Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Secara total pada masa periode kebijakan RPJMN-II 2009-2011, terjadi penurunan ukuran kemiskinan agregat baik untuk indeks kemiskinan (P0) yaitu menurun sebesar 1.6560 dari 14.1454 menjadi 12.4894, indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun sebesar 0.4056 dari 2.4848 menjadi 2.0792, maupun indeks keparahan kemiskinan (P2) menurun sebesar 0.1250 dari 0.6706 menjadi 0.5456. Penyebab terjadinya penurunan ukuran kemiskinan agregat tersebut teridentifikasi secara dominan disebabkan oleh adanya pengaruh perubahan ukuran kemiskinan pada intra-sektoral dan antar-sektoral yaitu dengan persentase perubahan total pengaruh intra-sektoral sebesar 59.26 % untuk P0, 68.13 % untuk P1, dan 71.04 % untuk P2, sementara persentase perubahan pengaruh antar-sektoral sebesar 64.35 % untuk P0, 50.45 % untuk P1, dan 46.07 % untuk P2.

Walaupun secara total (agregat) indeks kemiskinannya turun akan tetapi teridentifikasi beberapa sektor yaitu sektor pertanian informal, sektor industri formal dan informal, sektor listrik formal dan informal, sektor konstruksi formal dan informal, sektor perdagangan formal, dan sektor transportasi formal dan informal besaran indeks kemiskinannya meningkat dari tahun 2009 ke tahun 2011, hal ini memberikan arti bahwa sektor-sektor tersebut tidak berhasil dalam pengentasan kemiskinan.

Sektor-sektor yang berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan ukuran kemiskinan agregat P0 adalah sektor pertanian formal, perdagangan formal, transportasi, sektor keuangan, dan sektor lainnya. P1 dikontribusi oleh sektor pertanian formal, sektor pertambangan informal, sektor perdagangan formal, sektor transportasi informal, sektor keuangan formal dan informal, dan sektor lainnya. Sementara P2 dikontribusi oleh sektor pertambangan informal, sektor perdagangan formal, sektor transportasi informal, sektor keuangan formal dan informal, sektor jasa informal, dan sektor lainnya.

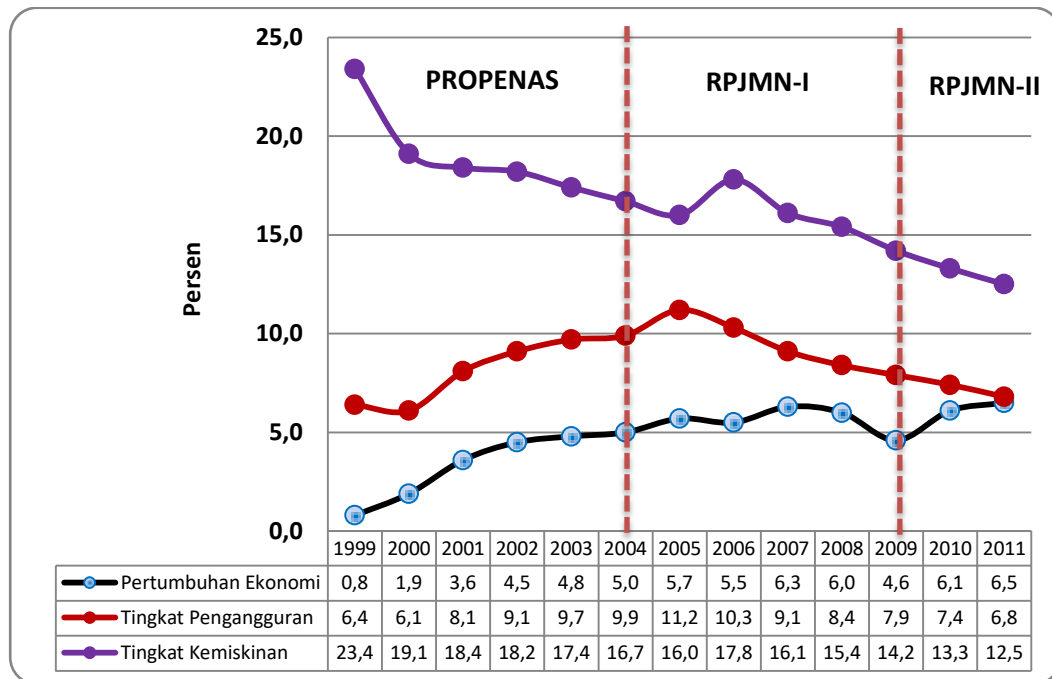
4.3. Analisis Pengaruh Perubahan Ukuran Kemiskinan Sektoral Pada Tiga Masa Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 1999-2011

4.3.1. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Tingkat Kemiskinan Sektoral terhadap Perubahan Tingkat Kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, mengandung arti bahwa pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja (seperti sektor pertanian atau sektor yang padat karya lainnya). Disisi lain dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, tingginya angka pengangguran (relatif dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi) dianggap sebagai sumber masalah perekonomian yang akan berujung pada masalah kemiskinan.

Secara agregat kecenderungan perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan selama tiga masa pemerintahan tahun 1999-2011 berdasarkan perspektif pertumbuhan ekonomi telah terjadi masalah perekonomian, hal ini ditunjukan secara grafis (Gambar 4.1) bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama tiga masa kebijakan berada dibawah tingkat pengangguran sehingga jelas bahwa masalah kemiskinan telah terjadi yang faktanya bahwa grafik angka tingkat kemiskinan berada diatas grafik pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

Jika ditinjau terhadap masing-masing periodenya, pada periode masa kebijakan Propenas diperoleh informasi bahwa kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran meningkat sedangkan disisi lain tingkat kemiskinan sebaliknya mengalami penurunan, hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kedua periode masa kebijakan lainnya yaitu RPJMN-I dan RPJMN-II dimana pola peningkatan pertumbuhan ekonomi berakibat pada kecenderungan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 4.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000), Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan Periode Tahun 1999-2011

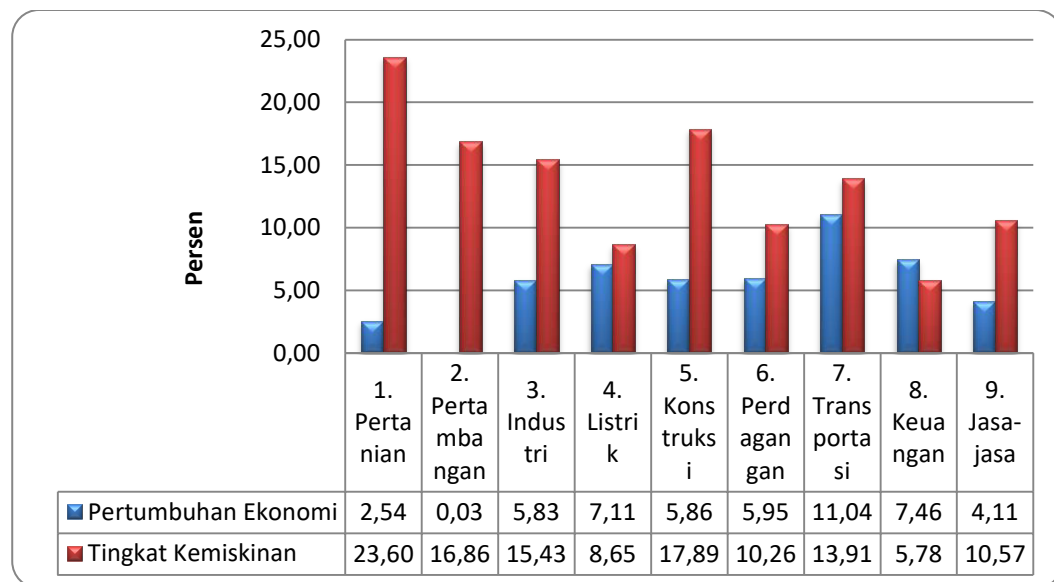
Analisis pengaruh hubungan diantara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan pada ketiga masa kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

Masa Kebijakan Propenas Periode Tahun 1999-2004:

Pada masa kebijakan Propenas periode tahun 1999-2004, prestasi didalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 0.8 persen pada tahun 1999 hingga mencapai 5 persen pada tahun 2004 adalah disebabkan oleh adanya berbagai upaya perbaikan pada sektor ekonomi diantaranya ditempuh baik melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah walaupun pelaksanaannya cenderung hati-hati malahan lebih mengutamakan keberlanjutan fiskal dibanding moneter, akan tetapi telah menghasilkan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi tersebut masih jauh di bawah tingkat sebelum krisis ekonomi dan tentunya kurang memadai untuk menyerap tambahan

angkatan kerja yang ada sehingga pengangguran terus meningkat, dari 6.4 persen pada tahun 1999 menjadi 9.9 persen pada tahun 2004. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan agregat dimana kecenderungannya mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2004 secara kontinyu mengalami penurunan, akan tetapi tidak mampu menurunkan tingkat pengangguran (Gambar 4.1).



Sumber: BPS (diolah) dan Hasil dekomposisi

Gambar 4.2. Hubungan Rataan Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000) dengan Tingkat Kemiskinan Sektoral, Periode Kebijakan Propenas 1999-2004

Menurut sektoral (Gambar 4.2), rata-rata pertumbuhan ekonomi sektoral (1999 s/d 2004) pada periode kebijakan Propenas 1999-2004 memperlihatkan bahwa beberapa sektor mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi agregat, diantaranya secara jelas terlihat pada sektor keuangan. Rataan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor keuangan sebesar 7.46 persen mampu menurunkan tingkat kemiskinan sektornya menjadi 5.78 persen, prestasi tersebut bisa dicapai secara khusus berkat adanya perbaikan atau capaian sasaran sesuai dengan apa yang telah ditargetkan di sektor keuangan, akan tetapi sektor ini pada dasarnya tidak banyak menyerap tenaga kerja jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya apalagi jika dibandingkan dengan

sektor pertanian, sehingga tingkat pengangguran yang terjadi pada periode Proenas mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2004 semakin tinggi.

Selain meningkatnya pengangguran terbuka (Gambar 4.1), secara sektoral (Tabel 4.14 dan Gambar 4.5) terjadi bahwa jumlah pekerja di sektor yang kurang produktif atau sektor informal mengalami peningkatan dengan total perubahan sebesar 7,995,080 jiwa. Sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor formal mengalami penurunan dengan total perubahan 1,900,969 jiwa, dari mulai tahun 1999 hingga tahun 2004.

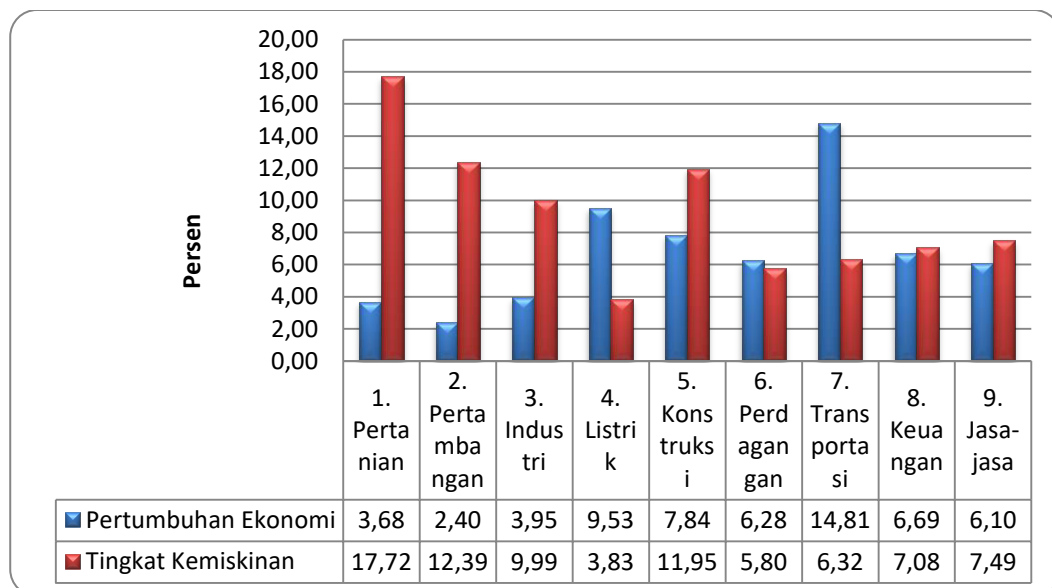
Melimpahnya tenaga kerja informal yang umumnya berada di sektor pertanian bukan disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi ataupun peningkatan lapangan kerja di sektor pertanian, tetapi karena keterbatasan lapangan kerja di sektor industri atau sektor lainnya. Dengan demikian produktivitas cenderung semakin menurun dan berdampak pada penurunan nilai tukar petani. Ini mengakibatkan rendahnya pendapatan pada tingkat yang rawan yaitu di bawah atau sekitar garis kemiskinan.

Masa Kebijakan RPJMN-I Periode Tahun 2004-2009:

Pada masa kebijakan RPJMN-I periode tahun 2004-2009, perkembangan pertumbuhan ekonomi (Gambar 4.1) terjadi sangat berfluktuatif dimana sejak tahun 2004 hingga akhir masa kebijakan tahun 2009 terjadi dua kali pelemahan angka pertumbuhan ekonomi yaitu terjadi pada tahun 2006 dan pada akhir masa kebijakan tahun 2009 dimana masing-masing angka pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 5.5 persen dan 4.5 persen. Terjadinya penurunan tersebut diakibatkan oleh dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak didalam negeri yang terjadi pada bulan Oktober 2005, sedangkan yang terjadi pada tahun 2009 adalah diakibatkan oleh adanya dampak krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Pada tahun 2005 tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 9.9 persen pada tahun 2004 menjadi 11.2 persen akan tetapi tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 16 persen dari sebelumnya 16.7 persen pada tahun 2004. Sebagai akibat kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5.5 persen yang diikuti dengan meningkatnya tingkat kemiskinan menjadi 17.8 persen akan

tetapi dengan berbagai upaya kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, tingkat pengangguran bisa ditekan dengan kecenderungan menurun menjadi 10.3 persen pada tahun 2006.

Kondisi perekonomian pada semester I 2006 ditandai dengan penurunan tingkat konsumsi masyarakat yang diikuti dengan penurunan tingkat produksi dan rendahnya investasi.



Sumber: BPS (diolah) dan Hasil dekomposisi

Gambar 4.3. Hubungan Rataan Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000) dengan Tingkat Kemiskinan Sektoral, Periode Kebijakan RPJMN-I 2004-2009

Pelemahan ekonomi pada semester I 2006 yang memang telah diperkirakan, mulai dapat teratasi pada semester II 2006. Kecepatan pemulihan ekonomi untuk kembali tumbuh lebih tinggi merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah dalam bentuk ekspansi fiskal untuk melindungi daya beli masyarakat miskin (seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasi Sekolah (BOS), pengobatan gratis bagi keluarga miskin) dan juga koordinasi kebijakan makro yang baik dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI) secara bertahap telah mengembalikan stabilitas ekonomi. Setelah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 hingga tahun 2008, pada akhir masa

kebijakan RPJMN-I tahun 2009 kembali pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan mulai dari 6 persen pada tahun 2008 hingga menjadi 4.5 persen di tahun 2009, hal ini sesungguhnya adalah akibat terjadinya krisis global yang terjadi di tahun sebelumnya yaitu tahun 2008.

Secara sektoral (Gambar 4.3), pertumbuhan ekonomi sektoral pada periode kebijakan RPJMN-I 2004-2009 memperlihatkan bahwa beberapa sektor mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi agregat, diantaranya secara jelas terlihat pada sektor Listrik, sektor Perdagangan, sektor Transportasi dan sektor Keuangan. Rataan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor Listrik, sektor Perdagangan, sektor Transportasi dan sektor Keuangan masing-masing sebesar 9.53 persen, 6.28 persen, 14.81 persen, dan 6.69 persen secara tidak langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan masing-masing sektornya menjadi 3.83 persen pada sektor Listrik, 5.80 persen pada sektor Perdagangan, 6.32 persen pada sektor Transportasi, dan 5.15 persen pada sektor Keuangan, hal ini tercermin dari realisasi sesuai dengan yang telah dicapai yaitu adanya peningkatan penjualan listrik pada sektor industri serta investasi di bidang sarana transportasi dan tumbuhnya sarana komunikasi yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan telepon seluler dan penggunaan internet, juga hal ini menjadi indikator yang cukup jelas untuk menggambarkan peningkatan aktifitas masyarakat dan dunia usaha.

Untuk sektor pertanian (Gambar 4.3), terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi (2005 s/d 2009) sebesar 2.08 persen masih terlihat jauh jika dibandingkan tingkat kemiskinannya yaitu sebesar 17.72 persen, namun jika ditinjau terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah pada masa kebijakan RPJMN-I diperoleh bahwa beberapa realisasi capaian sasaran sesuai yang telah ditargetkan secara terukur hasilnya cukup mengesankan. Selama periode kebijakan RPJMN-I 2004-2009 semua komoditas pangan trend-nya meningkat.

Bidang ketenagakerjaan, selama periode kebijakan 2004-2009 (Gambar 4.1) secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat pengangguran mengalami penurunan, jika ditinjau berdasarkan sektoral (Tabel 4.14 dan Gambar 4.5) diperoleh keterangan bahwa pada sektor formal secara umum mengalami peningkatan penduduk yang bekerja dengan total perubahan peningkatan sebesar

7,130,516 jiwa, begitu pula pada sektor informal secara umum mengalami perubahan peningkatan penduduk yang bekerja dengan total perubahan sebesar 3,632,892 jiwa. Sektor-sektor yang mengalami penurunan jumlah pekerjaannya adalah pada sektor pertambangan-formal, sektor listrik-formal, dan sektor keuangan-formal, sedangkan pada kelas status informal adalah sektor pertanian, konstruksi, listrik dan transportasi. Dengan demikian mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2009 jika dilihat dan dibandingkan antara perubahan tenaga kerja yang bekerja menurut status pekerjaannya maka pada periode kebijakan RPJMN-I tenaga kerjanya lebih banyak bekerja dengan status pekerjaan formal dibanding informalnya, terutama terjadi di sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa.

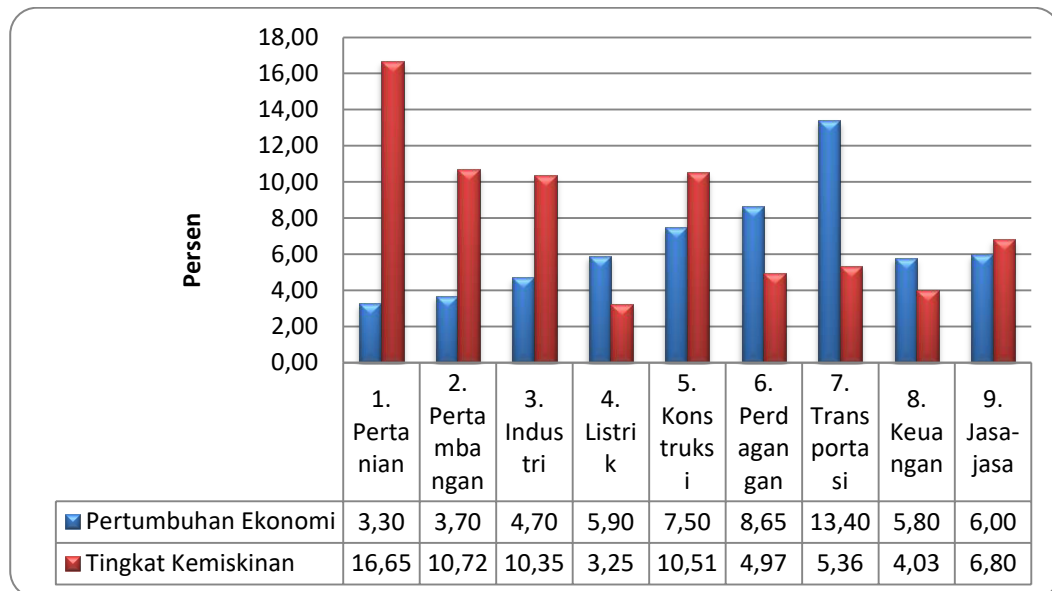
Peningkatan jumlah partisipasi angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran merupakan gambaran kemampuan masyarakat untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menikmati bagian dari peningkatan pendapatan.

Masa Kebijakan RPJMN-II Periode Tahun 2009-2011:

Pada masa kebijakan RPJMN-II periode tahun 2009-2011, perkembangan pertumbuhan ekonomi (Gambar 4.1) setelah mengalami pelemahan di tahun 2009 dimana sebagai imbas dari adanya krisis global yang terjadi di tahun 2008, pada tahun 2010 hingga tahun 2011 mulai terjadi peningkatan kembali yang secara tidak langsung berakibat terhadap menurunnya tingkat pengangguran.

Perekonomian nasional pada tahun 2010 menunjukkan kondisi yang cukup baik sebagai kelanjutan pemulihan ekonomi dari krisis keuangan global tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 tumbuh sebesar 6,1 persen (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,6 persen (yoy) dan mampu lebih tinggi dari tahun 2008 yaitu sebesar 6,0 persen (yoy).

Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi menunjukan arah lebih baik lagi jika dibanding tahun 2010 yaitu menjadi 6.5 persen, hal ini disebabkan oleh meningkatnya pada sumber-sumber pertumbuhan seperti pengeluaran konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, ekspor-impor dan lainnya.



Sumber: BPS (diolah) dan Hasil dekomposisi

Gambar 4.4. Hubungan Rataan Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000) dengan Tingkat Kemiskinan Sektoral, Periode Kebijakan RPJMN-II 2009-2011

Secara sektoral (Gambar 4.4), rata-rata pertumbuhan ekonomi sektoral (2010 s/d 2011) pada periode kebijakan RPJMN-II 2009-2011 sektor-sektor yang dominan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi agregat masih sama dengan periode kebijakan RPJMN-I terdiri dari empat sektor yaitu sektor Listrik, sektor Perdagangan, sektor Transportasi dan sektor Keuangan.

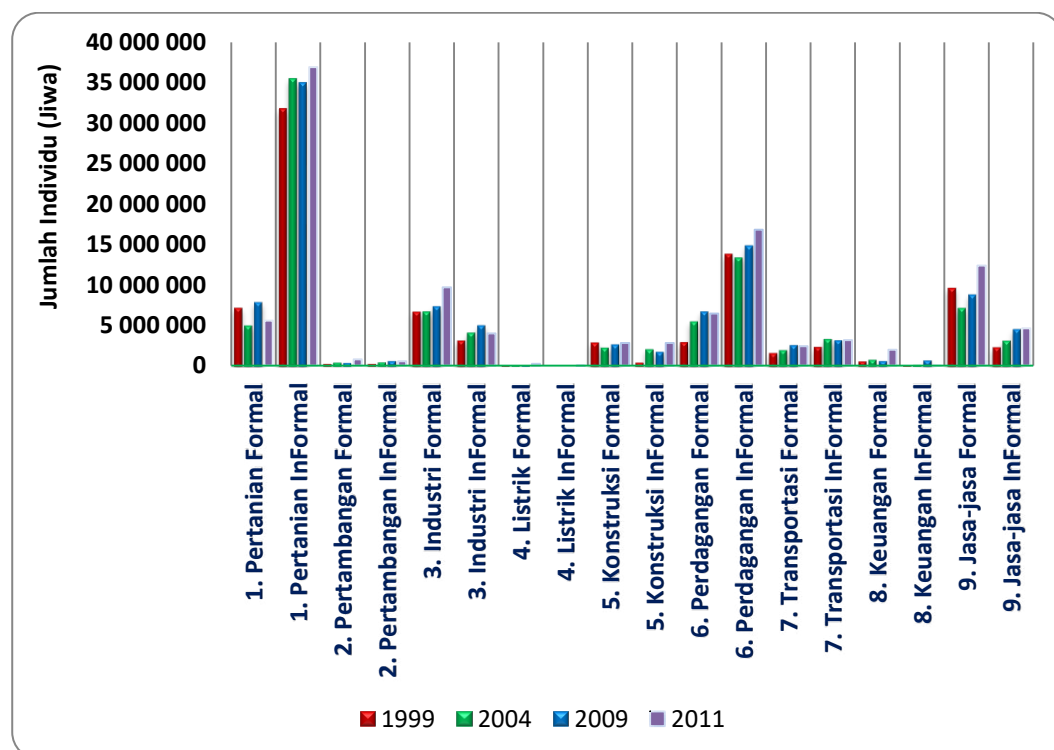
Bidang ketenagakerjaan, selama periode kebijakan 2009-2011 (Gambar 4.1) secara agregat diketahui bahwa tingkat pengangguran mengalami penurunan, akan tetapi jika ditinjau berdasarkan komposisi pekerja menurut lapangan kerja utama atau sektoral (Tabel 4.14 dan Gambar 4.5) beberapa sektor yang mengalami perubahan dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya pertanian meningkat pada sektor informal sedangkan sektor formalnya mengalami penurunan mulai dari tahun 2009 ke tahun 2011, sektor industri terjadi peningkatan pada kelas status pekerjaan formal sedangkan sektor informalnya menurun, sektor perdagangan pada status formal menurun sedangkan status informalnya meningkat, dan sektor jasa kemasyarakatan pada kelas status formal meningkat sedangkan kelas status informalnya menurun. Secara keseluruhan perubahan tenaga kerja yang bekerja selama periode kebijakan RPJMN-II 2009-

2011 mengalami perubahan yang positif baik pada kelas status pekerjaan formal maupun informal.

Tabel 4.14. Perubahan Tenaga Kerja Sektoral Menurut Status Pekerjaan Per Periode Kebijakan.

Sektor	Perubahan (Juta jiwa)					
	1999-2004		2004-2009		2009-2011	
	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal
1. Pertanian	(2,158,415)	3,644,712	2,859,811	(438,337)	(2,413,709)	1,859,545
2. Pertambangan	132,813	185,307	(49,774)	154,553	353,562	(140,838)
3. Industri	50,352	975,587	610,584	934,358	2,228,333	(1,147,749)
4. Listrik	(1,550)	19,061	(12,439)	(6,417)	71,754	(23,925)
5. Konstruksi	(630,398)	1,656,572	381,631	(311,038)	58,767	921,622
6. Perdagangan	2,589,537	(440,629)	1,230,956	1,486,656	(415,080)	1,818,104
7. Transportasi	367,094	971,536	612,815	(145,669)	(261,128)	(101,421)
8. Keuangan	209,850	149,277	384,365	(24,823)	282,318	292,052
9. Jasa	(2,464,556)	837,961	1,667,334	1,428,842	3,459,580	(45,487)
Total Perubahan	(1,900,969)	7,995,080	7,130,516	3,632,892	4,354,086	2,442,214

Sumber: Hasil dekomposisi, angka dalam tanda kurung () adalah menunjukkan penurunan.



Sumber: Hasil dekomposisi

Gambar 4.5. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Sektoral) pada Tiga Masa Kebijakan Pembangunan Nasional, Tahun 1999-2011

Kajian Pengaruh Terhadap Perubahan Ukuran Kemiskinan Sektoral:

Berdasarkan hasil eksplorasi penggalian secara ekonomi melalui perbandingan keterkaitan faktor perkembangan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan yang terjadi, secara deskriptif bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan secara agregat menunjukkan ada pengaruh langsung, hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan cenderung mengalami penurunan, begitu juga pola tersebut terjadi jika diamati menurut sektoral.

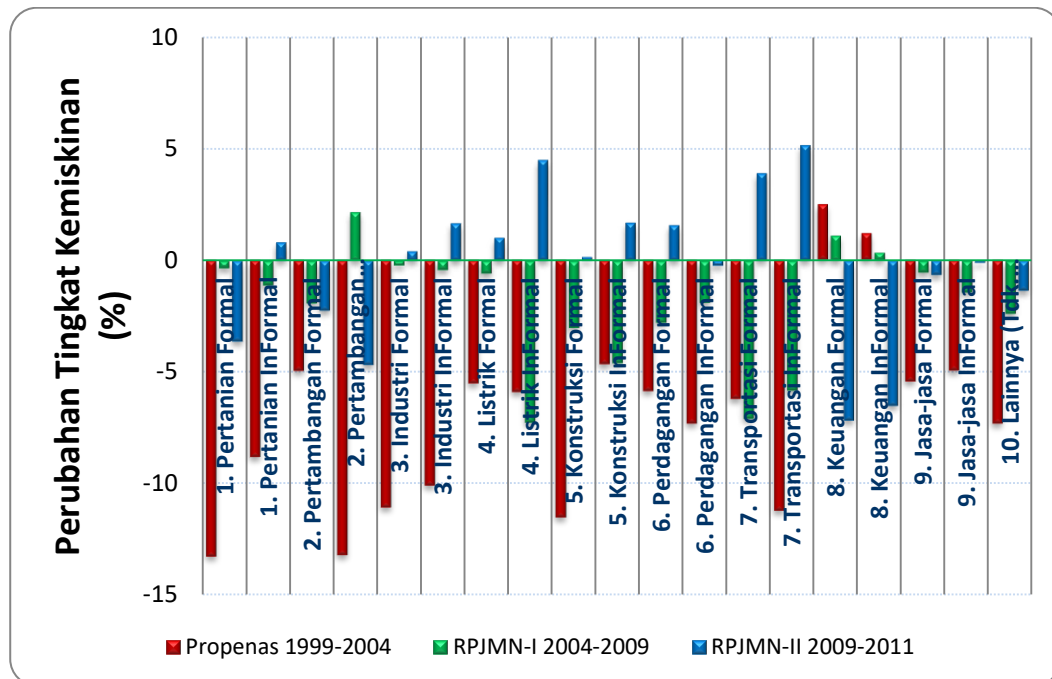
Jika ditinjau terhadap faktor ketenagakerjaan khususnya faktor pengangguran, terlihat bahwa pada periode masa kebijakan Propenas 1999-2004 angka tingkat pengangguran meningkat akan tetapi disisi lain tingkat kemiskinan cenderung menurun, berbeda dengan yang terjadi pada dua masa kebijakan lainnya yaitu RPJMN-I 2004-2009 dan RPJMN-II 2009-2011 dimana kecenderungan tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinannya adalah searah dalam hal ini sama-sama terjadi berkecenderungan menurun. Hal ini hanya bisa dijelaskan oleh tingkat pertumbuhan ekonominya, karena jika dibandingkan antara periode Propenas dengan periode RPJMN-I dan RPJMN-II tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode Propenas jauh lebih rendah dibanding periode RPJMN-I dan RPJMN-II walaupun pada kedua periode terakhir jumlah jiwanya lebih banyak.

Dengan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara deskriptif sangat besar peranannya. Begitu juga menurut sektoral, dari beberapa perbandingan pada setiap periode kebijakannya diperoleh bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap tingkat kemiskinan sektoralnya terlihat sangat jelas hubungan pengaruhnya, dan lebih mudah dalam hal pengeksplorasian hubungan diantara keduanya terlebih saat dibandingkan dengan realitas hasil capaian.

Mengingat pertumbuhan ekonomi agregat adalah merupakan pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya dibentuk atau dikontribusi oleh pertumbuhan

ekonomi sektoralnya, maka dekomposisi ukuran kemiskinan sampai level sektoral akan sangat bermanfaat seperti yang telah ditunjukkan dalam uraian pembahasan keterkaitan diatas.

Berdasarkan hasil dekomposisi ukuran kemiskinan sektoral yang telah dilakukan untuk tiga periode masa kebijakan pembangunan nasional tahun 1999-2011, diperoleh bahwa perubahan tingkat kemiskinan sektoral pada masa periode kebijakan Propenas 1999-2004 hampir seluruhnya mengalami penurunan hal ini ditunjukkan oleh nilai negatif dari angka perubahannya atau secara grafis ditunjukkan bahwa grafiknya untuk setiap sektor berada dibawah garis absis nol (Gambar 4.6). Untuk masa periode kebijakan RPJMN-I 2004-2009, diperoleh bahwa yang mengalami peningkatan ukuran tingkat kemiskinan terdiri atas tiga sektor sesuai kelas status pekerjaan utama pekerjaannya yaitu sektor pertambangan dengan kelas status pekerjaan informal, sektor keuangan dengan kelas status pekerjaan formal, dan sektor keuangan dengan kelas status pekerjaan informal. Sedangkan yang mengalami penurunan ukuran tingkat kemiskinan adalah selainnya yaitu diantaranya sektor pertanian dengan kelas status formal dan informal, sektor listrik dengan kelas status pekerjaan formal dan informal, dan sektor transportasi dengan kelas status pekerjaan formal dan informal. Untuk masa periode kebijakan RPJMN-II 2009-2011, yang mengalami peningkatan ukuran tingkat kemiskinan terdiri atas sepuluh sektor sesuai kelas status pekerjaannya yaitu diantaranya sektor pertanian dengan kelas status pekerjaan informal, industri informal, listrik informal, transportasi formal dan informal. Sedangkan yang mengalami penurunan ukuran tingkat kemiskinan terdiri atas sembilan sektor diantaranya sektor pertanian dengan kelas status formal, sektor pertambangan formal dan informal, dan sektor keuangan dengan kelas status pekerjaan formal dan informal.



Sumber: Hasil dekomposisi

Gambar 4.6. Perubahan Tingkat Kemiskinan Sektoral pada Tiga Masa Kebijakan Pembangunan Nasional, Tahun 1999-2011

4.3.2. Analisis Pengaruh Program Pengentasan Kemiskinan terhadap Perubahan Ukuran Kemiskinan Sektoral.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah telah mengembangkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kriteria sasaran/penduduk miskin yang berhak mendapatkan intervensi pemerintah yaitu berdasarkan kriteria definisi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dimana kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yaitu kebutuhan akan makanan dan non makanan. BPS mengukur kecukupan itu dari terpenuhinya kebutuhan 2100 kkalori perhari. Sementara kebutuhan non makanan diukur dari terpenuhinya sejumlah kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Sebagai upaya meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan tersebut, pada tiga periode masa pemerintah tahun 1999-2011 masing-masing periode kebijakannya telah mengeluarkan atau menetapkan undang-undang/peraturan tentang kebijakan program pembangunan nasional diantaranya berisikan tentang program-program penanggulangan kemiskinan.

Pada masa periode kebijakan pembangunan Propenas (1999-2004) yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2000, program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara lintas sektoral dan komprehensif dimana beberapa diantaranya adalah: (1) Program Pengembangan Agribisnis, (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (3) Program Asuransi Sosial, dan beberapa program lain.

Dalam pelaksanaannya, berbagai program penanggulangan kemiskinan periode kebijakan Propenas 1999-2004 dihadapkan pada tantangan yang terkait dengan beberapa permasalahan operasional seperti belum adanya sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi, ketidaktepatan sasaran, belum berjalannya sistem pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh terhadap berbagai program, lemahnya keterpaduan antar program, masih tersendatnya desentralisasi urusan penanggulangan kemiskinan dan kurang memadainya strategi keberlanjutan yang konkrit. Hal ini terkait dengan belum terpenuhinya prasarat yang ada dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan yang holistik dan terpadu, yakni: mekanisme koordinasi pengelolaan berbagai program penanggulangan kemiskinan antar sektor maupun antara perdesaan dengan perkotaan, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan, serta belum terbangunnya sistem data yang akurat dan terintegrasi.

Pada masa periode kebijakan pembangunan nasional RPJMN-I (2004-2009), pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 sebagai upaya koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok/klaster yaitu (1) Bantuan dan Perlindungan Sosial, (2) Pemberdayaan Masyarakat dan (3) Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil yang dijalankan oleh berbagai departemen/Kementerian terkait.

Program penanggulangan kemiskinan Klaster 1: Bantuan dan Perlindungan Sosial terdiri atas delapan program yaitu diantaranya Jamkesmas, Program Wajib Belajar 9 tahun, Program Pendidikan Non-formal, Bantuan operasional sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan, Program Raskin, Program kompensasi pengurangan subsidi BBM bidang infrastruktur perdesaan, dan Program peningkatan kesejahteraan petani.

Program penanggulangan kemiskinan Klaster 2: Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas 18 program dibawah penanganan 14 departemen/kementerian/sektor, beberapa diantaranya adalah Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK), Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), dan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP).

Program penanggulangan kemiskinan Klaster 3: Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro terdiri atas 25 program dibawah penanganan 16 departemen/kementerian/sektor.

Secara umum, dari hasil pelaksanaan program ketiga klaster tersebut, pemerintah dapat memenuhi target pencapaian penurunan angka kemiskinan, yaitu sebesar 13,33 persen, dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2010 adalah pada kisaran 12,0-13,5 persen.

Pada masa periode kebijakan pembangunan nasional RPJMN-II (2009-2011), Program-program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 klaster sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dimana Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai salah satu anggotanya.

Program-program penanggulangan Kemiskinan pada Klaster-I: adalah program perlindungan sosial berbasis keluarga melalui program ini pemerintah memberikan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup pada rumah tangga sasaran dan kelompok rentan lainnya. Program-program Klaster-I antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa untuk Siswa Miskin.

Program-program penanggulangan Kemiskinan pada Klaster-II: adalah program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), melalui program ini pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Program-program penanggulangan Kemiskinan pada Klaster-III: adalah program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi.

Pencapaian target-target penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari upaya koordinasi program penanggulangan kemiskinan yang efektif diantaranya dalam hal pengarusutamaan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, dan sebagainya. Secara umum, dari hasil pelaksanaan program ketiga klaster tersebut, pemerintah dapat memenuhi target pencapaian penurunan angka kemiskinan, yaitu sebesar 13,33 persen, dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2010 adalah pada kisaran 12,0-13,5 persen.

Jika dikaitkan terhadap analisis perubahan ukuran kemiskinan sektoral yang diperoleh, capaian program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan tidak memperlihatkan adanya pengaruh secara langsung walaupun sasarannya adalah penurunan angka kemiskinan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Secara agregat terjadi penurunan ukuran kemiskinan baik untuk indeks kemiskinan (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), maupun indeks keparahan kemiskinan (P2). Pada masa periode kebijakan Propenas 1999-2004, P0 menurun sebesar 6.74 dari 23.42 menjadi 16.68, P1 menurun sebesar 1.50 dari 4.56 menjadi 3.06, P2 menurun sebesar 0.48 dari 1.38 menjadi 0.90. Masa kebijakan RPJMN-I 2004-2009, P0 menurun sebesar 2.53 dari 16.68 menjadi 14.15, P1 menurun sebesar 0.57 dari 3.06 menjadi 2.49, P2 menurun sebesar 0.23 dari 0.90 menjadi 0.67. Dan masa kebijakan RPJMN-II 2009-2011, P0 menurun sebesar 1.66 dari 14.15 menjadi 12.49, P1 menurun sebesar 0.41 dari 2.49 menjadi 2.08, P2 menurun sebesar 0.12 dari 0.67 menjadi 0.55. Adapun penyebab terjadinya penurunan ukuran kemiskinan agregat pada ketiga ukuran kemiskinan untuk periode kebijakan Propenas secara dominan diakibatkan oleh pengaruh perubahan ukuran kemiskinan sektoral (intra-sektoral), sementara untuk periode kebijakan RPJMN-I dan RPJMN-II dominan diakibatkan oleh pengaruh intra-sektoral dan antar-sektoral (pergeseran individu antar sektor).
2. Pengentasan kemiskinan pada masa kebijakan Propenas lebih merata diseluruh sektor, karena penurunan tingkat kemiskinan agregat dikontribusi oleh seluruh sektor lapangan pekerjaan utama (9 sektor) dengan urutan persentase perubahan ukuran kemiskinan tertinggi terjadi pada sektor pertanian informal sebesar 20.34%, sektor pertanian formal 6.99%, sektor perdagangan informal sebesar 7.38%, sektor jasa formal sebesar 3.83%, sektor konstruksi formal 2.50%, sektor industri informal 2.37%, dan sektor lapangan pekerjaan utama lainnya berkisar diantara 0.5% s/d 1.50%.
 Pada masa kebijakan RPJMN-I dan RPJMN-II pengentasan kemiskinan tidak merata diseluruh sektor lapangan pekerjaan utama, karena penurunan tingkat kemiskinan agregat pada kedua masa kebijakan ini secara signifikan hanya

dikontribusi oleh 4 sektor lapangan pekerjaan utama yaitu pada RPJMN-I oleh sektor pertanian informal, perdagangan formal dan informal, transportasi formal dan informal, dan konstruksi formal dan informal, sementara pada RPJMN-II oleh sektor pertanian formal, perdagangan formal, transportasi formal dan informal, dan keuangan informal.

5.2. Saran Kebijakan

Berdasarkan hasil dari analisis dekomposisi sektoral yang diperoleh, terlihat bahwa besaran ukuran kemiskinan secara agregat pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh perubahan ukuran kemiskinan mikronya dalam hal ini sektor lapangan pekerjaan utama, maka “Angka Ukuran Kemiskinan Sektoral” yang diperoleh adalah merupakan sinyal atau tanda bagi Sektor (Departemen/K/L) yang berkaitan, dimana dapat digunakan sebagai tindakan didalam melakukan perbaikan (perencanaan program) kedepan. Untuk itu sebagai saran kebijakan diharapkan:

1. Bila Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang diambil/dijalankan demi untuk menekan tingkat kemiskinan hendaklah dikenakan kepada sektor perekonomian secara langsung (sektoral) yaitu sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja antara lain adalah sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, sektor transportasi, dan sektor jasa.
2. Lembaga atau Badan berwenang di Indonesia (BPS utamanya) agar dapat melakukan dan menyediakan data survey susenas yang bisa digunakan untuk analisis kemiskinan sampai level sektor kegiatan ekonomi (sektor lapangan pekerjaan utama), mengingat data survey susenas yang ada sekarang masih kurang ketersediaanya bagi peruntukan analisis kemiskinan pada level ini.
3. Analisis dekomposisi kemiskinan ini bisa digunakan atau diterapkan juga untuk fokus atau tujuan dekomposisi secara sektoral lainnya, dengan demikian yang dilakukan disini adalah hanya merupakan salah satu aplikasi analisis dekomposisi kemiskinan yang diterapkan terhadap sektor lapangan pekerjaan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- _____ (1 Juni 2009), “*Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010: Paparan Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI*”, Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- _____ (2007), “*Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2008*”, Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2005), “*Evaluasi 4 Tahun Pelaksanaan Propenas 2000-2004*”, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2009), “*Pencapaian Sebuah Perubahan: Evaluasi 4 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009*”, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2011), “*Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014*”, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (Agustus 2009), *Data Strategis Indonesia, CV.Nasional Indah*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (Agustus 2010), *Data Strategis Indonesia, CV.Nasional Indah*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (Agustus 2011), *Data Strategis Indonesia, CV.Nasional Indah*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (1999, 2004, 2009, 2011), *Survey Sosial Ekonomi Nasional tingkat rumah tangga (Susenas-1999, Susenas-2004, Susenas-2009, Susenas-2011)*, Jakarta.
- Bank Dunia (Maret 2011), *Perkembangan Tri-wulanan Perekonomian Indonesia, Bank Dunia*, Jakarta.
- Datt, Gaurav (October 1998); *Computational Tools for Poverty Measurement and Analysis*, Food Consumption and Nutrition Division, International Food Policy Research Institute, Washington D.C.
- Essama-Nissah, B., & Peter J. Lambert (October 2006); *Assessing the Poverty Impact of Economic Growth: The Case of Indonesia*, World Bank Poverty Reduction Group and University of Oregon, Indonesia.

- Friedman, Jed (August 2003); “*How Responsive is Poverty to Growth: A Regional Analysis of Poverty, Inequality, and Growth in Indonesia, 1984-99*”, World Institute for Development Economics Research, United Nations University, Discussion Paper No.2003/57.
- Foster, J., J. Greer & E. Thorbecke (1984) “A Class of Decomposable Poverty Measures”, *Econometrica* 52(3):761-6.
- Huppi, Monika, & Ravallion, Martin (1990); “*The Sectoral Structure of Poverty During an Adjustment Period: Evidence for Indonesia in the Mid-1980s*”, The World Bank, Washington D.C.
- Krisnamurti, Bayu, Dellis, Arman, & Fausia Lusi, Yoyoh Indrayanti, Anna Fatchia, and Setyawati, Dewi (2006); “*Poverty Predictor Modeling in Indonesia: A Validation Survey*”, Working Paper, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
- Kakwani, Nanak (December 1992); “*Statistical Inference in the Measurement of Poverty*”, The University of New South Wales, New South Wales.
- Kakwani, Nanak (February 1990); “*Poverty and Economic Growth with Application to Cote d'Ivoire*”, Living Standards Measurement Study Working Paper No. 63 of the World Bank.
- Kakwani, Nanak (January 1990); “*Testing for Significance of Poverty Differences with Application to Cote d'Ivoire*”, Living Standards Measurement Study Working Paper No. 62 of the World Bank.
- Pritchett, Lant, Suryahadi, Asep, & Sumarto, Sudarno (September 2000); “*Quantifying Vulnerability to Poverty: A Proposed Measure, Applied to Indonesia*”, Policy Research, The World Bank, Jakarta.
- Prijambodo, Bambang (2011), *Perkembangan Ekonomi Makro sampai dengan 18 Februari 2011*, Bappenas, Jakarta.
- Ravallion, Martin (February 1992); “*Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods*”, The World Bank Working paper, Washington D.C.
- Ravallion, Martin, & Huppi, Monika (Januari 1991); “*Measuring Changes in Poverty: A Methodological Case Study of Indonesia during an Adjustment Period*”, The World Bank, Washington D.C.
- Suselo, Sri Liliani, & Tarsidin (Oktober 2008); “*Kemiskinan di Indonesia: Pengaruh Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi*”, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, Jakarta.
- Suryahadi, Asep, Daniel S., & Sudarno (February 2006), “*Predicting Consumption Poverty Using Non-consumption Indicators: Experiments Using Indonesia Data*”, Working Paper, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

- Suryahadi, Asep, Daniel S., & Sudarno (Agustus 2006); “*Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The effect of location and sectoral components of growth*”, Working Paper, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
- Swaminathan, Maadhura (Dseember 1991); “*Understanding the Informal Sector: A Survey*”, Centre for International Studies, M.I.T Cambridge, Massachusetts 02139.
- Sen, A. (1979); "Issues in the Measurement of Poverty", Scandinavia Journal of Economics, Vol. 81, pp 285-307.
- Sunaryo, Urip (2008); “*Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Faktor Penyebabnya*”, BPS, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Indeks Kemiskinan Sektoral, Tahun 1999-2011

Tabel L1. Indeks Kemiskinan (P₀) Sektoral¹⁾, Tahun 1999-2011

Sektor		Indeks Kemiskinan			
		1999	2004	2009	2011
Nasional		23.4205	16.6808	14.1454	12.4894
1. Pertanian	<i>Formal</i>	30.25	16.99	16.64	13.02
	<i>Informal</i>	27.99	19.18	18.07	18.88
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	13.30	8.34	6.42	4.17
	<i>Informal</i>	29.50	16.31	18.47	13.8
3. Industri	<i>Formal</i>	17.94	6.88	6.66	7.07
	<i>Informal</i>	23.50	13.41	12.99	14.66
4. Listrik	<i>Formal</i>	7.61	2.09	1.51	2.52
	<i>Informal</i>	15.39	9.49	2.23	6.72
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	23.25	11.74	8.73	8.88
	<i>Informal</i>	20.61	15.95	11.37	13.06
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	11.98	6.12	3.34	4.92
	<i>Informal</i>	15.13	7.82	5.93	5.70
7. Transportasi	<i>Formal</i>	15.02	8.81	1.72	5.62
	<i>Informal</i>	21.50	10.29	4.47	9.63
8. Keuangan	<i>Formal</i>	4.07	6.56	7.68	0.52
	<i>Informal</i>	5.65	6.85	7.21	0.72
9. Jasa	<i>Formal</i>	10.43	5.00	4.46	3.81
	<i>Informal</i>	15.90	10.95	9.53	9.42
Lainnya		24.93	17.62	15.24	13.88

Keterangan:

¹⁾: Hasil Dekomposisi Sektoral

Formal, Informal (Kelas Satus pekerjaan utama menurut BPS, dimana FORMAL terdiri atas Buruh/Karyawan/Pegawai, dan Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, INFORMAL terdiri atas Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja bebas di non pertanian, dan Pekerja tak dibayar)

Sektor: merupakan sektor lapangan pekerjaan utama, yaitu (1) Pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, (2) Pertambangan meliputi penggalian, (3) Industri meliputi industri pengolahan, (4) Listrik meliputi Gas dan Air bersih, (5) Konstruksi, (6) Perdagangan meliputi hotel dan restoran, (7) Transportasi meliputi komunikasi, (8) Keuangan meliputi real estate dan jasa perusahaan, (9) Jasa-jasa, , dan Lainnya yaitu yang tidak mempunyai pekerjaan.

Lampiran 2: Indeks Kedalaman Kemiskinan Sektoral, Tahun 1999-2011

Tabel L2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Sektoral¹⁾, Tahun 1999-2011

Sektor		Indeks Kedalaman			
		1999	2004	2009	2011
Nasional		4.5662	3.062	2.4848	2.0792
1. Pertanian	<i>Formal</i>	5.75	3.06	2.86	2.21
	<i>Informal</i>	5.66	3.39	3.22	3.22
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	2.24	1.43	0.97	0.52
	<i>Informal</i>	4.86	3.19	3.53	2.10
3. Industri	<i>Formal</i>	3.31	1.04	1.03	1.05
	<i>Informal</i>	4.15	2.15	2.18	2.31
4. Listrik	<i>Formal</i>	1.41	0.43	0.10	0.22
	<i>Informal</i>	2.10	0.93	0.04	0.43
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	4.10	2.04	1.33	1.36
	<i>Informal</i>	4.20	2.56	1.92	2.03
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	2.18	1.02	0.45	0.74
	<i>Informal</i>	2.55	1.19	0.85	0.84
7. Transportasi	<i>Formal</i>	2.66	1.55	0.35	0.79
	<i>Informal</i>	4.00	1.67	0.62	1.54
8. Keuangan	<i>Formal</i>	0.65	0.34	0.77	0.06
	<i>Informal</i>	0.70	0.27	1.61	0.26
9. Jasa	<i>Formal</i>	1.89	0.88	0.70	0.57
	<i>Informal</i>	2.65	1.80	1.67	1.47
Lainnya		4.93	3.28	2.7	2.35

Keterangan:

¹⁾: Hasil Dekomposisi Sektoral

Formal, Informal (Kelas Satus pekerjaan utama menurut BPS, dimana FORMAL terdiri atas Buruh/Karyawan/Pegawai, dan Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, INFORMAL terdiri atas Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja bebas di non pertanian, dan Pekerja tak dibayar).

Sektor: merupakan sektor lapangan pekerjaan utama, yaitu (1) Pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, (2) Pertambangan meliputi penggalian, (3) Industri meliputi industri pengolahan, (4) Listrik meliputi Gas dan Air bersih, (5) Konstruksi, (6) Perdagangan meliputi hotel dan restoran, (7) Transportasi meliputi komunikasi, (8) Keuangan meliputi real estate dan jasa perusahaan, (9) Jasa-jasa, dan Lainnya yaitu yang tidak mempunyai pekerjaan.

Lampiran 3: Indeks Keparahan Kemiskinan Sektoral, Tahun 1999-2011

Tabel L3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) Sektoral¹⁾, Tahun 1999-2011

Sektor		Indeks Keparahan			
		1999	2004	2009	2011
Nasional		1.377	0.8993	0.6706	0.5456
1. Pertanian	<i>Formal</i>	1.64	0.90	0.74	0.58
	<i>Informal</i>	1.79	0.96	0.89	0.87
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	0.63	0.47	0.22	0.10
	<i>Informal</i>	1.21	1.00	1.08	0.56
3. Industri	<i>Formal</i>	0.95	0.27	0.25	0.25
	<i>Informal</i>	1.13	0.56	0.56	0.54
4. Listrik	<i>Formal</i>	0.39	0.22	0.01	0.03
	<i>Informal</i>	0.39	0.13	0	0.03
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	1.09	0.57	0.34	0.35
	<i>Informal</i>	1.30	0.64	0.50	0.47
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	0.59	0.27	0.11	0.20
	<i>Informal</i>	0.68	0.29	0.20	0.20
7. Transportasi	<i>Formal</i>	0.72	0.43	0.10	0.18
	<i>Informal</i>	1.14	0.46	0.13	0.38
8. Keuangan	<i>Formal</i>	0.16	0.08	0.19	0.01
	<i>Informal</i>	0.17	0.04	0.38	0.07
9. Jasa	<i>Formal</i>	0.53	0.25	0.17	0.14
	<i>Informal</i>	0.69	0.49	0.45	0.36
Lainnya		1.50	0.97	0.73	0.62

Keterangan:

¹⁾: Hasil Dekomposisi Sektoral

Formal, Informal (Kelas Satus pekerjaan utama menurut BPS, dimana FORMAL terdiri atas Buruh/Karyawan/Pegawai, dan Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, INFORMAL terdiri atas Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja bebas di non pertanian, dan Pekerja tak dibayar)

Sektor: merupakan sektor lapangan pekerjaan utama, yaitu (1) Pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, (2) Pertambangan meliputi penggalian, (3) Industri meliputi industri pengolahan, (4) Listrik meliputi Gas dan Air bersih, (5) Konstruksi, (6) Perdagangan meliputi hotel dan restoran, (7) Transportasi meliputi komunikasi, (8) Keuangan meliputi real estate dan jasa perusahaan, (9) Jasa-jasa, dan Lainnya yaitu yang tidak mempunyai pekerjaan..

Lampiran 4: Kontribusi Sektor terhadap Perubahan Ukuran Kemiskinan Agregat, Tahun 1999-2011

Tabel L4. Sektor Yang Berkontribusi terhadap Perubahan Ukuran Kemiskinan Agregat

Sektor		Indeks Kemiskinan (P0)				Indeks Kedalaman (P1)				Indeks Keparahan (P2)			
		1999	2004	2009	2011	1999	2004	2009	2011	1999	2004	2009	2011
Nasional (Agregat)		23.42	16.68	14.15	12.49	4.57	3.06	2.49	2.08	1.38	0.90	0.67	0.55
1.Pertanian	Formal	30.25	16.99 ^{s)}	16.64	13.02 ^{s)}	5.75	3.06 ^{s)}	2.86	2.21 ^{s)}	1.64	0.90 ^{s)}	0.74 ^{s)}	0.58
	Informal	27.99	19.18 ^{s)}	18.07 ^{s)}	18.88	5.66	3.39 ^{s)}	3.22	3.22	1.79	0.96 ^{s)}	0.89 ^{s)}	0.87
2.Pertambangan	Formal	13.30	8.34 ^{s)}	6.42	4.17	2.24	1.43 ^{s)}	0.97	0.52	0.63	0.47	0.22	0.10
	Informal	29.50	16.31 ^{s)}	18.47	13.80	4.86	3.19 ^{s)}	3.53	2.10 ^{s)}	1.21	1.00	1.08	0.56 ^{s)}
3.Industri	Formal	17.94	6.88 ^{s)}	6.66	7.07	3.31	1.04 ^{s)}	1.03	1.05	0.95	0.27 ^{s)}	0.25	0.25
	Informal	23.50	13.41 ^{s)}	12.99	14.66	4.15	2.15 ^{s)}	2.18	2.31	1.13	0.56 ^{s)}	0.56	0.54
4.Listrik	Formal	7.61	2.09 ^{s)}	1.51	2.52	1.41	0.43 ^{s)}	0.10	0.22	0.39	0.22	0.01	0.03
	Informal	15.39	9.49	2.23	6.72	2.10	0.93 ^{s)}	0.04 ^{s)}	0.43	0.39	0.13 ^{s)}	0.00 ^{s)}	0.03
5.Konstruksi	Formal	23.25	11.74 ^{s)}	8.73 ^{s)}	8.88	4.10	2.04 ^{s)}	1.33 ^{s)}	1.36	1.09	0.57 ^{s)}	0.34 ^{s)}	0.35
	Informal	20.61	15.95 ^{s)}	11.37 ^{s)}	13.06	4.20	2.56 ^{s)}	1.92	2.03	1.30	0.64 ^{s)}	0.50	0.47
6.Perdagangan	Formal	11.98	6.12 ^{s)}	3.34 ^{s)}	4.92 ^{s)}	2.18	1.02 ^{s)}	0.45 ^{s)}	0.74 ^{s)}	0.59	0.27 ^{s)}	0.11 ^{s)}	0.20 ^{s)}
	Informal	15.13	7.82 ^{s)}	5.93 ^{s)}	5.70	2.55	1.19 ^{s)}	0.85 ^{s)}	0.84	0.68	0.29 ^{s)}	0.20 ^{s)}	0.20
7.Transportasi	Formal	15.02	8.81 ^{s)}	1.72 ^{s)}	5.62 ^{s)}	2.66	1.55 ^{s)}	0.35 ^{s)}	0.79	0.72	0.43 ^{s)}	0.10 ^{s)}	0.18
	Informal	21.50	10.29 ^{s)}	4.47 ^{s)}	9.63 ^{s)}	4.00	1.67 ^{s)}	0.62 ^{s)}	1.54 ^{s)}	1.14	0.46 ^{s)}	0.13 ^{s)}	0.38 ^{s)}
8.Keuangan	Formal	4.07	6.56 ^{s)}	7.68	0.52 ^{s)}	0.65	0.34 ^{s)}	0.77 ^{s)}	0.06 ^{s)}	0.16	0.08 ^{s)}	0.19	0.01 ^{s)}
	Informal	5.65	6.85	7.21	0.72 ^{s)}	0.70	0.27	1.61 ^{s)}	0.26 ^{s)}	0.17	0.04	0.38 ^{s)}	0.07 ^{s)}
9.Jasa	Formal	10.43	5.00 ^{s)}	4.46	3.81	1.89	0.88 ^{s)}	0.70 ^{s)}	0.57	0.53	0.25 ^{s)}	0.17 ^{s)}	0.14
	Informal	15.90	10.95 ^{s)}	9.53	9.42	2.65	1.80 ^{s)}	1.67	1.47	0.69	0.49 ^{s)}	0.45	0.36 ^{s)}
Lainnya		24.93	17.62 ^{s)}	15.24 ^{s)}	13.88 ^{s)}	4.93	3.28 ^{s)}	2.70 ^{s)}	2.35 ^{s)}	1.50	0.97 ^{s)}	0.73 ^{s)}	0.62 ^{s)}
Sektor yang berkontribusi signifikan			17	8	7		18	10	7		15	11	7
Efek Menurunkan			16	8	4		18	8	5		15	10	5
Efek Meningkatkan			1	0	3		0	2	2		0	1	2

Keterangan: Sesuai kolomnya, Angka yang bertanda ^{s)} menunjukkan Sektor yang berkontribusi signifikan terhadap Perubahan Ukuran Kemiskinan Agregat (Nasional)

Lampiran 5. Persentase Kontribusi Indeks Kemiskinan Sektoral Terhadap Indeks Kemiskinan Agregat, Periode 1999-2004

SEKTOR		Indeks Kemiskinan (P_0)			Population Shift			Persentase Kontribusi terhadap Perubahan Indeks Headcount Agregat
		1999	2004	% Perubahan	1999	2004	% Perubahan	
1. Pertanian	<i>Formal</i>	30.25	16.99	-13.26	3.55	1.31	-2.24	6.99
	<i>Informal</i>	27.99	19.18	-8.81	15.56	9.1	-6.46	20.34
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	13.30	8.34	-4.96	0.18	0.08	-0.1	0.13
	<i>Informal</i>	29.50	16.31	-13.19	0.17	0.08	-0.09	0.34
3. Industri	<i>Formal</i>	17.94	6.88	-11.06	3.32	1.72	-1.6	5.45
	<i>Informal</i>	23.50	13.41	-10.09	1.59	1.06	-0.53	2.37
4. Listrik	<i>Formal</i>	7.61	2.09	-5.52	0.08	0.03	-0.05	0.07
	<i>Informal</i>	15.39	9.49	-5.90	0.02	0.01	-0.01	0.02
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	23.25	11.74	-11.51	1.46	0.44	-1.02	2.50
	<i>Informal</i>	20.61	15.95	-4.66	0.25	0.41	0.16	0.17
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	11.98	6.12	-5.86	1.48	1.19	-0.29	1.29
	<i>Informal</i>	15.13	7.82	-7.31	6.81	2.86	-3.95	7.38
7. Transportasi	<i>Formal</i>	15.02	8.81	-6.21	0.83	0.39	-0.44	0.76
	<i>Informal</i>	21.50	10.29	-11.21	1.2	0.65	-0.55	1.99
8. Keuangan	<i>Formal</i>	4.07	6.56	2.49	0.33	0.41	0.08	0.07
	<i>Informal</i>	5.65	6.85	1.20	0.05	0.11	0.06	0.02
9. Jasa-jasa	<i>Formal</i>	10.43	5.00	-5.43	4.76	1.63	-3.13	3.83
	<i>Informal</i>	15.90	10.95	-4.95	1.18	0.73	-0.45	0.86
10. Lainnya (Tdk. Bekerja)		24.93	17.62	-7.31	57.18	78.04	20.86	62.08
NASIONAL (Agregat)		23.4205	16.6808	-6.7397				
Total Intra-sectoral Effect								116.67
Inter-sectoral Effect								-12.39
Interaction Effect								-4.28

Lampiran 6. Persentase Kontribusi Indeks Kemiskinan Sektorial Terhadap Indeks Kemiskinan Agregat, Periode 2004-2009

SEKTOR		Indeks Kemiskinan (P_0)			Population Shift			Persentase Kontribusi terhadap Perubahan Indeks Headcount Agregat
		2004	2009	% Perubahan	2004	2009	% Perubahan	
1. Pertanian	<i>Formal</i>	16.99	16.64	-0.35	1.31	1.95	0.64	0.19
	<i>Informal</i>	19.18	18.07	-1.11	9.1	8.42	-0.68	3.96
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	8.34	6.42	-1.92	0.08	0.11	0.03	0.06
	<i>Informal</i>	16.31	18.47	2.16	0.08	0.17	0.09	-0.07
3. Industri	<i>Formal</i>	6.88	6.66	-0.22	1.72	1.74	0.02	0.14
	<i>Informal</i>	13.41	12.99	-0.42	1.06	1.18	0.12	0.18
4. Listrik	<i>Formal</i>	2.09	1.51	-0.58	0.03	0.05	0.02	0.01
	<i>Informal</i>	9.49	2.23	-7.26	0.01	0.02	0.01	0.03
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	11.74	8.73	-3.01	0.44	0.61	0.17	0.53
	<i>Informal</i>	15.95	11.37	-4.58	0.41	0.41	0	0.74
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	6.12	3.34	-2.78	1.19	1.56	0.37	1.30
	<i>Informal</i>	7.82	5.93	-1.89	2.86	3.04	0.18	2.13
7. Transportasi	<i>Formal</i>	8.81	1.72	-7.09	0.39	0.4	0.01	1.09
	<i>Informal</i>	10.29	4.47	-5.82	0.65	0.45	-0.2	1.49
8. Keuangan	<i>Formal</i>	6.56	7.68	1.12	0.41	0.55	0.27	-0.18
	<i>Informal</i>	6.85	7.21	0.36	0.11	0.10	0.46	-0.17
9. Jasa-jasa	<i>Formal</i>	5.00	4.46	-0.54	1.63	2.92	1.29	0.35
	<i>Informal</i>	10.95	9.53	-1.42	0.73	1.46	0.73	0.41
10. Lainnya (Tdk. Bekerja)		17.62	15.24	-2.38	78.04	74.51	-3.53	72.99
NASIONAL (Agregat)		16.6808	14.1454	-2.5354				
Total Intra-sectoral Effect								85.16
Inter-sectoral Effect								20.43
Interaction Effect								-5.59

Lampiran 7. Persentase Kontribusi Indeks Kemiskinan Sektorial Terhadap Indeks Kemiskinan Agregat, Periode 2009-2011

SEKTOR		Indeks Kemiskinan (P_0)			Population shift			Persentase Kontribusi terhadap Perubahan Indeks Headcount Agregat
		2009	2011	% Perubahan	2009	2011	% Perubahan	
1. Pertanian	<i>Formal</i>	16.64	13.02	-3.62	1.31	2.30	0.35	4.88
	<i>Informal</i>	18.07	18.88	0.81	9.1	15.27	6.85	-4.81
2. Pertambangan	<i>Formal</i>	6.42	4.17	-2.25	0.08	0.37	0.26	0.16
	<i>Informal</i>	18.47	13.8	-4.67	0.08	0.25	0.08	0.52
3. Industri	<i>Formal</i>	6.66	7.07	0.41	1.72	3.96	2.22	-0.46
	<i>Informal</i>	12.99	14.66	1.67	1.06	1.64	0.46	-1.33
4. Listrik	<i>Formal</i>	1.51	2.52	1.01	0.03	0.13	0.08	-0.03
	<i>Informal</i>	2.23	6.72	4.49	0.01	0.02	0.00	-0.05
5. Konstruksi	<i>Formal</i>	8.73	8.88	0.15	0.44	1.26	0.65	-0.06
	<i>Informal</i>	11.37	13.06	1.69	0.41	1.25	0.84	-0.44
6. Perdagangan	<i>Formal</i>	3.34	4.92	1.58	1.19	2.49	0.93	-1.53
	<i>Informal</i>	5.93	5.7	-0.23	2.86	6.50	3.46	0.51
7. Transportasi	<i>Formal</i>	1.72	5.62	3.90	0.39	0.82	0.42	-0.98
	<i>Informal</i>	4.47	9.63	5.16	0.65	1.07	0.62	-1.59
8. Keuangan	<i>Formal</i>	7.68	0.52	-7.16	0.55	0.64	0.09	1.34
	<i>Informal</i>	7.21	0.72	-6.49	0.10	0.21	0.11	3.05
9. Jasa-jasa	<i>Formal</i>	4.46	3.81	-0.65	1.63	6.92	4.00	1.23
	<i>Informal</i>	9.53	9.42	-0.11	0.73	2.58	1.12	0.10
10. Lainnya (Tdk. Bekerja)		15.24	13.88	-1.36	78.04	52.64	-21.87	58.78
NASIONAL (Agregat)		14.1454	12.4894	-1.6560				
Total Intra-sectoral Effect								59.26
Inter-sectoral Effect								64.35
Interaction Effect								-23.61

POVERTY DECOMPOSITION

1. Group-decomposable poverty indices

Much of the early literature on the construction of poverty indices focussed on whether indices were decomposable across population subgroups. This has led to the identification of a subgroup of poverty indices known as the "class of decomposable poverty indices". These indices have the property of being expressible as a weighted sum (more generally, as a separable function) of the same poverty indices assessed across population subgroups. They most commonly include the FGT and the Chakravarty classes of indices as well as the Watts index.

Let the population be divided into K mutually exclusive population subgroups, where $\phi(k)$ is the share of the population found in subgroup k . For the FGT indices, we then have that:

$$P(z; \alpha) = \sum_k^K \phi(k) P(k; z; \alpha) \quad (1.1)$$

where $P(k; z; \alpha)$ is the FGT poverty index of subgroup k . The Watts and Chakravarty indices are expressible as a sum of the poverty indices of each subgroup in exactly the same way as for the FGT indices in (1.1).

To illustrate the practical implications of the group-decomposition property, consider the following two-group ($K = 2$) example. Let the first group contain 40% of the total population, and let poverty in group 1 be 0.8 and that of group 2 be 0.4. Poverty in the total population is then a simple weighted mean of group poverty, and is immediately computable as $0.4 \cdot 0.8 + 0.6 \cdot 0.4 = 0.56$. Estimates of total poverty in a population can then be constructed in a decentralized manner, first by estimating poverty within communities or regions, and then by averaging over these decentralized estimates, without there being a need for all of the micro data to be regrouped in one single register.

Subgroup decomposability also implies that an income improvement in one of the subgroups will necessarily improve aggregate poverty if the incomes in the other groups have not changed. It will also mean that the optimal design of social safety nets and benefit targeting within any given group can be assessed independently of the income distribution in the other groups: only the distributive characteristics of the relevant group matter for the exercise. If targeting succeeds in decreasing poverty at a local level, then it must also succeed at the aggregate level.

Subgroup decomposability is therefore useful, although it is certainly not imperative for poverty analysis. In particular, it is not because an index facilitates

poverty profiling and targeting analysis that this index is necessarily ethically fine. Ease of computation and ethical soundness are also two different and potentially conflicting criteria. Among other things, imposing the decomposability and additivity property can mean sacrificing some important ethical features in the aggregation of poverty. In that context, Ravallion (1994) notes that when measuring poverty "one possible objection to additivity is that it attaches no weight to one aspect of a poverty profile: the inequality between subgroups in the extent of poverty". This can be an important flaw if for instance between-group relative deprivation is considered ethically significant.

2. Demographic and sectoral decomposition of differences in FGT indices

Equation (1.1) shows how poverty can be expressed as a sum of the poverty contributions of the various subgroups that make a population. Each subgroup contributes in proportion to its share in the population and to the level of poverty found in that subgroup. Hence, we may wish to express changes in poverty across time or space as a function of differences in these factors. More precisely, we want to see whether differences in poverty across distributions can be attributed to differences in demographic or sectoral composition across these distributions, or to differences in poverty across these demographic or sectoral groups. We may express this as follows:

$$\begin{aligned}
 & \overline{P}_B(z; \alpha) - \overline{P}_A(z; \alpha) \\
 &= \underbrace{\sum_k^K \phi_A(k) (\overline{P}_B(k; z; \alpha) - \overline{P}_A(k; z; \alpha))}_{\text{within-group poverty effects}} \\
 &+ \underbrace{\sum_k^K \overline{P}_A(k; z; \alpha) (\phi_B(k) - \phi_A(k))}_{\text{demographic or sectoral effects}} \\
 &+ \underbrace{\sum_k^K (\overline{P}_B(k; z; \alpha) - \overline{P}_A(k; z; \alpha) (\phi_B(k) - \phi_A(k)))}_{\text{interaction or error term}}.
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

Note that the decomposition in (2.1) suffers from the same index number problem as the earlier one in (Growth-redistribution decompositions). For example, one could prefer to use $\phi_B(k)$ instead of $\phi_A(k)$ to compute the within-group poverty effects. It may

also seem more convenient to weight the within-group poverty effects by the average population shares, and to weight the demographic and sectoral effects by the average poverty index.

$$\begin{aligned}
& \overline{P}_B(z; \alpha) - \overline{P}_A(z; \alpha) \\
&= \sum_k^K \underbrace{\overline{\phi}(k) (\overline{P}_B(k; z; \alpha) - \overline{P}_A(k; z; \alpha))}_{\text{within-group poverty effects}} \\
&+ \sum_k^K \underbrace{\overline{P}(k; z; \alpha) (\phi_B(k) - \phi_A(k))}_{\text{demographic or sectoral effects}}, \tag{2.2}
\end{aligned}$$

where $\overline{\phi}(k) = 0.5 (\phi_A(k) + \phi_B(k))$ and $\overline{P}(k; z; \alpha) = 0.5 (\overline{P}_A(k; z; \alpha) + \overline{P}_B(k; z; \alpha))$. Note from (2.2) that this decomposition procedure removes the error term. Depending on the context, the decomposition in (2.2) could serve to show, for instance, how variations in the size and in the poverty of various sectors of the economy account for variations of total poverty across economies, how differences in the size and in the poverty of various demographic groups explain differences in total poverty across societies, how migration and differential poverty across regions account for changes in poverty across time, *etc.*.

3. The impact of demographic changes

An alternative use of the decomposition in (1.1) computes the impact of a change in the proportion of the population that is found in a group k , this change being accompanied by an exactly offsetting change in the proportion of the other groups. This may be useful, for instance, if one wishes to predict the impact of migration or demographic changes on national poverty, keeping out within-group poverty. Let the population share of a group t , $\phi(t)$, increase by a proportion λ to $\phi(t)(1 + \lambda)$, with a proportional fall in the other groups' population share from $\phi(k)$ to $\phi(k) (1 - \phi(t)\lambda/(1 - \phi(t)))$. Note that the new population shares will add up to 1 since

$$\phi(t)(1 + \lambda) + \sum_{k \neq t} \phi(k) \left(1 - \frac{\phi(t)\lambda}{1 - \phi(t)} \right) = \sum_k \phi(k) = 1. \tag{3.1}$$

The net impact of this on poverty is.

$$\Delta P(z; \alpha) = \left(P(t; z; \alpha) - \sum_{k \neq t} \frac{\phi(k)}{1 - \phi(t)} P(k; z; \alpha) \right) \phi(t)\lambda. \tag{3.2}$$

We may instead wish to predict the impact of an absolute increase in the population share of a group t . Let this change be from $\phi(t)$ to $\phi(t) + \lambda$, with a corresponding fall in the other groups' population share that is proportional to their initial share (a fall from $\phi(k)$ to $\phi(k) (1 - \lambda/(1 - \phi(t)))$). The resulting change in poverty is analogously given as

$$\Delta P(z; \alpha) = \left(P(t; z; \alpha) - \sum_{k \neq t} \frac{\phi(k)}{1 - \phi(t)} P(k; z; \alpha) \right) \lambda. \tag{3.3}$$

Note that the only difference between (3.1) and (3.2) comes from the size in the increase in $\phi(t)$, which is $\phi(t)\lambda$ in (3.1) and λ in (3.2).